

NOMOR X

ISSN 1412-8608

BUNGA RAMPAI

HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

102

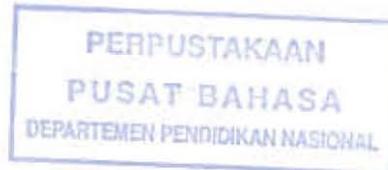
BALAI BAHASA DENPASAR
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008

NOMOR X

ISSN 1412-8608

BUNGA RAMPAI

HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA



BALAI BAHASA DENPASAR
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	No. Induk: 752	Tgl. 9-12-09	Tid. :
	Klasifikasi 499.261.102 PVA b		

**BUNGA RAMPAI
BAHASA DAN SASTRA**

NOMOR X, TAHUN 2008, ISSN 1412-8608

Penanggung Jawab

Dr. Dendy Sugono
Kepala Pusat Bahasa Jakarta

Pengarah

Drs. Caesarius Ruddyanto, M.A.
Kepala Balai Bahasa Denpasar

Mitra Bestari

Prof. Dr. Aron Meko Mbete, Prof. Dr. I Made Suastika, S.U.
Prof. Dr. I Made Gosong, M.Pd., Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd.

Penyunting

Dra. Ni Pt. Ekatini Negari, M.Hum., Dra. Ida Ayu Mirah Purwiati, M.Hum.,
Drs. I Nengah Sukayana, M.Hum., Dra. Ni Luh Partami, M. Hum.,
Drs. I Made Purwa, M.Hum.

Pelaksana

Dra. Ni Putu Asmarini

Tata Rupa

Slamat Trisila

Staf Administrasi

Anak Agung Rai Agung, I Made Mariyatha, S.E.

Alamat Redaksi

Jalan Trengguli I No.20
Tembau, Denpasar 80238
Telepon (0361)461714
pos-el: balaibahasa_denpasar@yahoo.com

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA

Bahasa merupakan salah satu ciri identitas satu bangsa. Lewat bahasa orang dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat penuturnya. Artinya, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan teknologi informasi yang amat pesat. Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah kebijakan di bidang kebahasaan. Urusan bahasa dan sastra daerah yang dulu ditangani pemerintah pusat, kini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sejalan dengan perkembangan itu, Pusat Bahasa beserta unit pelaksana teknisnya, yaitu kantor dan balai bahasa di provinsi, berupaya meningkatkan mutu pelayanan kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan minat baca menuju perubahan orientasi dari budaya dengar-bicara ke budaya baca-tulis.

Sehubungan dengan itu, Pusat Bahasa berupaya menerbitkan hasil penelitian dan pengembangan bahasa untuk menyediakan bahan rujukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai berbagai informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Untuk itu, Pusat Bahasa, melalui Balai Bahasa Denpasar, menerbitkan buku *Bunga Rampai: Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra* yang memuat kumpulan hasil penelitian di Balai Bahasa Denpasar. Penerbitan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khazanah kepustakaan tenaga peneliti di Bali dan di Indonesia pada umumnya.

Atas penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para peneliti yang karyanya dimuat dalam buku ini. Kepada Drs. C. Ruddyanto, M.A., Kepala Balai Denpasar beserta staf redaksi, saya ucapkan terima kasih atas usaha dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberi manfaat bagi peminat bahasa dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, September 2008

Dr. Dendy Sugono

PRAKATA

Bahasa dan sastra merupakan lahan penelitian yang senantiasa menarik. Sastra lahir dari desakan-desakan nurani untuk mencipta. Ide-ide seni yang mendesak diformulasikan melalui bahasa. Bahasa sebagai produk budaya menarik dicermati karena bahasa merupakan sarana penggerak kehidupan. Dengan bahasa, manusia dimungkinkan untuk berpikir, mengembangkan pikiran, menyampaikannya kepada orang lain, mengatur tata pergaulan dengan orang lain, dan seterusnya. Penelitian tentang bahasa akan membuka wawasan kita tentang dunia kita.

Sejumlah laporan pendek penelitian kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah, dihimpun dan diterbitkan dalam bentuk *Bunga Rampai*. Tulisan yang dimuat sebanyak duabelas: sembilan tentang kebahasaan dan tiga tentang kesastraan. Tulisan kebahasaan pun beragam, yakni berkaitan dengan sosiolingustik, tipologi, morfologi, semantik, wacana ritual, dan analisis kesalahan.

Penerbitan *Bunga Rampai* ini juga dimaksudkan untuk menggairahkan semangat meneliti bagi para peneliti di lingkungan Balai Bahasa Denpasar. Terbitnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, saya berterima kasih kepada Dr. Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan hingga terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh penulis, editor, dan staf administrasi yang bekerja dengan sepenuh hati dalam penerbitan ini.

Kami selalu berharap mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah.

Denpasar, Oktober 2008

Drs. C. Ruddyanto, M.A.
Kepala Balai Bahasa Denpasar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Prakata	v
Daftar Isi	vii
Penerapan Kaidah Bahasa yang Tidak Konsisten sebagai Cermin Ketidakpedulian Terhadap Pembinaan Bahasa <i>I Nengah Sukayana</i>	1
Tipologi Sintaksis Bahasa Bali <i>Ida Ayu Mirah Purwiati</i>	19
Macam-Macam Campur Kode dalam Bahasa Indonesia pada Penyuluhan Pertanian di Subak Munggu Singaraja <i>Ida Bagus Ketut Maha Indra</i>	47
Wacana Ritual Segehan Sah-Sah dan Cah-Cah dalam Bahasa Bali <i>I Gde Wayan Soken Bandana</i>	62
Kategorisasi Homonim dalam Bahasa Bali <i>Ni Wayan Sudiati</i>	78
Pemakaian Bahasa oleh Masyarakat Jawa di Kota Bangli <i>Wayan Sudana</i>	96
Pola Kalimat Surat Undangan Dinas di Denpasar <i>Ni Luh Partami</i>	116
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode dalam Dharma Wacana Agama Hindu di Kota Denpasar <i>I Nengah Budiasa</i>	131

Aneka Makna Adjektiva Bentuk Ulang secara Morfemis dalam Bahasa Bali	
<i>Ni Luh komang Candrawati</i>	149
Peran Tokoh Pinggiran: Pemahaman Dekonstruksi Retoris Novel <i>Putri Karya Putu Wijaya</i>	
<i>Puji Retno Hardiningtyas</i>	166
Sosial Budaya Bali dalam Cerita <i>Jayaprana</i>	
<i>Made Pasek Parwatha</i>	187
Beberapa Cara Penulisan Aksara Bali (Pasang Aksara Bali)	
<i>I Made Sudiarga</i>	206

**PENERAPAN KAIDAH BAHASA YANG TIDAK
KONSISTEN SEBAGAI CERMIN KETIDAKPEDULIAN
TERHADAP PEMBINAAN BAHASA**

I Nengah Sukayana

1. Pendahuluan

“Bahasa menunjukkan bangsa” merupakan semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, lebih-lebih bagi kalangan yang berkecimpung langsung dalam bidang kebahasaan. Semboyan ini muncul sebagai rasa peduli kita terhadap bahasa Indonesia untuk tetap menunjukkan tata krama yang santun dalam berbahasa. Akan tetapi, semboyan tetap semboyan. Kesantunan dan pemeliharaan kaidah-kaidah bahasa belakangan ini semakin tidak dihiraukan oleh banyak kalangan yang notabene penutur dan pengguna bahasa Indonesia.

Salah satu media yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan bahasa Indonesia adalah media massa cetak. Media ini semestinya dapat dijadikan anutan bagi pengguna bahasa di kalangan masyarakat karena media ini setiap hari dibaca oleh lebih dari separo masyarakat di perkotaan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan tahun 2007 terhadap media massa cetak di Denpasar, khususnya *Bisnis Bali* tercermin bahwa masih banyak penyimpangan kaidah bahasa baku yang ditemukan. Penyimpangan-penyimpangan itu berkaitan dengan penerapan kaidah ejaan, pilihan kata, tata kalimat, dan wacana. Pada subpasal 2 di bawah ini akan dipaparkan semua penyimpangan yang berkaitan dengan ejaan, pilihan kata, tata kalimat, dan wacana.

2. Kesalahan Pemakaian Bahasa

2.1 Pemakaian Ejaan

Berbicara masalah ejaan berarti pula berbicara masalah bahasa tulis. Seperti diketahui bahwa apabila ditinjau dari cara pengungkapan atau media ungkap, bahasa dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Ciri formal yang membedakan bahasa lisan dan bahasa tulis adalah lafal dan ejaan. Dalam bahasa lisan akan dapat didengar lafal, sedang dalam bahasa tulis akan tampak ejaan.

Bahasa media massa cetak dalam hal ini *Radar Bali* dijadikan objek pemantauan berkaitan dengan bahasa tulis (baku). Salah satu unsur yang mendukung pemakaian bahasa tulis itu adalah ejaan (di samping kosakata, kalimat, dan wacana). Dari pemantauan yang dilakukan terhadap koran *Bisnis Bali* yang berkaitan dengan ejaannya dapat diklasifikasikan menjadi (a) kesalahan pemakaian huruf kapital, (b) kesalahan pemakaian tanda titik, dan (c) kesalahan pemakaian tanda koma.

2.1.1 Pemakaian Huruf Kapital

Untuk pembahasan pemakaian huruf kapital atau sering disebut pula dengan huruf besar, perhatikan data berikut.

- (1) Aksi itu dilakukan oleh *Paket Nyoman Ray Yusha dan Ni Putu Febri Antari*.
- (2) Menurut *camat Busungbiu Ketut Asta Semadi* bahwa kerusuhan itu diawali...
- (3) Menurut *Nyoman Ray Yusha* bahwa aksi itu dilakukan oleh *Banzer*.
- (4) *Paket kandidat dari koalisi kebangsaan yang mendapat julukan the green coalition, Made Westra, SH dan Ketut Englan* kemarin menggemparkan Buleleng Barat.

- (5) Paket yang menggelar *roadshow* di tiga kecamatan akan dipusatkan di *Gedung Serba Guna* Desa Patas.

Letak kesalahan pada kalimat (1)–(5) berkaitan dengan penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada kata-kata yang dicetak miring. Pada kalimat (1) pengapitalan huruf /p/ di awal kata *paket* tidak sesuai dengan kaidah atau ketentuan PUEYD. Kata *paket* adalah kata umum yang digunakan di dalam kalimat. Semestinya huruf /P/ kapital diubah menjadi /p/ yang tidak kapital. Demikian pula halnya dengan kata *Banzer* pada kalimat (3), *Koalisi* pada kalimat (4), dan *Gedung Serba Guna* pada kalimat (5) semestinya huruf awal dari masing-masing kata tersebut tidak dikapitalkan. Berbeda halnya dengan penulisan huruf /c/ pada *camat Busungbiu* yang ditulis dengan huruf kecil. Karena kata *camat* diikuti nama wilayah kecamatan, yaitu *Busungbiu*, semestinya, huruf /c/ pada kata *camat* dikapitalkan. Jadi, perbaikan kalimat (1)–(5) adalah sebagai berikut.

- (1a) Aksi itu dilakukan oleh *paket* Nyoman Ray Yusha dan Ni Putu Febri Antari.
- (2a) Menurut *Camat Busungbiu*, Ketut Asta Semadi, bahwa kerusuhan itu diawali
- (3a) Menurut Nyoman Ray Yusha bahwa aksi itu dilakukan oleh *banzer*.
- (4a) Paket kandidat dari *koalisi* kebangsaan yang mendapat julukan *the green coalition*
- (5a) Paket yang menggelar *roadshow* di tiga kecamatan akan dipusatkan di *gedung serba guna* Desa Patas.

Dari uraian di atas tampak bahwa kesalahan pemakaian huruf kapital dapat diklasifikasikan menjadi dua. Klasifikasi yang dimaksud adalah (1) pemakaian huruf kapital pada kata yang semestinya bukan kapital dan (2) pemakaian

huruf kecil pada kata yang semestinya menggunakan huruf kapital.

2.2.2 Pemakaian Tanda Titik (.)

Tanda titik juga sering digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (PUYD). Ketidaktepatan pemakaian itu bisa terjadi karena dua hal. Kedua hal yang dimaksud adalah (1) sesuatu yang semestinya menggunakan tanda titik pada kenyataannya tidak diberi tanda titik dan (2) sesuatu yang semestinya tidak menggunakan tanda titik diberi tanda titik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan data berikut.

- (6) Ketua PN Denpasar *I Putu Widnya SH*, ketika dikonfirmasi koran ini menegaskan, bahwa tugas PN Denpasar
- (7) Dengan catatan Iswahyudi *dkk* tim kita punya peluang untuk menang
- (8) Menurut pemilik rumah makan minang, *A Muslim* di RS Sanglah)
- (9) Dalam pelatihan Posyandu ini menghadirkan pembicara dari Dinas Kesehatan yaitu *I A Puspayeni*.

Kalimat (6) di atas tidak sesuai dengan ketentuan pemakaian tanda titik. Pemakaian tanda titik yang dimaksud terdapat pada penulisan nama gelar di belakang nama diri, yaitu *I Putu Widnya SH*. Singkatan nama gelar *sarjana hukum* semestinya menggunakan tanda titik pada masing-masing hurufnya, yaitu S.H.

Kalimat (7) letak kesalahannya pada singkatan dan kawan-kawan yang ditulis *dkk* tanpa tanda titik. Berdasarkan PUEYD), singkatan itu diakhiri tanda titik, yaitu *dkk*. Kalimat (8) tidak tepat karena penulisan singkatan nama diri, yaitu *A Muslim*. Dalam ketentuan PUYD, singkatan nama diri diikuti tanda titik. Penulisan yang benar adalah *A. Muslim*. Demikian pula halnya dengan kalimat (9) juga

berkaitan dengan penulisan singkatan nama diri yang tidak menggunakan tanda titik. Singkatan nama diri yang dimaksud adalah I A (Ida Ayu). Penulisan nama singkatan yang benar adalah I.A. (Ida Ayu). Perbaiki kalimat (6) – (9) adalah sebagai berikut.

- (6a) Ketua PN Denpasar, *I Putu Widnya, S.H.* ketika dikonfirmasi koran ini menegaskan bahwa tugas PN Denpasar
- (7a) Berdasarkan catatan *Iswahyudi dkk.*, Tim kita mempunyai peluang untuk menang
- (8a) Menurut pemilik rumah makan minang A. Muslim di RS Sanglah
- (9a) Dalam pelatihan posyandu ini dihadirkan pembicara dari Dinas Kesehatan, yaitu *I.A. Puspayeni*.

Kalimat (9) tidak tepat bukan semata-mata karena kesalahan ejaan, dalam hal ini penulisan singkatan nama diri yang tidak menggunakan tanda titik. Akan tetapi, kalimat (9) bermasalah juga berkaitan dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur minimal yang berkaitan dengan fungsi kalimat. Dalam hal ini, unsur yang membentuk fungsi subjeknya tidak ada. Berkaitan dengan ini, dalam butir ini akan dikesampingkan terlebih dahulu karena akan dibahas lebih lanjut pada permasalahan kalimat.

2.2.2 Pemakaian Tanda Koma (,)

Tanda koma (,) bukan semata-mata untuk menandai jeda pendek dalam bahasa tulis. Akan tetapi, tanda koma juga digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain, misalnya memisahkan antara nama diri dan gelar kesarjanaan yang mengikutinya, sebagai pengapit unsur penjelas dari frasa apositif koordinatif, dan memisahkan anak kalimat dan induk kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat yang anak

kalimatnya mendahului induk kalimat.

Dalam realisasinya, fungsi-fungsi yang telah tertuang dalam PUEYD itu masih ada yang dilanggar. Pelanggaran itu tercermin dari data yang dikutip dari koran *Radar Bali*. Data-data penyimpangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- (10) Saat itu satu-satunya pengacara dari TPM yang hadir yakni *Fahmi Bachmid SH*
- (11) Hal itu diungkapkan *Kadis Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusumawardhani* dalam jumpa persnya kemarin
- (12) *Direktur Umum dan Operasional RS Sanglah drg Triputro Nugroho M.Kes* terkait dengan warna-warninya bet satpam
- (13) Beragam peserta mulai dari siswa *SD, SMP dan SMA* berbaur mengakhiri acara kemarin.
- (14) *Ketua PN Denpasar I Putu Widnya SH*, ketika dikonfirmasi koran ini menegaskan, bahwa tugas PN Denpasar sudah final dan tuntas.

Pada kalimat (10), antara nama diri dan singkatan nama gelar (sarjana hukum), yaitu S.H. semestinya dipisahkan oleh tanda koma (,). Penggunaan tanda koma, selain itu adalah antara unsur yang diterangkan dengan penjelasnya dalam frasa koordinatif yang bersifat apositif. Frasa koordinatif apositif terdapat pada kalimat (11). Unsur-unsur koordinatifnya adalah *Kadis Pendidikan Provinsi Bali* dan *TIA Kusumawardhani*. Unsur apositif yang berfungsi sebagai penjelas adalah *TIA Kusumawardhani* dalam aturan penulisan semestinya diapit oleh tanda hubung. Demikian pula pada kalimat (12) unsur-unsur frasa koordinatifnya adalah *Direktur Umum dan Operasional dan drg. Triputro Nugroho, M.Kes*, dan unsur koordinatif kalimat (14) adalah *Ketua PN Denpasar dan I Putu Widnya SH*. Unsur-unsur koordinatif yang terletak pada bagian belakang unsur

koordinatif utama disebut sebagai penjelas atau tambahan. Berdasarkan PUEYD, keterangan penjelasnya diapit oleh tanda koma.

Pada kalimat (13) terdapat perincian. Tanda koma semestinya ditempatkan pada masing-masing bagian dari perincian itu. Namun, pada kalimat (13), antara bagian unsur yang terakhir dengan unsur di depannya tidak dibubuhi tanda koma. Dengan demikian, kalimat (10)–(14) dapat diperbaiki sebagai berikut.

- (10a) Saat itu satu-satunya pengacara dari TPM yang hadir adalah *Fahmi Bachmi, S.H.*
- (11a) Hal itu diungkapkan *Kadis Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusumawardhani*, dalam jumpa persnya kemarin.
- (12a) *Direktur Umum dan Operasional RS Sanglah, drg. Triputro Nugroho, M.Kes.*, terkait dengan
- (13a) Beragam peserta mulai dari siswa SD, SMP, dan SMA berbaaur dalam acara kemarin.
- (14a) Ketua PN Denpasar, *I Putu Widnya, S.H.*, ketika dikonfirmasi koran ini menegaskan bahwa

2.1.4 Pemakaian Tanda Hubung (-)

Tanda hubung merupakan salah satu dari beberapa sistem ejaan yang mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsi tanda hubung (-) adalah menghubungkan kata yang dipenggal dalam pergantian baris. Artinya, apabila dalam penulisan kata belum lengkap pada margin kanan, dimanfaatkanlah tanda hubung.

Dalam *Radar Bali* penggunaan tanda hubung kebanyakan berkaitan dengan pemenggalan dalam pergantian baris. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata cara pemenggalannya banyak yang tidak menuruti kaidah pemenggalan kata. Hal itu tampak dalam data berikut.

- (15) Bahkan *Westra* sempat menggertak Ketua KPUD Buleleng *Wayan Rideng*

- (16) Paket Nomor 4 Made Westra-Ketut England *hadir* lengkap.
- (17) Apa yang dikatakan salah satu kandidat bupati/wabup hanyalah *pernyataan* pribadi
- (18) ... sehingga pilkada dapat berlangsung aman, *damai*, demokratis, dan bersih.

Kalimat (15) tidak cermat karena pemenggalan kata *Wayan* pada pergantian baris seenaknya saja tanpa pernah mempertimbangkan apakah cara pemenggalan seperti itu dapat dibenarkan. Kata *Wayan* sebenarnya adalah nama orang. Berdasarkan ejaan, nama orang diharapkan untuk tidak dipenggal dalam pergantian baris. Kata *hadir* pada kalimat (16) juga dipenggal semau penulisnya sendiri dengan tidak memperhatikan pola persukuan. Kata *hadir* merupakan kata dasar yang dalam aturan ejaan diusahakan untuk tidak dipenggal. Kalau dengan terpaksa harus dipenggal, sebaiknya dipenggal pada suku kata yang tepat, yaitu *ha-dir*. Pada kalimat (17) dan (18) kasusnya juga sama, yaitu pemenggalan kata pada pergantian baris yang tidak memperhatikan pola persukuan. Untuk memperbaikinya, diusahakan pemenggalannya pada suku katanya. Dengan demikian, untuk kalimat (17), kata *pernyataan* dipenggal menjadi *per-nyataan* dan kalimat (18), kata *damai* sebaiknya tidak dipenggal karena kata dasar. Apabila terpaksa, pemenggalannya adalah menjadi *da-mai*.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan perbaikan kalimat (15) – (18) di bawah ini.

- (15a) Bahkan Westra sempat menggertak Ketua KPUD Buleleng *Wayan* Rideng
- (16a) Paket Nomor 4 Made Westra-Ketut England *hadir* lengkap.
- (17a) Apa yang dikatakan salah satu kandidat bupati/wabup hanyalah *pernyataan* pribadi

(18a) ... sehingga pilkada dapat berlangsung aman, damai, demokratis, dan bersih.

2.2 Pilihan Kata

Agar dapat berbahasa dengan baik, masalah diksi atau pilihan kata merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Masalah pemilihan kata bukan semata-mata berkaitan dengan baku atau tidak bakunya kata itu melainkan berkaitan pula dengan makna kata yang dapat berimplikasi kesalahpahaman antara peserta wicara (penulis dan pembaca). *Radar Bali* sebagai media massa cetak yang beredar di Bali—setidak-tidaknya—akan memperhatikan masalah ini dalam menyajikan artikel-artikel yang dimuatnya. Walaupun demikian, masih saja ada pemakaian pilihan kata yang kurang tepat bila diukur dari persyaratan bahasa (Indonesia) baku. Ketidaktepatan itu bisa saja terjadi karena keteledoran, kesengajaan, atau ketidakpahaman akan aturan yang berlaku pada bahasa baku atau standar. Untuk mengetahui bagaimana masalah pilihan kata itu dalam penerapannya di *Radar Bali*, perhatikan data berikut.

- (19) *Hanya saja*, kapolres tidak berani menyebut banzer sebagai pelaku *kerusuhan* mobil camat DK 55 U itu.
- (20) Kapolres Buleleng AKBP Setyo Dwiantoro *menyebut* peristiwa memalukan itu terjadi sekitar 14.30.
- (21) Bangli *dideadline* dua minggu untuk menyelesaikan kasus itu.
- (22) Meski hari besar Waisak jatuh pada hari Jumat besok, ternyata tidak mendongkrak antusiasme pembeli, alias *tidak bergeming*.

Kalimat (19) kurang efektif karena pemakaian pilihan kata yang kurang cermat. Pemilihan kata yang kurang cermat itu adalah (a) *hanya saja* dan (b) *kerusuhan*. Kata *hanya saja* dalam kalimat ini berfungsi sebagai kata

penghubung antarkalimat yang bersifat membatasi atau mempertentangkan makna yang terkandung pada klausa sebelumnya. Seperti diketahui bahwa kata *hanya* dan *saja* keduanya memiliki fungsi membatasi lingkup makna klausa sebelumnya. Dengan demikian, kita cukup menggunakan kata *hanya* untuk perbaikan kalimat (19). Di samping itu, kalimat (19) juga kurang efektif karena pemakaian kata *kerusuhan*. Apabila kita mendengar kata *kerusuhan*, yang ada dalam benak kita adalah pelaku *kerusuhan* itu terdiri atas dua kelompok yang saling bentrok. Misalnya, warga kampung A bentrok dengan warga kampung B sehingga menimbulkan *kerusuhan*. Namun, pada kalimat (19) yang menjadi sasaran kemarahan adalah *mobil*. Oleh karena itu, kata yang lebih sesuai maknanya adalah *perusakan*. Perbaikan kalimat (19) adalah sebagai berikut.

(19a) *Hanya*, kapolres tidak berani menyebutkan banzer sebagai pelaku *perusakan* mobil camat DK 55 U itu.

Penggunaan kata *menyebut* pada kalimat (20) tampaknya kurang cermat. Makna kata *menyebut* pada kalimat itu seakan-akan Kapolres Buleleng yang dalam hal ini berfungsi sebagai subjek, tidak dengan sengaja menginformasikan peristiwa itu. Padahal, dalam konteks yang lebih luas, Kapolres Buleleng dengan sengaja untuk mengungkapkan peristiwa itu kepada wartawan. Untuk itu, pilihan kata yang lebih sesuai adalah *menyebutkan*. Kata *dideadline* pada kalimat (21) merupakan kata jadian. Kata itu dibentuk dari kata dasar *deadline* dan prefiks *di-*. Seperti diketahui bahwa kata *deadline* merupakan bahasa Inggris yang dapat dipadankan dengan kata *tenggat* dalam bahasa Indonesia. Kata *dideadline* merupakan bentuk hibrid dari unsur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hal seperti ini sedapat mungkin untuk dihindarkan pemakaiannya, terutama dalam berbahasa baku. Lebih-lebih unsur asing itu sudah mempunyai padanan

dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, kata *dideadline* itu semestinya diganti dengan *diberi tenggat*. Perbaikan kalimat (20) dan (21) adalah sebagai berikut.

(20a) Kapolres Buleleng, AKBP Setyo Dwiantoro, *menyebutkan* peristiwa memalukan itu terjadi sekitar 14.30.

(21a) Bangli *diberi tenggat* dua minggu untuk menyelesaikan kasus itu.

Kalimat (22) bermasalah karena penggunaan kata (frasa) *tidak bergeming*. Makna kata *bergeming* adalah 'diam saja; tidak bergerak sedikit juga'. Apabila kita kaitkan dengan makna klausa sebelumnya, pemakaian frasa tidak bergeming tidak tepat, malah bertentangan dengan keinginan si penulis. Oleh karena itu, modalitas *tidak* yang mengingkarkan makna frasa *tidak bergeming* perlu dihilangkan sehingga menjadi *bergeming* saja. Jadi, perbaikan kalimat (22) adalah sebagai berikut.

(22a) Meski hari besar Waisak jatuh pada hari Jumat besok, ternyata tidak mendongkrak antusiasme pembeli, alias *bergeming*.

2.3 Pemakaian Kalimat

Pemakaian bahasa dalam artikel surat kabar merupakan laras bahasa jurnalistik yang bersifat formal, terutama pada berita-berita utama. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan pun harus memenuhi syarat-syarat bahasa (Indonesia) baku atau standar. Adapun syarat-syarat bahasa (Indonesia) baku atau standar, antara lain (1) kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, (2) memperhatikan koherensi bentuk-makna yang tepat, dan (3) pemakaian struktur (frasa dan kalimat) yang tepat. Ketiga faktor itulah yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik atau tidaknya kalimat yang digunakan wartawan pada *Radar Bali*. Untuk kepentingan itu, perhatikan data berikut.

- (23) Baru minggu lalu meninggalkan Bali untuk keperluan diskusi publik otonomi khusus di TMII.
- (24) Masing-masing anggota Komisi I yang studi banding ke Palembang, Sumatra Selatan.
- (25) Menurut Kepala Pusat Statistik *mengatakan* bahwa lonjakan harga barang-barang komoditi menjelang hari raya besar adalah sesuatu yang normal.

Seperti sudah diurikan di atas bahwa kalimat yang baik sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Apabila diperhatikan data kalimat (23) di atas, ternyata tidak memiliki unsur subjek. Apabila dipertanyakan unsur subjeknya dengan kalimat berikut, "Siapa yang meninggalkan Bali?" Kita tidak dapat menemukan jawabannya pada kalimat (23). Untuk memperbaiki kalimat (23) satu-satunya cara adalah dengan menambahkan unsur subjek. Dari keseluruhan paragraf akhirnya dapat ditemukan jawaban pertanyaan di atas. Ternyata yang meninggalkan Bali adalah anggota Komisi I. Karena kalimat ini merupakan kalimat penjas, unsur subjek pada kalimat ini dapat berupa kata ganti, misalnya *mereka* untuk menggantikan kata anggota Komisi I yang berjumlah jamak. Kalimat (23) dapat diperbaiki sebagai berikut.

(23a) *Mereka* baru minggu lalu meninggalkan Bali untuk keperluan diskusi publik otonomi khusus di TMII.

Tuturan (24) sama sekali tidak memenuhi syarat kalimat karena unsur-unsur minimal untuk sebuah kalimat adalah adanya subjek dan predikat. Akan tetapi, dalam data (24) unsur-unsur subjek dan predikat itu sama sekali tidak ada. Memang data (24) tampaknya panjang. Faktor panjangnya suatu tuturan belum menjamin bahwa unsur itu merupakan kalimat selama persyaratan minimal itu belum terpenuhi. Untuk mengubah data (24) agar menjadi sebuah kalimat

yang baik, kita harus menghilangkan kata penghubung *yang* dan menambahkan unsur predikatnya, misalnya *melakukan*. Perbaikan tuturan (24) adalah sebagai berikut.

(24a) Masing-masing anggota Komisi I *melakukan* studi banding ke Palembang, Sumatra Selatan.

Kalimat (25) juga tidak memenuhi syarat-syarat kalimat yang baik. Persyaratan yang tidak dipenuhi adalah unsur (fungsi) subjek. Dengan kata lain, unsur subjek tidak dimiliki oleh kalimat (25). Kita tidak dapat mengatakan bahwa *menurut Kepala Pusat Statistik* itu sebagai unsur subjek karena ada kata depan *menurut*. Apabila kata *menurut* yang terletak di depan nama jabatan *Kepala Biro Pusat Statistik* dihilangkan, unsur sisanya itu baru berpotensi sebagai fungsi subjek dalam kalimat (25). Jadi, kalimat (25) akan menjadi efektif apabila kata depan *menurut* dihilangkan. Perbaikannya adalah sebagai berikut.

(25a) Kepala Pusat Statistik mengatakan bahwa lonjakan harga barang-barang komoditi menjelang hari raya besar adalah sesuatu yang normal.

2.4 Pemakaian Wacana

Kita dapat meninjau bahasa dari segi bunyi, bentuk morfologi, bentuk sintaksis, serta segi semantik dan seolah-olah menganggap bahasa itu merupakan hal yang lepas-lepas. Dalam kenyataannya kita memakai bahasa semata-mata sebagai alat untuk komunikasi. Dengan demikian, bahasa tidak dipandang alat komunikasi manusia yang diperinci dalam bentuk bunyinya, frasanya, ataupun kalimatnya secara terpisah. Manusia memakai bahasa dalam wujud kalimat yang saling berkaitan. Kalimat pertama meneral timbulnya kalimat kedua; kalimat kedua menjadi acuan kalimat ketiga. Kalimat ketiga kembali mengacu pada kalimat pertama, dan seterusnya. Rentetan kalimat yang

berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain membentuk kesatuan yang dinamakan wacana. Agaknya jelas bahwa pembicaraan tentang wacana memerlukan pengetahuan kita tentang kalimat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalimat.

Berkaitan dengan pemantauan pemakaian bahasa ini, penulis mencoba untuk mengamati bagaimana paragraf-paragraf atau alinea-alinea itu disusun dalam tulisan atau artikel. Apakah masing-masing kalimat yang membentuk paragraf itu sudah berkaitan atautkah sama sekali tidak memiliki hubungan. Untuk itu, marilah kita amati data yang berupa paragraf berikut.

- (1) Dua kapal LCT atau kapal barang kandas di Pantai Prapat Agung, Singaraja setelah terseret arus dini hari kemarin.
- (2) Dua kapal nahas itu masing-masing LCT Reuline dan Labrita Amelia. Nahas pertama dialami kapal Reulina seusai menaikkan muatan di dermaga LCM Gilimanuk sekitar pukul 22.40 tujuan Pelabuhan Ketapang. (RB/17/6/07/1)

Paragraf (1) hanya terdiri atas satu kalimat, sedangkan paragraf (2) terdiri atas dua kalimat. Sebenarnya paragraf (1) dan kalimat pertama dari paragraf (2) mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan menjadi penjelas dari paragraf (1). Dengan demikian, paragraf (1) dan kalimat pertama pada paragraf (2) dapat dijadikan satu paragraf (1a) berikut.

- (1a) Dua kapal LCT atau kapal barang kandas di Pantai Prapat Agung, Singaraja setelah terseret arus dini hari kemarin. Dua kapal nahas itu masing-masing LCT Reuline dan Labrita Amelia.

Kalimat kedua pada paragraf (2), yaitu *Nahas pertama dialami kapal Reulina seusai menaikkan muatan di dermaga*

LCM Gilimanuk sekitar pukul 22.40 tujuan Pelabuhan Ketapang dijadikan paragraf yang baru karena topik pembicaraannya sudah beralih ke topik yang lain.

3. Simpulan

Masih banyak ditemukan kesalahan pemakaian bahasa di media massa cetak di Denpasar, khususnya *Bisnis Bali*. Hal itu merupakan salah satu indikator bahwa para penulis kurang peduli terhadap penerapan kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa tulis yang berkaitan dengan bahasa tulis. Ketidakkonsistenan penerapan aturan itu ada dua kemungkinan faktor penyebabnya. Kedua kemungkinan yang dimaksud adalah (1) penulis atau wartawan memang tidak memahami kaidah-kaidah yang berlaku pada bahasa tulis sehingga sangatlah wajar apabila bahasa yang dituangkan dalam artikel-artikelnya banyak yang tidak sesuai dengan kaidah yang dipersyaratkan bahasa (tulis) baku dan (2) penulis memang memahami kaidah-kaidah bahasa (tulis) baku, tetapi dengan sengaja untuk tidak mengindahkan aturan-aturan itu dengan alasan "ekonomi bahasa". Apabila alasan (1) benar, sangatlah disayangkan karena tulisan-tulisan mereka yang tidak karuan itu akan ditiru oleh pembaca (yang tidak memahami kaidah bahasa) sehingga semakin kacaulah bahasa Indonesia yang kita bangga-banggakan. Apabila alasan kedua yang benar juga sangat memprihatinkan karena mereka terlalu arogan dan tidak menunjukkan sikap keteladanan kepada para pembaca yang pada akhirnya akan memperumit pembinaan bahasa Indonesia yang kita cintai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana. S.T. 1981. "Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Manusia dan Kebudayaan Modern". Dalam Majalah *Bahasa dan Sastra Tahun VII Nomor 2*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Alwi, Hasan dkk. 1992. *Seri Penyuluhan 3: Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alwi, Hassan dan Dendy Sugono. 2003. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Anwar, Rosihan. 1984. *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*. Jakarta: Paramita
- Aritonang, Buha et al. 2000. *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Badudu, J.S. 1992. *Cakrawala Bahasa Indonesia 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djabarudi, Slamet. 1981. "Peranan Media Massa dalam Pembinaan Bahasa Indonesia". Dalam Majalah *Bahasa dan Sastra Tahun VII Nomor 2*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Djajasudarma, T.F. 1994. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung : PT Eresco.
- Halim, Amran. 1978. *Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. 1992. *Bahasa Konteks dan Teks*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Harmoko. 1988. "Peningkatan Komunikasi yang Efektif dengan Bahasa Indonesia untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia V 1991/1992*. Penyunting Sitanggang, S.R.H. et.al. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hoed, B.H. 1983. "Ragam Bahasa Berita dan Cirinya". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kridalaksana, Harimurti 1975. " Beberapa Ciri Bahasa Indonesia Standar". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra Tahun 1 Nomor 1 1975*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (Ed.). 1985. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lumintintang, Yayah B. 1989. *Permasalahan Kebahasaan di dalam Ragam Bahasa Media Massa Cetak*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- 1981. *Bahasa Indonesia: Pola Kalimat Ragam Tulis Fungsional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Moeliono, Anton M. et al. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranarka. A.M.W. 1978. *Bahasa Indonesia dalam Hubungan dengan Pengembangan Kebudayaan Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Ramlan M. 1983. *Ilmu Bahasa Indonesia: Morfologi*. Yogyakarta: UP Karyono.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana Press.
- Sugono, Dendy. 1997. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Puspa Suara.

TIPOLOGI SINTAKSIS BAHASA BALI

Ida Ayu Mirah Purwiati

1. Pendahuluan

Bahasa Bali sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia sudah sering dijadikan objek penelitian. Sebagai objek penelitian, bahasa Bali telah dibicarakan dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi sintaksisnya. Di antara penelitian tersebut adalah *Tata Bahasa Bali* (Anom, 1983), *Sintaksis Bahasa Bali* (Bawa, 1983), dan "Tata Bahasa Baku Bahasa Bali" (Sulaga, 1992).

Ditinjau dari kelengkapan penelitian sintaksis yang telah dilakukan, ketiga penelitian bahasa Bali itu dapat dikatakan lengkap karena semua tataran sintaksis yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat sudah dibicarakan. Akan tetapi, dalam penelitian-penelitian itu salah satu aspek sintaksisnya, yaitu klausa intransitif belum dibicarakan secara mendalam. Hal itu dapat dilihat dari penamaan jenis relasi gramatikal, baik pada klausa transitif maupun klausa intransitif. Perbedaan antara relasi subjek pada klausa intransitif yang predikatnya berupa verba berafiks dan verba takberafiks tidak dibicarakan. Perbedaan relasi gramatikal objek pada klausa transitif yang memiliki dua objek juga belum dibicarakan. Hal itu dapat dilihat pada uraian klausa yang dipetik dari hasil penelitian tersebut, seperti contoh berikut.

1. *I bapa kenyel* 'Bapak lelah' (Anom, 1983)

S P

2. *I Guru masatua* 'Guru bercerita' (Bawa, 1983)

S P

3. *I bapa ngaritang sampi padang*

S P O O

'Bapak menyabitkan sapi rumput'

Klausa (1) dan (2) di atas, dalam penelitian "Tata Bahasa Bali" dan *Sintaksis Bahasa Bali* hanya dijelaskan sebagai klausa intransitif karena klausa tersebut tidak memiliki objek (Bawa,1983; Sulaga,1983). Klausa (3) disebut sebagai klausa transitif karena disertai objek dan lebih lengkap disebut sebagai klausa bitransitif karena diikuti oleh dua objek. Namun, dasar yang dipakai untuk menentukan bahwa argumen sebelum predikat, seperti *I bapa* 'Bapak' (1) dan (3), dan *I guru* 'guru' (2) adalah unsur gramatikal subjek dan argumen setelah predikat, seperti *sampi* 'sapi' dan *padang* 'rumput' adalah objek tidak jelas. Perbedaan verba intransitif takberafiks *kenyel* 'lelah' dan verba intransitif berafiks *masatua* 'bercerita' juga belum dibicarakan. Itu menunjukkan bahwa keintransitifan klausa bahasa Bali dan relasi gramatikalnya belum dibahas secara terperinci. Keintransitifan klausa suatu bahasa penting dibicarakan karena hal itu dapat mengungkap relasi gramatikal klausanya dan juga tipologi suatu bahasa, yakni tipologi bahasa secara sintaksis.

Tipologi sintaksis satu bahasa dapat ditelusuri melalui perilaku relasi gramatikal klausa intransitifnya. Oleh karena itu, klausa bahasa Bali perlu dibahas secara teoretis untuk mendapat gambaran yang lebih memadai tentang keintransitifan dan relasi gramatikalnya. Teori Tata Bahasa Relasional (TR), misalnya, menyatakan bahwa suatu klausa disebut sebagai klausa intransitif bila klausa itu memiliki satu argumen inti, baik berupa subjek langsung maupun berupa objek langsung. Hal itu menunjukkan bahwa TR menggunakan istilah objek untuk argumen klausa intransitif. Sementara itu, bila sebuah klausa memiliki dua argumen inti berupa subjek dan objek langsung disebut dengan

klausa transitif (Pelmutter dan Postal, 1984). Dari uraian itu dapat dikatakan bahwa intransitif dapat dibagi menjadi dua bergantung pada argumen verbanya, yaitu intransitif yang argumennya berupa subjek langsung dan intransitif yang argumennya berupa objek langsung.

Teori Tata Bahasa Relasional juga memanfaatkan relasi gramatikal seperti subjek dan objek, yakni relasi yang sering dipakai dalam penelitian dengan teori struktural, tetapi penentuan relasi konstituennya berbeda antara struktural dan Tata Bahasa Relasional. Teori struktural menentukan relasi konstituennya berdasarkan semantis, sedangkan Tata Bahasa Relasional menentukan relasi konstituennya berdasarkan semantis dan gramatikal.

Penelitian bahasa Bali yang khusus membicarakan keintransitifan dan relasi gramatikal sebuah klausa, baik dengan teori struktural maupun dengan teori lainnya dalam menentukan tipologinya secara sintaksis belum ada. Untuk itulah, kajian yang berjudul "Tipologi Sintaksis Bahasa Bali" dilakukan dengan mempermasalahkan sistem morfologi verba intransitif, struktur argumen klausa intransitif, dan tipologi bahasa Bali.

Tulisan ini secara umum bertujuan merintis kajian tipologi bahasa melalui penerapan teori tipologi dari segi sintaksisnya. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memberi informasi baru dalam bidang sintaksis bahasa Bali, khususnya tentang tipologi sehingga dapat dipakai sebagai bahan yang bermanfaat bagi pengembangan bahasa Bali, di samping memperdalam pemahaman tipologi bahasa Bali. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Bali. Secara khusus, kajian ini bertujuan mendeskripsikan morfologi verba intransitif bahasa Bali, mengungkap struktur argumen klausa intransitif bahasa Bali, mendeskripsikan

dan mengungkap pemilahan intransitif bahasa Bali, serta mendeskripsikan dan mengungkap tipologi bahasa Bali dari sudut keintrinsifan.

Data tulisan ini diambil dari karya sastra berupa *Satua-Satua sané Banyol ring Kesusastraan Bali* (1976) oleh Bagus, *Satua Bawak Mabasa Bali* (1977) oleh Warsa, novel *Malancaran ka Sasak* (1978) hasil karya Srawana, dan novel *Tresnané Lebur Ajur Satondén Kembang* (1981) karya Jelantik Santha. Data dianalisis dengan metode agih (Sudaryanto, 1993:13) yang selanjutnya dijabarkan dengan teknik lanjutan berupa teknik lesap, teknik ganti, teknik perluas, dan teknik permutasi.

Ancangan yang digunakan untuk menentukan tipologi bahasa Bali secara sintaksis disesuaikan dengan hal-hal yang dibicarakan. Berkaitan dengan keintrinsifan, transitif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah verba yang memerlukan dua argumen atau predikat dengan dua tempat (argumen), sedangkan intransitif adalah verba yang memerlukan satu argumen atau predikat dengan satu tempat (Haegeman, 1992). Hal ini sesuai dengan konsep transitif yang dikemukakan oleh Permutter & Postal (1984) yang menyatakan bahwa transitif adalah predikat yang memerlukan dua argumen inti, sedangkan intransitif adalah predikat yang memerlukan satu argumen inti. Sementara itu, argumen adalah sesuatu yang meliputi manusia dan benda-benda lainnya yang terlibat dalam suatu aktivitas atau keadaan yang dinyatakan oleh predikat (Haegeman, 1992). Dalam hal tipologi diacu ancangan yang dikemukakan oleh Comrie (1988) dan Dixon (1994). Disebutkan bahwa bila dalam suatu bahasa **S**(ubjek), yakni argumen inti intransitif diperlakukan sama dengan **A**(gen), yakni argumen agen transitif, tetapi berbeda dari **P**(asien), yakni argumen pasien transitif, bahasa tersebut bertipe akusatif. Bila suatu bahasa memperlakukan **S** sama dengan **P**, tetapi berbeda dari

A disebut sebagai bahasa ergatif, dan bila suatu bahasa memperlakukan sebagian S sebagian A dan sebagian S yang lain sebagai P, bahasa tersebut termasuk bahasa bertipe *Split-S*. Bahasa yang bertipe *Split-S* oleh Klimov (1979) disebut sebagai bahasa 'aktif'.

Tipe-tipe bahasa yang dikemukakan oleh Dixon (1994) tersebut dapat digambarkan seperti berikut.

	Akusatif	Ergatif	Aktif
Intransitif	S	S	A P
Transitif	A P	A P	A P

Dixon (1994) juga menyebutkan bahwa setiap bahasa memiliki klausa intransitif, yakni klausa dengan satu argumen inti yang disebut dengan 'S'. Sementara itu, klausa transitif memiliki dua argumen inti yang disebut A dan O(bjek) yang dalam tulisan ini digunakan A dan P. Berkaitan dengan relasi gramatikal, teori yang dipakai dalam kajian ini adalah teori tata bahasa relasional (Blake, 1990) yang memanfaatkan seperangkat relasi gramatikal, seperti subjek, objek langsung, objek taklangsung, dan relasi oblik sebagai gagasan dasar. Tiga relasi pertama sebagai relasi inti (*term*) dan relasi oblik meliputi benefaktif, lokatif, dan instrumen disebut bukan inti (*nonterm*). Penelitian ini juga mengacu pada pandangan Mithun (1991) dan Van Valin (1990) dalam memilah keintransitifan bahasa Bali.

2. Tipologi Sintaksis Bahasa Bali

2.1 Morfologi Verba Intransitif Bahasa Bali

Secara morfologis verba intransitif bahasa Bali dapat dibagi dua, yakni verba berafiks dan tidak berafiks. Verba intransitif berafiks berupa verba berafiks *N-*, *ma-*, kombinasi afiks *ma - an*, dan prefiks *maN-* seperti berikut.

1. *Katak lan enggung ngongkék pacelengkung.*
'Katak dan kodok ngorek bersahutan.'
2. *Pancingé macantél di jukungé.*
'Pancing itu tersangkut di perahu.'
3. *Pan Laksmi masepédaan ka rumah sakit.*
'Pak Laksmi bersepeda ke rumah sakit.'
4. *I Pugleg mamuduh sasukat somahné mati.*
'Pugleg menggila semenjak istrinya mati.'

Verba berafiks predikat klausa intransitif bahasa Bali itu bentuk dasarnya berkelas verba, nomina, dan adjektiva yang bergabung dengan prefiks atau afiks tersebut di atas.

Verba intransitif takberafiks, yakni verba yang berfungsi sebagai predikat tanpa mengalami proses morfologis. Verba intransitif takberafiks berupa verba dasar dan verba keadaan seperti berikut.

5. *Luluné anyud ka pasih.*
'Sampah hanyut ke laut.'
6. *Menarané puun sander kilap.*
'Menara itu terbakar disambar petir.'

Predikat intransitif 'takberafiks' berupa verba keadaan menyatakan partisipannya berada dalam keadaan atau kondisi tertentu (Mithun, 1991). Dalam bahasa Bali, verba keadaan kebanyakan diturunkan dari kata yang berkategori adjektiva seperti berikut.

7. *Bungané aas kena ujan.* 'bunga itu rontok kena hujan.'
8. *Tiang nyeh jumah pedidi.* 'saya takut di rumah sendiri.'

2.2 Struktur Argumen Klausa Intransitif Bahasa Bali

Setiap klausa memiliki struktur argumen yang ditentukan berdasarkan jumlah argumen yang diperlukan. Argumen, dalam hal ini adalah partisipan yang terlibat dalam suatu aktivitas atau keadaan yang dinyatakan oleh predikat

sebuah klausa (Haegeman, 1993). Jadi, struktur argumen sangat bergantung pada predikat suatu klausa. Predikatlah yang menentukan jumlah serta peran-peran argumen yang diperlukan. Haegeman (1993:36) mengumpamakan predikat seperti sebuah naskah. Di dalam naskah itu telah tercantum jumlah serta peran partisipan yang diperlukan. Disebutkan pula bahwa keterangan (*adjuncts*) hanyalah sebagai peran tambahan atau tidak merupakan argumen inti sebuah klausa. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa unsur noninti verba intransitif disebut sebagai keterangan, sedangkan unsur itu dapat berupa frasa preposisional, frasa nominal, frasa numeral, atau frasa adjektival. Sementara itu, frasa nominal dan frasa preposisional adalah wujud dari argumen. Dengan demikian, frasa nominal dan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan klausa intransitif adalah argumen noninti, sedangkan frasa numeral dan frasa adverbial hanya sebagai unsur noninti.

Haegeman (1993) juga menyebutkan bahwa verba transitif (tradisional) adalah predikat dengan dua tempat (*two-place predicates*), yakni predikat yang memerlukan dua argumen, sedangkan verba intransitif dinyatakan sebagai predikat dengan satu tempat (*one-place predicate*), yakni predikat yang memerlukan satu argumen, argumen yang dimaksud adalah argumen inti.

Berdasarkan data, struktur argumen klausa intransitif bahasa Bali memiliki unsur inti dan unsur noninti. Unsur intinya berupa argumen, sedangkan unsur nonintinya dapat berupa argumen dan dapat pula tidak. Argumennya berupa frasa nominal dan frasa preposisional, predikatnya berupa frasa verbal, dan unsur noninti yang bukan argumen berupa frasa adverbial dan frasa numeral. Berikut ini adalah struktur argumen klausa intransitif bahasa Bali.

(a) Struktur argumen yang hanya terdiri atas unsur inti.

Nérta nyerit. 'Nerti menjerit.'

FN FV

- (b) Struktur argumen yang terdiri atas unsur inti dan noninti frasa adverbial.

Nérta ngeling sigsigan. 'Nerti menangis tersedu-sedu.'

FN FV FAD

- (c) Struktur argumen yang terdiri atas unsur inti dan noninti berupa frasa adverbial dan frasa preposisional.

Nérta nyerit gigan di betén punyan tiingé.

FN FV FAD FP

'Nerti menjerit latah di bawah pohon bambu.'

- (d) Struktur argumen yang terdiri atas unsur inti dan unsur noninti berupa argumen noninti frasa nominal dan frasa preposisional.

Wayan Tamba ia nogog di balé dangin.

FN FN FV FP

'Wayan Tamba dia membuat patung di rumah timur.'

- (e) Struktur argumen yang terdiri atas unsur inti dan tiga unsur noninti berupa dua frasa preposisional dan satu frasa adverbial.

Di betén tiingé mén Tamba kisah-kisah maplisahan di sisin

FP FN FAD FV FP

'Di bawah pohon bambu Bu Tamba duduk tak berdaya di tukadé.

tepi sungai.'

- (f) Struktur argumen yang terdiri atas unsur inti dan sejumlah unsur noninti.

Di désané ngenem bulan di Galungané para terunané

FP FN FP FN

sebarengan mabakti ka pura

FAD FV FP

'Di desanya setiap enam bulan pada hari Galungan para pemudanya bersama-sama ke pura.'

- (g) Struktur argumen yang terdiri atas unsur inti dan unsur noninti berupa frasa numeral.

Baan dinané tusing pasah telu watangé marerod ka setrané.

FP Fnum FN FV FP

'Karena hari baik tiga mayat beriringan ke kuburan.'

2.3 Pemilahan Intransitif Bahasa Bali

Tipologi bahasa secara sintaksis ditentukan berdasarkan perlakuan relasi S intransitif (Dixon, 1984). Penjelasan itu menunjukkan bahwa tipologi suatu bahasa baru dapat ditentukan bila perilaku S klausa intransitif satu bahasa sudah diketahui. Perilaku S klausa intransitif dapat diketahui melalui pemilahan. Dalam bahasa Bali pemilahan intransitif tampak seperti berikut.

Keterpilahan intransitif suatu bahasa muncul dalam teori tata bahasa relasional (TR). Disebutkan bahwa bila suatu konstruksi hanya memiliki satu argumen yang menjadi relasi inti, relasi tersebut dapat berupa subjek atau objek langsung (Perlmutter dan Postal, 1984a) yang bersumber dari Perlmutter (1978). Hal itu, secara implisit telah menunjukkan bahwa intransitif dapat dipilah menjadi dua, yakni yang berargumen subjek dan yang berargumen objek langsung. Disebutkan pula bahwa intransitif yang berargumen subjek disebut takergatif, sedangkan intransitif yang berargumen objek langsung disebut takakusatif (Perlmutter dan Postal, 1984). Hal senada juga diungkapkan oleh Van Valin (1990) dan Mithun (1991). Van Valin (1990) menyebutkan bahwa

klausa intransitif memiliki satu argumen inti yang dapat berperan makroaktor atau berperan makropasien yang bergantung pada jenis verbanya. Sementara itu, Mithun (1991) menyebutkan bahwa intransitif sebuah bahasa dapat dipilah menjadi intransitif berargumen agen yang disebut intransitif takergatif dan intransitif berargumen pasien yang disebut intransitif takakusatif. Pendapat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa intransitif suatu bahasa dapat dipilah menjadi dua, yakni intransitif berargumen agen yang disebut intransitif takergatif dan intransitif yang berargumen pasien yang disebut intransitif takakusatif (Perlmutter dan Postal, 1984; Mithun, 1991).

Pada dasarnya predikat intransitif bahasa Bali dapat dipilah menjadi intransitif takergatif, argumennya berperan agen dan intransitif yang takakusatif argumennya berperan pasien. Hal itu disebabkan, secara semantis sebagian intransitif bahasa Bali berargumen agen dan sebagian lainnya berargumen pasien, seperti berikut.

- (1) ... *masan rainan beli magaé.*
... saat hari raya kakak bekerja.'
- (2) *Rame anaké nutur di tentené semengan.*
'Ramai orang bercerita di pasar pagi.'

Secara semantis, argumen inti klausa intransitif di atas adalah *beli* 'kakak' dan *anaké* 'orang' melakukan pekerjaan aksi. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa argumen klausa intransitif (1) dan (2) di atas adalah argumen yang berperan agen atau aktor karena melakukan pekerjaan.

Sementara itu, pada klausa berikut tampak bahwa argumennya tidak melakukan pekerjaan atau aksi.

- (3) *Ia inget tekén munyin timpalné.*
'Dia ingat dengan pesan temannya.'
- (4) *Telu anaké mati cepokan.*
'Tiga orang meninggal sekalian.'

Argumen *ia* 'ia' (3) dan *telu anaké* 'tiga orang' (4) adalah argumen yang tidak melakukan pekerjaan. Argumen tersebut berada dalam keadaan atau kondisi seperti tersebut dalam verba *inget* 'ingat' atau *mati* 'mati'. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa klausa sejenis itu termasuk klausa intransitif yang berargumen pasien.

Predikat klausa intransitif berargumen agen berupa verba aksi, sedangkan predikat klausa intransitif berargumen pasien termasuk verba keadaan. Pemilahan tersebut didukung data secara morfologi, yaitu verba intransitif berafiks berargumen agen atau verba takergatif, sedangkan verba intransitif takberafiks berargumen pasien atau verba takakusatif. Hal itu sesuai dengan Perlmutter dan Postal (1984). Namun, perlu juga diketahui bahwa terdapat sejumlah verba intransitif berafiks bahasa Bali yang argumennya tidak melakukan aksi, seperti berikut.

(5) *Damaré moyagan kena angin.*

'Lentera itu bergoyang kena angin.'

Secara semantis, argumen *damaré* 'lentera itu' tidak melakukan aksi, akan tetapi predikatnya berupa verba berafiks *moyagan* 'bergoyang'.

Pencermatan terhadap keberadaan klausa intransitif bahasa Bali seperti itu memperlihatkan bahwa verba intransitif berafiks tidak selalu berperan pelaku peristiwa, misalnya pada klausa (5) secara semantis argumennya tidak melakukan aksi, tetapi mengalami suatu peristiwa. Itu berarti bahwa argumen klausa intransitif yang predikatnya verba berafiks dalam bahasa Bali tidak selalu berupa verba aksi.

Verba aksi dapat dibagi dua, yaitu verba aksi yang argumennya mengontrol situasi yang dinyatakan oleh verba (argumennya berperan agen) dan verba aksi yang argumennya tidak mengontrol aksi yang dinyatakan oleh

verba (argumennya berperan pengakibat *affector*) (Van Valin, 1990). Argumen yang berperan agen dan pengakibat oleh Van Valin (1990) dimasukkan ke dalam argumen yang berperan makroaktor (agen). Argumen lainnya yang juga dimasukkan ke dalam argumen dengan peran makroaktor adalah argumen yang berperan pengalam (*experiencer*). Argumen dengan peran pengalam dimiliki oleh sejumlah verba keadaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran makroaktor (agen) meliputi argumen yang berperan *agen*, *penyebab*, dan *pengalam*. Argumen-argumen dengan peran tersebut dimiliki oleh verba aksi (mengontrol dan takmengontrol) dan sejumlah verba keadaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mithun (1991) berkaitan dengan intransitif berargumen agen. Dia menyebutkan bahwa suatu bahasa mengelompokkan intransitifnya bergantung pada sifat bahasanya. Bahasa Lakhota, misalnya, mengelompokkan suatu verba menjadi verba kelas pertama, yakni verba yang argumennya berperan agen bila argumen tersebut berupa partisipan yang menyatakan 'pelaku/pembentuk', 'penyebab', 'penghasil', atau 'pengontrol' kejadian yang dinyatakan verba. Itu berarti bahwa argumen verba intransitif takergatif tidak saja berperan *pelaku*, tetapi dapat pula berperan *penyebab*, *pengalam*, *penghasil*, atau *pengontrol kejadian yang dinyatakan oleh verba*.

Sementara itu, yang termasuk verba takakusatif atau verba berargumen pasien adalah verba keadaan atau verba yang partisipannya tidak menyebabkan, melakukan, menghasilkan, atau mengontrol kejadian yang dinyatakan oleh verba (Mithun, 1991). Hal ini senada dengan Van Valin (1990) yang menyebutkan bahwa verba berargumen pasien meliputi verba keadaan dan verba yang argumennya menjadi seperti yang dinyatakan oleh verba. Jelasnya, peran makro *undergoer* (pasien) meliputi argumen berperan pasien,

lokatif, dan tema.

Berdasarkan data, bahasa Bali, bila dikaitkan dengan pendapat Mithun (1991) dan Van Valin (1990), verba intransitifnya dapat dipilah menjadi verba intransitif berargumen agen atau verba takergatif berupa verba berafiks dan verba intransitif berargumen pasien atau verba takakusatif berupa verba takberafiks. Hal itu disebabkan argumen verba intransitif berafiks bahasa Bali, pada umumnya berupa partisipan yang menyatakan 'pelaku, pengakibat, pengalam, penghasil, atau pengontrol' kejadian yang dinyatakan oleh verba, sedangkan argumen verba takberafiks bahasa Bali tidak menyatakan hal itu, seperti terlihat pada contoh berikut.

a. Verba Intransitif Takergatif Bahasa Bali

Maplalian 'bermain', *majalan* 'berjalan', *malajah*, 'belajar', *nyilem* 'tenggelam', *ngenceh* 'kencing', *ngambul* 'ngambek', *ngigel* 'menari', *maroko* 'merokok', *majaguran* 'berpukulan', *makeneh* 'berpikir', *magaé* 'bekerja', *ngendih* 'bersinar', *masileman* 'menyelam' *madokaran* 'berdelman', atau *ngeling* 'menangis'.

b. Verba Intransitif Takakusatif Bahasa Bali

Kokohan 'batuk', *ulung* 'jatuh', *teka* 'datang', *kiyap* 'mengantuk', *bedak* 'haus', *siteng* 'kuat', *anyud* 'hanyut', *belah* 'pecah', *kalah* 'kalah', *pedih* 'marah', *sugih* 'kaya', atau *sakit* 'sakit'.

Keterpilahan intransitif bahasa Bali di atas dapat menjelaskan perbedaan relasi gramatikal subjek pada klausa intransitif. Berdasarkan keterpilahan itu, klausa intransitif bahasa Bali yang predikatnya berupa verba berafiks, argumen intinya adalah subjek yang berperan agen, sedangkan klausa yang predikatnya berupa verba takberafiks argumen intinya adalah subjek yang berperan pasien.

Berkaitan dengan subjek agen dan subjek pasien, Dixon (1994) menyebutkan bahwa argumen inti klausa intransitif yang memiliki perilaku sama dengan argumen agen transitif (A) disebut dengan **Sa** dan argumen inti klausa intransitif yang memiliki perilaku sama dengan objek transitif (P) disebut dengan **So**. Dengan demikian, subjek agen disebut **Sa** dan subjek pasien disebut **So**.

Perilaku subjek klausa intransitif tersebut dapat menentukan tipologi suatu bahasa. Dixon (1994) menyebutkan bahwa tipologi suatu bahasa dapat ditentukan berdasarkan cara suatu bahasa memperlakukan S, yakni argumen inti klausa intransitifnya. Untuk menentukan tipologi bahasa Bali berdasarkan keintransitifan perilaku S-nya harus diketahui. Salah satu cara untuk melihat perilaku S itu adalah dengan tes kausatif.

Pengausatifan pada dasarnya adalah penambahan agen (Comrie, 1980). Sehubungan dengan pengausatifan, Dixon (1994) menyatakan bahwa tes kausatif dapat dipakai untuk membedakan Sa dan So sebuah bahasa. Ditambahkan lagi bahwa pengausatifan dapat dilakukan pada So, tetapi tidak pada Sa. Maksudnya, makna kausatif muncul bila proses kausatif dilakukan pada intransitif takakusatif, sedangkan pengausatifan pada Sa tidak memunculkan makna kausatif.

2.3.1 Pengkausatifan Intransitif Bahasa Bali

Sejumlah bahasa memiliki cara-cara tertentu untuk menurunkan verba transitif kausatif dari verba intransitif, misalnya, *the balloon burst* 'balon itu meledak' → *I burst the balloon* 'saya meledakkan balon itu' (Dixon, 1994). Sehubungan dengan verba transitif, bahasa Bali memiliki transitif, yakni struktur yang terdiri atas dua argumen inti, satu berfungsi sebagai subjek berperan agen dan satu lagi

berfungsi sebagai objek langsung berperan pasien (Permatter dan Postal, 1984).

Verba transitif bahasa Bali dapat berupa verba asal, maksudnya verba tersebut sudah dapat berfungsi sebagai predikat tanpa melalui proses morfologi. Verba itu, misalnya, *adep* 'jual' dalam klausa *ajengan adep ipun* 'nasi ia jual' atau *gaé* 'buat' dalam *umah gae bapa ditu* 'rumah bapak buat di sana'.

Verba transitif bahasa Bali juga dapat berupa verba berafiks yang diturunkan dari pembubuhan afiks *-ang* pada verba intransitif, baik intransitif takergatif (verba berafiks) maupun intransitif takakusatif (verba takberafiks). Pentransitifan dengan sufiks *-ang* dalam bahasa Bali dapat memunculkan klausa transitif yang kausatif. Dengan kata lain, salah satu pengkausatifan dalam bahasa Bali dapat dilakukan dengan pelekatan afiks *-ang* pada verba intransitif.

Data memperlihatkan bahwa pengausatifan dengan pembubuhan afiks *-ang* pada verba intransitif, baik verba intransitif takergatif maupun verba intransitif takakusatif menghasilkan klausa dengan dua argumen inti (transitif). Klausa yang dihasilkan dapat berupa klausa transitif bermakna kausatif dan dapat pula berupa klausa transitif dengan makna bukan kausatif atau ablatif.

(1a) *I mémé negak.*

'Ibu duduk.' (intransitif)

(1b) *Tiang negakang I mémé.*

'saya mendudukkan ibu.' (transitif kausatif)

(2a) *Ipun nutur.*

'Dia bercerita.' (intransitif)

(2b) *Tiang nuturang ipun.*

'Saya membicarakan dia.' (transitif tak kausatif)

Pebubuhan afiks *-ang* pada sejumlah verba intransitif bahasa Bali, baik yang takergatif (berafiks) maupun yang takakusatif (takberafiks), juga menghasilkan klausa yang argumen intinya memiliki peran yang sama. Maksudnya, satu klausa memiliki dua argumen berperan agen. Klausa ini memiliki predikat verba berafiks. Satu klausa memiliki dua argumen berperan pasien predikatnya berupa verba takberafiks. Di samping itu, juga ada klausa yang memiliki satu argumen berperan agen dan argumen lainnya berperan pasien, seperti berikut.

(3a) *I Tamba nyongkok.*

'I Tamba berjongkok.'

(3b) *Tiang nyongkokang I Tamba.*

'Saya menjongkokan I Tamba.'

Argumen *tiang* 'saya' dan *I Tamba* 'I Tamba' pada klausa (b) sama-sama berperan agen.

(4a) *Ia sebet.*

'Dia susah.'

(4b) *Ia sebetang tiang.*

'Dia saya buat susah.'

Argumen *ia* 'dia' dan *tiang* 'saya' pada klausa (b) sama-sama berperan pasien.

Pengausatifan intransitif takergatif (berafiks) memperlihatkan perilaku S yang sama dengan argumen A (agen transitif) tampak pada klausa (3), sedangkan pengausatifan intransitif takakusatif (takberafiks) memperlihatkan S yang sama dengan P (pasien transitif) tampak pada klausa (5). Sementara itu, pengausatifan yang memperlihatkan perilaku S yang ambigu (dapat A dapat P) terlihat dari hasil pengausatifan, baik terhadap sejumlah intransitif takergatif maupun yang takakusatif.

- (5a) *Ia engsap.* 'Dia lupa.'
 (5b) *Ia engsapang tiang.* 'Dia saya lupakan.'
 (6a) *Apiné ngendih.* 'Api itu hidup.'
 (6b) *Tiang ngendihang api.* 'Saya menyalakan api.'

Pebubuhan afiks *-ang* pada predikat *engsap* 'lupa' (5a) memunculkan argumen baru *tiang* 'saya' (5b). Argumen *ia* 'dia' pada klausa transitif itu dapat berperan 'pasien' dan dapat pula berperan 'agen' atau ambigu. Argumen *ia* 'dia' berperan 'agen' bila yang dimaksud *tiang ngeranang ia ngengsapang ...*, 'saya menyebabkan dia melupakan...'. Argumen *ia* 'dia' berperan pasien bila yang dimaksud adalah *ia ané engsapang tiang* 'dia yang saya lupakan.' Pada klausa yang bermakna 'dia yang saya lupakan' argumen *tiang* 'saya' juga berperan pasien. Dengan demikian, klausa *ia ané engsapang tiang* 'dia yang saya lupakan' memiliki dua argumen dengan peran yang sama, yaitu sama-sama berperan pasien.

Hal yang sama juga tampak pada klausa (6b). Klausa itu bermakna kausatif karena argumen *tiang* 'saya' menyebabkan argumen *api* 'api' menjadi *ngendih* 'menyala'. Dalam hal itu, argumen *api* berperan pasien. Di samping itu, klausa tersebut secara sintaksis dapat diuraikan menjadi *tiang ngeranang api ngendih* 'saya membuat api menyala'. Pada klausa dengan wujud itu, argumen *api* berperan sebagai *agen* karena *api* pada klausa itu adalah argumen dari verba *ngendih* 'menyala'.

2.3.2 Interpretasi Bahasa Bali

Analisis terhadap klausa intransitif bahasa Bali memunculkan interpretasi tertentu. Interpretasi itu berkaitan dengan relasi gramatikal klausa bahasa Bali dan tipologinya berdasarkan keintransitifan.

2.3.2.1 Struktur Klausa Bahasa Bali

Bahasa Bali memiliki sejumlah struktur klausa. Struktur klausa bahasa Bali, antara lain berupa struktur intransitif, struktur transitif, dan struktur pasif. Struktur intransitif bahasa Bali tampak seperti berikut.

1. *Beli luas peteng-peteng.*
'Kakak pergi malam-malam.'
2. *Suba makelo beli ngantén.*
'Sudah lama kakak kawin.'

Struktur intransitif bahasa Bali dapat dipilah menjadi intransitif takergatif dan intransitif takakusatif. Intransitif takergatif memiliki subjek Sa dengan predikat verba berafiks, sedangkan intransitif takakusatif bahasa Bali memiliki subjek So dengan predikatnya berupa verba tekberafiks.

Struktur klausa transitif bahasa Bali dapat berupa struktur monotransitif, yakni transitif dengan dua argumen inti dan struktur bitransitif, yakni transitif dengan tiga argumen inti. Tampilannya dapat dicermati berikut ini.

3. *Méongé nyagrep bikul.*
'Kucing itu menangkap tikus.'
4. *Panakné pulesang tiang.*
'Anaknya saya tidurkan.'
5. *Tiang nyemakang I mémé nasi.*
'Saya mengambilkan ibu nasi.'
6. *I mémé alihang tiang bunga.*
'Ibu saya carikan bunga.'

Struktur transitif bahasa Bali memiliki predikat berupa verba berprefiks dan verba takberprefiks. Itu berarti transitif bahasa Bali juga dapat dibagi dua, yakni transitif dengan predikat verba berafiks dan transitif verba takberafiks. Secara semantik, peran argumen klausa itu berbeda bergantung pada predikatnya. Klausa (3), misalnya,

argumen *méongé*, 'kucing itu' berperan *agen* dari klausa yang berpredikat verba berafiks *nyagrep* 'menangkap', sedangkan argumen *panakné* 'anaknya' pada klausa (4) berperan *pasien* pada klausa yang predikatnya verba takberafiks *pulesang* 'tidurkan'.

Bahasa Bali memiliki struktur klausa yang predikatnya tidak berprefiks, yang selama ini disebut sebagai klausa pasif. Struktur klausa seperti itu terlihat seperti berikut.

7. *Jaja belina baan i adi.* 'Jajan dibeli oleh adik.'

Di samping itu, bahasa Bali juga memiliki klausa pasif yang dimarkahi dengan prefiks *ka-*. Struktur pasif yang predikatnya berprefiks *ka-* tersebut pada umumnya digunakan pada level tinggi atau *basa alus*, seperti berikut.

8. *Gusti Alit kairing antuk parekannyané.*

'Gusti Alit diiringi oleh pelayannya.'

Keadaan klausa bahasa Bali seperti itu, yakni subjek intransitifnya terpilah menjadi **Sa** dan **So**, struktur transitifnya yang terbagi dua, yakni transitif dengan predikat verba berafiks dan transitif dengan predikat verba takberafiks, serta struktur pasif yang takberprefiks dan berprefiks *ka-* merupakan dasar untuk menentukan tipologi bahasa Bali.

2.3.2.2 Tipologi Bahasa Bali

Comrie (1988b) maupun Dixon (1994) menyatakan bahwa suatu bahasa termasuk bertipe bahasa tertentu, maksudnya bertipe akusatif, ergatif, atau aktif bergantung pada perlakuan yang diterima oleh **S** bahasa tersebut.

Bahasa yang memperlakukan **S** sama dengan **A**, tetapi berbeda dari **P** atau bahasa akusatif dapat dicermati berikut. Contoh ini adalah bahasa Latin yang diambil dari Dixon (1994).

- a. *domin-us venit-t* 'tuan itu datang'
tuan datang
S
- b. *serv-us venit-t* 'budak itu datang'
budak datang
S
- c. *domin-us serv-um andi-t* 'tuan itu mendengar budak itu'
tuan budak dengar
A P
- d. *serv-us domin-um andi-t* 'budak itu mendengar tuan itu'
budak tuan dengar
A P

Bahasa tersebut di atas termasuk bahasa akusatif yang memperlakukan argumen **P**-nya berbeda, yakni memberikan penanda khusus pasien yang terlihat (c dan d), maksudnya berbeda dari penanda argumen **A** dan **S**.

Bahasa ergatif, yakni bahasa yang memperlakukan **S** sama dengan **P**, tetapi berbeda dari **A**, tampak pada contoh berikut, yakni bahasa Yalarnnga diambil dari Mallinson dan Blake (1981).

- a. *Kupi waya kunu-n ka* 'ikan itu berada di air'
ikan itu air-Lok
S
- b. *kupi-nku milna taca-mu* 'ikan itu menggigit pancing'
ikan-ERG pancing gigit-KL
A P
- c. *na-tu kupi wala-mu* 'saya membunuh ikan itu'
saya-ERG ikan bunuh-KL
A P

Argumen *kupi* 'ikan' diberi penanda ergatif ketika berperan agen, sedangkan argumen itu tidak berpenanda ketika berperan pasien. Dengan demikian, relasi pasien tidak

memiliki penanda, sama halnya dengan relasi *S* yang juga tidak berpenanda.

Bahasa aktif adalah bahasa yang memperlakukan sejumlah *S* sama dengan *A* dan sejumlah *S* lainnya sama dengan *P*. Dapat dikatakan bahwa bahasa bertipe aktif membedakan *S*-nya menjadi dua, yakni *S* yang perlakuannya sama dengan *A* dan *S* yang perlakuannya sama dengan *P*.

Bahasa Eastern Pomo secara morfologi dikatakan sebagai salah satu bahasa yang bertipe aktif. Contoh berikut merupakan data bahasa aktif dari McLendon (1978).

- a. mi:p mi:pal sa:ka 'dia membunuh dia'
dia=A dia=P bunuh
- b. mi:p kaluhuya 'dia pulang'
dia=A pulang
- c. mi:pal xa: ba:ku:ma 'dia jatuh ke air'
dia=A air jatuh

Klausa (a) memperlihatkan perbedaan antara *dia* sebagai argumen *A* dan *dia* sebagai argumen *P* melalui infleksi pada pronominalnya. Sebagai *A*, *dia* adalah *mi:p*, sedangkan sebagai *P* *dia* adalah *mi:pal*.

Di samping perilaku argumen *S*, bahasa akusatif dan bahasa ergatif memiliki ciri-ciri lain. Bahasa akusatif memiliki diatesis aktif-pasif dan bahasa ergatif memiliki diatesis ergatif-antipasif.

Pada bahasa akusatif klausa aktif disebut sebagai klausa dasar, sedangkan klausa pasif disebut sebagai klausa turunan. Secara morfologis, aktif bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan pasif. Jelasnya, pasif memiliki ciri-ciri seperti berikut.

- a. Pasif adalah klausa turunan.
- b. Subjek pasif diturunkan dari argumen pasien (O NP).
- c. Argumen agen transitif (A NP) berfungsi periferal, biasanya bermarkah kasus noninti berupa preposisi dan dapat dilesapkan.

- d. Pasif memiliki pemarkah pasif yang dapat berupa afiks. Dalam bahasa Inggris, misalnya, berupa „be...en“.

Sementara itu, klausa ergatif pada bahasa ergatif adalah klausa dasar, sedangkan klausa antipasif adalah klausa turunan. Secara morfologis, klausa ergatif bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan klausa antipasif. Antipasif memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan pasif seperti berikut.

- a. Antipasif adalah klausa turunan.
- b. Subjek antipasif diturunkan dari argumen agen (A NP) transitif.
- c. Argumen pasien (O NP) berfungsi periferal, maksudnya boleh hadir boleh tidak yang dimarkahi penanda kasus noninti berupa preposisi dan dapat dilesapkan.
- d. Antipasif memiliki pemarkah antipasif yang eksplisit (sifatnya sama dengan pemarkahan pada pasif).

Ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa yang bertipe, baik bertipe akusatif maupun bertipe ergatif tidak ada dalam bahasa Bali. Bahasa Bali tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe akusatif karena ada kriteria tertentu dari struktur pasif bahasa akusatif tidak dipenuhi oleh struktur pasif (predikat takberprefiks) bahasa Bali. Kriteria itu, antara lain bahwa argumen agen klausa transitif menjadi periferal, mendapat penanda kasus noninti berupa preposisi, dan dapat dilesapkan. Di samping itu, klausa pasif memiliki pemarkah pasif.

Bila klausa pasif (predikat takberprefiks) bahasa Bali dicermati dan disesuaikan dengan kriteria pasif bahasa akusatif, tampak bahwa argumen agen pada klausa pasif bahasa Bali tidak bisa dilesapkan. Keberadaannya solid dan untuk orang ketiga diganti dengan klitik *-a*. Jadi, sufiks *-a* yang dianggap pemarkah pasif selama ini adalah klitik yang

mengacu pada orang ketiga (Artawa, 1994). Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut.

1. a. *I mémé ngalih bunga.*
'Ibu mencari bunga.'
- b. *Bunga aliha tekén I mémé.*
'Bunga yang dicari oleh ibu.'
2. a. *Nyai ngalih bunga.* 'Kamu mencari bunga.'
- b. *Bunga alih nyai.* 'Bunga yang kamu cari.'
- *c *Bunga aliha tekén nyai.*

Klausa (1b dan 2b) disebut sebagai klausa pasif. Bentuk predikatnya lebih sederhana dibandingkan dengan predikat klausa aktifnya (berafiks *N-*). Sementara itu, sufiks *-a* yang dianggap sebagai pemarah pasif tidak bisa disebut sebagai pemarah pasif karena sufiks *-a* tersebut adalah klitika yang mengacu pada orang ketiga. Hal itu terlihat dari klausa (2) yang argumennya orang kedua, argumen itu tidak bisa dilesapkan pada bentuk pasifnya dan predikat klausa tersebut tidak bermarkah *-a*. Peristiwa itu juga terlihat pada klausa (3) berikut yang argumennya berupa orang pertama.

- 3a. *Icang ngalih bunga.* 'Saya mencari bunga.'
- b. *Bunga alih icang.* 'Bunga yang saya cari.'
- *c. *Bunga aliha tekén icang.*

Argumen agen pada klausa (3b) tidak bisa dilesapkan, tidak bisa disertai penanda kasus noninti, dan predikatnya tidak bisa dilekati sufiks *-a*. Hal itu memperjelas bahwa sufiks *-a* yang dianggap pemarah pasif selama ini adalah klitik *-a* yang mengacu pada orang ketiga. Itu berarti bahasa Bali tidak bertipe bahasa akusatif bila dilihat dari konsep diatesis aktif-pasif karena pasif bahasa Bali tidak sesuai dengan pasif bahasa akusatif.

Ciri-ciri klausa antipasif yang dimiliki oleh bahasa bertipe ergatif juga tidak bisa dipenuhi oleh struktur aktif

bahasa Bali, yakni stuktur yang lebih kompleks (bermarkah *N-*). Kriteria yang tidak dipenuhi oleh bahasa Bali adalah argumen pasien pada struktur antipasif bersifat perifer dan berpenanda kasus noninti. Argumen pasien bahasa Bali dalam struktur aktif tidak bisa dilesapkan, tidak perifer, dan tidak memiliki penanda kasus noninti. Argumen pasien bahasa Bali dalam struktur aktif justru merupakan argumen inti. Hal itu dapat dicermati pada klausa berikut.

4a. *Yéh suun tiang.*

'Air saya junjung.' (ergatif yakni struktur dasar)

b. *Tiang nyuun yéh.*

'Saya menjunjung air.' (antipasif yakni struktur turunan)

Struktur (4a) dapat disebut sebagai struktur ergatif karena predikatnya lebih sederhana dibandingkan dengan struktur (4b). Jadi sesuai dengan kriteria ergatif bahasa bertipe ergatif. Akan tetapi, struktur (4b) tidak tepat dikatakan sebagai struktur antipasifnya karena argumen *yéh* 'air' pada klausa itu tidak bersifat perifer dan juga tidak berpenanda noninti. Argumen tersebut justru merupakan argumen inti dalam klausa itu. Jadi, keadaan klausa bahasa Bali yang predikatnya lebih kompleks tidak sesuai dengan ciri-ciri antipasif dalam bahasa ergatif.

Teori tata bahasa relasional juga mengenal struktur pasif. Pasif menurut tata bahasa relasional adalah struktur turunan akibat dari pengedepanan relasi 2 (objek langsung) ke posisi relasi 1 (subjek), relasi 1 (subjek awal) didemosi ke relasi penganggur (*chomeour*), yakni relasi yang kehilangan fungsi gramatikalnya (Blake, 1990). Pasif yang dikemukakan dalam teori tata bahasa relasional pun tidak bisa menjelaskan struktur pasif takberprefiks bahasa Bali. Hal itu disebabkan argumen agen klausa pasif tidak bisa dijadikan relasi penganggur (*cho*) pada struktur pasifnya.

- 5a. *Cai nanjung bal.*
'Kamu menendang bola.'
b. *Bal tanjung cai.*
'Bola kamu tendang.'

Argumen agen *cai* 'kamu' tidak bisa didemosi ke relasi penganggur, relasi tersebut wajib hadir. Relasi tersebut tidak bisa sebagai relasi penganggur (*cho*) dalam bahasa Bali.

Sementara itu, struktur pasif bahasa Bali dengan prefiks *ka-* sesuai dengan kriteria konsep antipasif dalam bahasa Bali akusatif. Kesesuaiannya tampak dari kemampuan argumen agen menjadi periferal dan memiliki penanda kasus noninti, di samping memiliki pemarkah pasif, yakni *ka-*. Namun, pasif dengan prefiks *ka-* pada umumnya digunakan dalam bahasa Bali halus atau pada level tinggi. Hal itu tampak pada contoh berikut.

- 7a. *Titiang miragi suaran suling punika.*
'Saya mendengar suara seruling itu.'
b. *Suaran suling punika kapingagi antuk titiang.*
'Suara suling itu terdengar oleh saya.'

Klausa bitransitif pun dapat dipasifkan dengan pasif berprefiks *ka-*, seperti berikut.

- 8a. *Biang micain titiang pitutur punika.*
'Ibu memberikan saya petuah itu.'
b. *Pitutur punika kapingain antuk biang.*
'Petuah itu diberikan oleh ibu.'

Hal itu memperlihatkan bahwa bahasa Bali memiliki klausa pasif seperti bahasa yang bertipe akusatif. Namun, pemasifan itu tidak bisa digunakan secara umum.

Keadaan bahasa Bali seperti itu disertai perlakuan bahasa Bali terhadap relasi *S*, yakni sejumlah *S* sama dengan *A*, sejumlah *S* sama dengan *P*, dan sejumlah *S* bermakna

ganda (dapat **A** dan dapat **P**) yang bergantung pada predikatnya, mencerminkan bahasa yang bertipe *fluid-S*. Hal itu sesuai dengan pendapat Dixon (1994) yang menyatakan bahwa bila suatu bahasa memperlakukan sejumlah **S** sama dengan **A**, sejumlah **S** sama dengan **P**, dan sejumlah **S** dapat seperti **A** dan dapat seperti **P** disebut sebagai bahasa bertipe *Fluid-S*. Jadi, dari sudut keintransitifan, yakni secara sintaksis bahasa Bali termasuk bahasa yang bertipe *fluid-S* atau bahasa fleksibel.

4. Simpulan

Keadaan intransitif bahasa Bali yang memiliki subjek agen (**Sa**) dan subjek pasien (**So**), klausa transitif yang berprefiks dan takberprefiks, serta terdapatnya struktur pasif yang takberafiks dan berafiks *ka-* memunculkan interpretasi tertentu.

Bahasa Bali bertipe bahasa *fluid-S* karena bahasa Bali tidak bisa memenuhi kriteria bahasa akusatif dan bahasa ergatif. Di samping itu, bahasa Bali memperlakukan relasi gramatikal subjek klausa intransitif seperti ciri-ciri bahasa yang *fluid-S*, yakni sejumlah **Sa** berperilaku sama dengan argumen **A**(gen) klausa transitif berafiks, sejumlah **So** berperilaku sama dengan argumen **P**(asien) klausa transitif takberafiks, dan sejumlah **Sa** dan **So** yang ambigu dapat seperti **A** dan dapat seperti **P**.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Anom, I Gusti Ketut. 1983. *Tata Bahasa Bali*. Denpasar: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Tingkat I Bali.
- Artawa, K. 1994. "Ergativity and Balinese Syntax". Disertasi untuk La Trobe University Melbourne.
- _____. 1995. "Teori Sintaksis dan Tipologi Bahasa". *Linguistika*, edisi ketiga:45–58. Denpasar: Program Megister (S2) Linguistik Universitas Udayana.
- Bagus, I.G.N. 1978. *Satue-Satue Sane Banyol Ring Kesusastraan Bali*. Singaraja: Balai Penelitian Bahasa.
- Bawa, I Wayan, dkk. 1983. *Sintaksis Bahasa Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Blake, B.J. 1990. *Relational Grammar*. London: Routledge.
- Comrie, B. 1980. *Language Universal and Linguistic Typology*. Oxford: Basil Blackwell
- Dixon, R.M.W. 1991. *A New Approach to English Grammar, on Semantic Principle*. Oxford: Claredon Press.
- _____. 1994. *Ergativity*. Cambridge: Claredon Press.
- Haegeman, L. 1993. *An Introduction to Government and Binding Theory*. Oxford: Blackwell.
- Kana, M. 1986. "Grammatical Relation in Bahasa Indonesia". Disertasi untuk Universitas Cornell, New York.
- Mithun, Marianne. 1991. "Active/Agentive Case Marking and Its Motivations", *Language Journal of The Linguistic*

Society of America 66:221 – 250.

- Permuter, David M. 1980. "Relational Grammar". Dalam *Syntax and Semantics* Vol. 13 oleh Edith A. M. and Jessica R. (ed.):195 – 229. New York: Academic Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sulaga, I Nyoman, dkk. 1992. "Tata Bahasa Bali". Laporan Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Van Valin, R.d. 1990. Semantic Parameters of Split Intransitivity, *Language Journal of The Linguistic Society of America* Vol. 66:221 – 250.
- Warsa. 1977. *Satua Bawak Mabasa Bali*. Singaraja: Balai Penelitian Bahasa.

**MACAM-MACAM CAMPUR KODE DALAM BAHASA
INDONESIA PADA PENYULUHAN PERTANIAN DI
SUBAK TUKAD MUNGGA, SINGARAJA**

Ida Bagus Ketut Maha Indra

I. Pendahuluan

Revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini bukan hanya sekadar wacana belaka. Hal itu terbukti semakin diberdayakannya komponen-komponen yang bergerak di bidang pertanian, seperti kemudahan penyaluran pupuk, pemasaran hasil produksi pertanian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin ditingkatkannya mutu penyuluh pertanian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penyuluh pertanian merupakan jembatan penghubung antarsumber informasi (inovasi baru) antara petani dan pemerintah. Selanjutnya, di dalam usaha menginformasikan teknologi pertanian itu, para penyuluh pertanian menggunakan media bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini komunikasi dapat diartikan sebagai proses interaksi verbal antara komunikan (para petani) dan komunikator (para penyuluh) dengan ide inovatif yang akan memberikan nilai ekonomis bagi para petani.

Pemakaian bahasa yang dilakukan oleh petugas penyuluhan di Subak Tukad Mungga pada saat melakukan penyuluhan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Bali oleh komunikan dan komunikator dalam berkomunikasi. Gejala percampuran bahasa itu disebabkan penutur-penerima merupakan penutur bahasa Bali sehingga sangat memungkinkan pada saat mereka berbahasa Indonesia terselip unsur-unsur bahasa Bali dalam berkomunikasi. Komunikasi semacam itu

merupakan komunikasi yang seimbang atau selaras karena kedua pelibat, yaitu penutur-penerima berlatar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang sama sehingga setiap pembicaraan dapat berjalan lancar. Pembicaraan itu juga terkait dengan situasi dan kondisi setempat ketika tindak tutur berlangsung sehingga keduanya dapat bercampur kode. Hal semacam itu yang menjadi dasar penelitian ini. Adapun masalah yang dikaji pada tulisan ini adalah (1) berapa macamkah campur kode yang ada dalam penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga Singaraja?, (2) bagaimanakah bentuk-bentuk campur kode pemakaian bahasa Indonesia pada penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga Singaraja?

Sumber data penelitian ini adalah seluruh petani dan tenaga PPL sebagai pemakai bahasa yang ada di Subak Tukad Mungga, Singaraja. Selanjutnya, metodologi pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu metode observasi partisipatif dan metode observasi nonpartisipatif (Penalosa, 1981:321). Sesuai dengan masalah yang dikaji, teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori campur kode yang dikemukakan oleh Suwito (1985) dan Appel (dalam Arnold 1987).

2. Macam-Macam Campur Kode dalam Bahasa Indonesia pada Penyuluhan Pertanian di Subak Tukad Mungga Singaraja

2.1 Campur Kode menurut Macamnya

Berdasarkan hubungan kekerabatan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, campur kode itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu campur kode ke dalam (*inner code-mixing*), campur kode ke luar (*outer code-mixing*), dan campur kode campuran (*hybrid code mixing*). Dikaitkan dengan kajian campur kode yang terjadi pada penyuluhan pertanian di subak Tukad Mungga, Singaraja juga ditemukan

adanya ketiga gejala campur kode itu. Masing-masing gejala campur kode yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Campur Kode ke Dalam

Campur kode ke dalam (*inner code-mixing*) merupakan gejala penyisipan unsur bahasa yang masih satu rumpun antara bahasa donor dan bahasa sasaran dalam sebuah wacana tuturan. Dikaitkan dengan penelitian campur kode yang dimaksud adalah masuknya unsur bahasa Bali sebagai bahasa donor ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran pada sebuah wacana tuturan yang terjadi pada penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga, Singaraja. Masuknya unsur-unsur bahasa Bali ini ke dalam bahasa Indonesia karena sebelumnya telah terjadi kontak bahasa dalam suatu masyarakat sehingga akan terjadi saling pengaruh antara bahasa yang satu dan bahasa lainnya. Dampak dari pengaruh-mempengaruhi tersebut menimbulkan gejala campur kode. Untuk lebih jelasnya, terjadinya gejala campur kode ke dalam pada penyuluhan pertanian ini dapat disimak pada contoh wacana berikut ini.

Partisipan : Penyuluh pertanian dengan warga subak
Seting : di Balai Subak Tukad Mungga
Topik : Pengenalan sistem PTT

- (1) Dianjurkan *mangda* umur bibit di pesamaan tidak lebih dari 20 hari. Semakin muda semakin *becik*. Karena sampun diadakan penelitian bahwa bibit berumur 15 hari *sampun* bisa *ditanem*. Manfaat bibit lebih muda *punika* tanaman tumbuh dan berkembang lebih baik, akarnya lebih bagus dan kuat, mampu beradaptasi dengan lingkungan, anakan lebih banyak, menghemat benih.

Berdasarkan cuplikan wacana (1) di atas dapat dikatakan bahwa kata-kata yang merupakan penyusupan bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada kata-kata yang dicetak miring tebal, yaitu kata *mangda*, *sampun*, *ditanem*, dan *punika*. Kata-kata tersebut berekuivalen dengan 'supaya', 'sudah', 'ditanam', dan 'itu' dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa Bali yang menyisip pada penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga tersebut disebabkan oleh adanya kontak bahasa sebelumnya. Dengan kata lain, sebelum munculnya campur kode biasanya didahului dengan saling kontak antarkedua bahasa dalam suatu masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, akan terjadi saling pengaruh dari bahasa yang satu terhadap bahasa yang lain yang dampaknya dapat berwujud campur kode. Campur kode semacam itu dapat dilihat pada ketiga kata-kata bahasa Bali yang dicetak miring tebal di depan, seperti yang tampak pada kutipan wacana di depan.

Keempat unsur bahasa Bali yang masuk ke dalam bahasa Indonesia pada sebuah acara penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga ini merupakan contoh sebagian kecil gejala campur kode ke dalam. Seperti yang terlihat pada wacana di depan, yang merupakan kutipan dari suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Subak Tukad Mungga, Singaraja. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota subak dan petugas PPL. Dengan kata lain, partisipan dari peristiwa uturan itu adalah *krama* dengan petugas PPL. Dalam kegiatan tersebut tuturan terjadi dalam dua arah, yaitu dari petugas PPL dan *krama* subak. Namun, yang lebih dominan bertindak sebagai pembicara dalam kegiatan penyuluhan semacam itu adalah petugas PPL. Biasanya *krama* subak mengeluarkan pendapatnya pada kesempatan tanya jawab. Adapun bahasa Bali yang dipilih pada gejala campur kode tersebut adalah bahasa Bali ragam halus. Pemilihan ragam halus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

pendukung, yaitu situasi dan partisipan dari wacana tuturan tersebut. Selain itu, perbedaan umur petugas penyuluh dengan warga subak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan ragam bahasa Bali yang digunakan. Mengingat acara penyuluhan ini merupakan situasi resmi, walaupun dilakukan di sebuah Bale Subak, ada kecenderungan petugas penyuluh menggunakan bahasa Bali ragam halus. Untuk lebih jelasnya, dapat disimak pemakaian kata *mangda* 'supaya' pada kutipan wacana itu. Pemilihan kata *mangda* tersebut oleh petugas PPI dirasakan tepat mengingat situasi yang melatari kegiatan tersebut, yaitu situasi resmi. Di samping itu, petugas PPL memilih ragam halus karena yang bertindak sebagai partisipan, atau dalam hal ini lawan bicaranya, usianya kebanyakan lebih tua sehingga dari sudut etika berbahasa dirasakan tepat. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi bahasa Bali, khususnya penerapan unda usuk bahasa Bali, yang saat ini lebih dikenal dengan *angguh-ungguhing basa*.

Penyisipan unsur bahasa Bali lainnya yang tampak pada wacana di depan, seperti kata *sampun* 'sudah' dan *punika* 'itu', keduanya dapat dikategorikan sebagai bahasa Bali ragam halus. Alasan yang melatari pemilihan kata-kata seperti itu tidak jauh berbeda dengan pemilihan kata *mangda*. Akan tetapi, yang menarik dari keempat kata yang menyusup itu adalah pemilihan kata *ditanem* 'ditanam'. Kalau diperhatikan, bentuk kata *ditanem* secara morfologis merupakan kata jadian yang dibentuk dari prefiks (*di-*) yang digabung dengan bentuk dasar *tanem* 'tanam'. Prefiks *di-* ini bukan merupakan prefiks bahasa Bali, tetapi merupakan prefiks bahasa Indonesia, sedangkan bentuk dasar *tanem* 'tanam' merupakan kosakata bahasa Bali. Dengan demikian, kata *ditanem* tersebut merupakan penggabungan prefiks bahasa Indonesia (*di-*) dengan bentuk dasar bahasa Bali, *tanem* 'tanam'. Penggabungan bentuk kata itu lebih banyak

dipengaruhi oleh kebiasaan penutur. Dengan kata lain, petugas PPL memilih bentuk itu tidak ada hubungannya dengan faktor umur lawan bicara (partisipan) dari anggota *krama* subak, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan PPL sebagai akibat adanya kontak bahasa sebelumnya.

Kalau diperhatikan, penyisipan kosakata bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia seperti yang tampak pada wacana di depan merupakan gejala campur kode pemakaian bahasa Indonesia yang dikategorikan sebagai campur kode ke dalam (*inner code-mixing*). Disebut campur kode ke dalam karena bahasa Bali yang menyisip itu berperilaku sebagai bahasa donor atau bahasa sumber secara geografis dan wilayah politik yang sama dengan bahasa Indonesia yang berperilaku sebagai bahasa sasaran. Bahasa-bahasa yang secara geografis dan wilayah politik yang sama dapat dikatakan sebagai sebuah bahasa yang masih dalam satu kerabat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa letak geografis dan wilayah politik dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan rumpun atau wilayah kekerabatan sebuah bahasa. Namun, yang lebih penting dalam menentukan kekerabatan suatu bahasa dapat dilihat secara genetis. Dengan demikian, peristiwa campur kode yang berupa penyusupan bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia disebut gejala campur kode ke dalam (*inner code-mixing*).

Banyaknya unsur-unsur bahasa Bali yang menyisip ke dalam bahasa Indonesia, khususnya pada penyuluhan pertanian ini, tidak terlepas dari kedudukan dan fungsi bahasa Bali itu sendiri. Seperti diketahui, pemakaian bahasa Bali dewasa ini masih sangat kental digunakan dalam bidang keagamaan dan pertanian. Hal itu sesuai dengan kehidupan masyarakat Bali yang masih tergolong masyarakat agraris karena hampir sebagian besar masyarakat Bali bermata pencaharian sebagai petani.

Walaupun masih tergolong masyarakat agraris, dalam hal pengolahan pertanian dewasa ini tidak lagi diolah secara tradisional, tetapi diolah secara modern. Adanya perubahan sistem pengolahan pertanian itu mengakibatkan banyak pula istilah bahasa Bali bidang pertanian tradisional ini yang sudah mulai tidak digunakan lagi. Istilah yang tidak digunakan lagi berpeluang tidak dikenal oleh generasi berikutnya. Istilah-istilah bahasa Bali dalam bidang pertanian tradisional ini memiliki makna yang sangat spesifik. Hal itu tampak dari sulitnya menghilangkan kebiasaan penutur untuk menggantikan istilah yang ada itu ke dalam bahasa sasaran, seperti penggunaan istilah *ditanem* pada wacana di depan. Istilah pertanian tersebut merupakan unsur bahasa Bali yang menyusup ke dalam bahasa Indonesia yang digabung dengan pemakaian prefiks *di-* dalam bahasa Indonesia. Istilah *ditanem* sebenarnya mempunyai ekuivalen dengan *ditanam* dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan urian di atas, dapat dikatakan bahwa penyisipan unsur-unsur bahasa Bali seperti itu yang masih satu kerabat dengan bahasa Indonesia merupakan gejala campur kode ke dalam. Selanjutnya, akan diuraikan campur kode ke luar yang terjadi pada penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga, Singaraja.

2.1.2 Campur Kode ke Luar

Campur kode jenis ini merupakan kebalikan dari campur kode ke dalam. Campur kode ke luar di sini secara geografis antara bahasa sumber dan bahasa sasaran tersebut terletak dalam wilayah politis yang berbeda. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa penyisipan unsur bahasa satu ke bahasa lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan ini disebut dengan campur kode ke luar (*outer code-mixing*). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa yang secara geografis dan wilayah

politik yang berbeda dapat dikatakan sebagai bahasa yang kekerabatannya berbeda. Dengan demikian, penyisipan antara bahasa yang satu dan yang lain yang terletak pada wilayah geografis dan wilayah politik yang berbeda inilah yang disebut dengan gejala campur kode ke luar.

Hubungan penentu campur kode ke luar adalah keasingan antarbahasa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik secara geografis maupun genetis, misalnya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kedua bahasa tersebut jelas-jelas memiliki perbedaan secara geografis dan genetis. Antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dikatakan berbeda secara geografis karena kedua bahasa tersebut berkedudukan sebagai bahasa pengantar atau bahasa nasional di sebuah negara yang berbeda sehingga keberadaannya tidak termasuk dalam satu wilayah politis yang sama. Selanjutnya, kedua bahasa tersebut secara genetis dikatakan tidak sama karena bahasa Indonesia bukanlah varian dari Inggris dan sebaliknya.

Dikaitkan dengan kajian ini, yaitu menyisipnya unsur-unsur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dalam sebuah penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga Singaraja. Untuk lebih jelasnya tentang terjadinya gejala campur kode ke luar pada penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga, Singaraja ini dapat disimak dalam petikan wacana berikut ini. Petikan wacana berikut diambil dari sebuah pertemuan (*sangkep*) krama subak yang dilaksanakan di sebuah balai subak. Kegiatan penyuluhan ini secara berkala dilakukan minimal dua bulan sekali bergantung kebutuhan.

Seting : di Balai Subak

Partisipan : PPL dan krama subak

Topik : Penyuluhan pertanian

(2) *Bapak-bapak krama subak yang tiang hormati. Bagian-bagian dari PTT (Pengelolaan Tanaman dan sumber*

daya secara Terpadu) itu antara lain. Pada waktu musim penghujan penanaman bibit dapat dilakukan dengan sistem legowo. Kemudian untuk pemupukan stop atau kurangi menggunakan pupuk buatan dan dianjurkan untuk menggunakan pupuk organic. Sebab penggunaan pupuk buatan secara berlebihan menyebabkan tanaman padi daunnya kuning bahkan bisa dead.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa campur kode ke luar juga ditemukan pada acara penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga, Singaraja. Campur kode ke luar tersebut dapat disimak dari penyisipan unsur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi pada kegiatan penyuluhan tersebut. Dalam hal ini, yaitu menyusupnya kata *stop* dan *dead* pada kegiatan penyuluhan tersebut. Kedua kata itu merupakan leksikon Inggris yang berekuivalen dengan kata *berhenti* dan *mati* dalam bahasa Indonesia. Data di atas juga memperlihatkan bahwa gejala campur kode ke luar yang terjadi pada kegiatan penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga Singaraja ini sangat sedikit ditemukan. Dengan kata lain, penyusupan unsur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada kegiatan penyuluhan di Subak Tukad Mungga ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyusupan unsur bahasa Bali. Hal itu disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan penutur-penerima terhadap kosakata bahasa Inggris sehingga unsur-unsur yang menyisip dalam kegiatan tersebut sangat terbatas. Selain itu, kurangnya kasus campur kode ke luar ini pada kegiatan penyuluhan di Subak Tukad Mungga, mengindikasikan bahwa kurangnya kontak antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada masyarakat petani di Subak Tukad Mungga Singaraja. Meskipun sedikit unsur-unsur yang menyisip itu secara keseluruhan mendukung konteks bahasa yang disisipi, bahkan telah lepas dari bahasa

sumbernya. Hal itu dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur bahasa yang menyusup itu telah dapat memberi kesatuan makna yang utuh serta secara kontekstual ujaran yang disampaikan terhadap pendengarnya dapat dipahami dan komunikatif. Tuturan yang komunikatif akan berjalan lancar apabila penekanan komunikasi dan interaksi dari berbagai individu dengan masyarakat yang berdwibahasawan tidak terlalu ketat. Hal itu disebabkan oleh kemampuan komunikatif seseorang berbeda-beda bergantung pendidikan dan pengalamannya.

Campur kode seperti yang tampak pada kutipan wacana (2) merupakan salah satu contoh gejala campur kode ke luar. Kalau diperhatikan, distribusi kedua leksikon tersebut dalam kalimat yang terdapat pada data tersebut terlihat ada yang menempati posisi akhir kalimat dan ada pula yang menempati posisi di tengah kalimat. Kedua kata yang bercampur kode itu sudah sering terdengar di telinga para petani sehingga petani tidak terganjal memahami kedua kata tersebut. Dengan kata lain, kedua kata itu sudah tidak asing lagi di telinga para petani sehingga hampir seluruh petani sudah paham benar dengan makna atau pun arti dari kedua kata itu. Dengan demikian, adanya pemahaman petani seperti itu dapat dikatakan bahwa masyarakat petani yang ada di Subak Tukad Mungga, Singaraja ini sudah mengenal kosakata bahasa Inggris, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas.

2.1.3 Campur Kode Campuran

Pad penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga ini ditemukan adanya campur kode ke dalam dan campur kode ke luar. Penyusupan unsur-unsur bahasa sekerabat (seperti bahasa Bali) ke dalam bahasa Indonesia dikategorikan sebagai campur kode ke dalam, sedangkan penyisipan unsur-unsur bahasa yang tidak sekerabat (seperti bahasa Inggris)

dikategorikan sebagai gejala campur kode ke luar. Selain kedua gejala campur kode itu, sesuai dengan data yang ada, ditemukan pula adanya gejala campur kode campuran. Gejala campur kode campuran ini adalah campur kode yang merupakan perpaduan dari campur kode ke dalam dan campur kode ke luar. Dikaitkan dengan kajian ini dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga Singaraja ada unsur-unsur bahasa yang sekerabat dan tidak sekerabat yang menyisip secara bersamaan ke dalam tuturan bahasa Indonesia (Jendra, 1980:133). Dengan demikian, campur kode campuran (*hybrid code-mixing*) dapat diketahui dengan memperhatikan unsur-unsur serapan yang terdapat pada sebuah wacana. Unsur-unsur yang menyisip itu berasal dari unsur bahasa asing dan unsur bahasa daerah yang menyusup secara bersamaan ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai gejala campur kode campuran ini dapat dilihat data 3 berikut ini. Data ini merupakan penggalan dari sebuah wacana yang dikutip dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Subak Tukad Mungga, Singaraja yang dihadiri oleh *krama* subak berikut ini.

Seting : di Bale Subak
 Partisipan : PPL dan *krama* subak
 Topik : Sosialisasi sistem PTT (pengelolaan tanaman dan sumber daya secara terpadu)

(3) ... Untuk tahun ini kelompok tani kita akan dijadikan *pilot project* penerapan sistem PTT. Itulah sebabnya tiang sangat mengharapkan kerja samanya *mangda pilot project* dapat terlaksana sesuai harapan....

Berdasarkan kutipan data (3), tampak bahwa dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Subak Tukad Mungga, Singaraja ini ditemukan adanya penyusupan

unsur-unsur bahasa lain ke dalam pemakaian bahasa Indonesia, seperti *tiang*, *mangda*, dan *pilot project*. Kalau dicermati, unsur-unsur yang menyusup secara bersamaan ke dalam bahasa Indonesia adalah leksikon dari bahasa Bali dan bahasa Inggris. Selanjutnya, kalau disimak, distribusi penyusupan unsur-unsur itu umumnya terletak di tengah-tengah kalimat. Demikian pula, mengenai bentuk unsur-unsur yang menyusup dalam kegiatan penyuluhan tersebut belum mengalami perubahan.

Kata *mangda* 'agar' dan *tiang* 'saya' pada data (3), bentuknya belum mengalami perubahan dan masih murni dalam bentuk bahasa Bali. Adapun ragam bahasa Bali yang dipilih adalah ragam bahasa Bali halus. Pemilihan ragam halus ini disebabkan oleh beberapa faktor penentu seperti latar, topik, dan partisipan dari tuturan tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam hal ini pemilihan ragam halus ini didominasi oleh faktor partisipan atau pelibat. Hal itu sangat terkait erat dengan etika berbahasa. Demikian pula bentuk *pilot project* dapat dikatakan belum mengalami perubahan. Maksudnya, masih murni berbentuk bahasa Inggris. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur bahasa yang menyisip pada gejala campur kode campuran ini belum mengalami perubahan atau murni dalam bentuk bahasa sumber, baik itu unsur bahasa yang berasal dari bahasa yang berkerabat maupun unsur bahasa yang berasal dari bahasa yang tidak berkerabat.

Meskipun unsur-unsur bahasa sumber yang menyusup ke dalam bahasa sasaran belum mengalami perubahan atau murni dari kesatuan unsur-unsur yang menyusup itu, telah dapat memberi kesatuan makna yang utuh yang secara kontekstual ujaran yang disampaikan dapat dipahami dan komunikatif. Unsur bahasa Bali yang belum mengalami perubahan itu dapat dipahami maknanya karena leksikon-leksikon itu sudah tidak asing lagi di telinga

krama subak atau pendengarnya. Dengan kata lain, leksikon-leksikon itu sudah sering digunakan oleh *krama* subak sebagai akibat adanya kontak ke dua bahasa sebelumnya. Demikian pula dengan penyisipan leksikon bahasa Inggris dalam tuturan tersebut dapat dipahami oleh *krama* subak, mengingat pada bagian akhir dari wacana itu dijelaskan maksud ungkapan *pilot project*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyisipan secara utuh unsur bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara kontekstual telah dapat memberikan kesatuan makna utuh.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian di depan, dapat disimpulkan bahwa campur kode ke dalam (*inner code-mixing*), campur kode ke luar (*outer code-mixing*), dan campur kode campuran (*hybrid code-mixing*) masih mewarnai bahasa Indonesia pada penyuluhan pertanian di Subak Tukad Mungga, Singaraja. Hal itu bisa dimaklumi, mengingat sasaran penyuluhan adalah petani yang pemahaman bahasa Indonesiannya masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appel, Rene. 1987. "Code Switching and Code Mixing" dalam Arnold (ed). *Language Contact and Bilingualism*. Victoria: A Davidson of Hodder and Stoughton. Hal:234.
- Alwasilah, A.C. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Braight, William (ed). 1992. *A Social Psychology of Bilingualism*. New York: Rondon.
- Chaer dan Agustina. 1985. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fishman, J.A. 1976. *Advances in the Sociology of Language*. Volume I. Paris: Mouton and Co.
- _____, 1982. *Reading in the Sociology or Language*. Mouton: The Hague
- Gumpers, J.J. 1982. *Language in Social Groups*. Stanford: Stanford University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1979. *Metodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hymes, Dell. 1972. "Etnography of Speaking" dalam Gladwin dan Sturvevat (ed). *Anthropology and Human Behavior*. USA : Cambridge Press.
- _____, 1985. *Foundation in Sociolinguistics an Etnographic Approach*. Philadelphia: University Press.
- Jendra, I Wayan. 1980. *Pengantar Sosiolinguistik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Kachru, Braj. B. 1978. "Toward Structuring Code Mixing: An Indian Perspective". *International Journal of the Sociology*

- of Language*. Vol. 16. Hal:231. Paris: Mouton.
- Nababan, P.W.J. 1993. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Penalosa, F. 1981. "Introduction to The Sociology of Language". Newyork: Cambridge.
- Sudaryanto. 1980. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sumalia, I Made. 1999. "Alih Kode dan Campur Kode pada Pementasan *Arja Godogan*." Denpasar: Balai Bahasa.
- Suwadji. 1985. "Sopan Santun Berbahasa Jawa". Dalam *Widyaparwa*. No. 25 Maret 1985. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- Suwito. 1985. *Pengantar Sosiolinguistik*. Surakarta: Henarry Offset.

**WACANA RITUAL SEGEHAN SAH-SAH DAN
CAH-CAH DALAM BAHASA BALI**

I Gde Wayan Soken Bandana

1. Pendahuluan

Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap dan merupakan satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca (dalam wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana lisan), tanpa keraguan apapun. Sebagai satuan tertinggi atau terbesar, berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan wacana lainnya. Wacana itu direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Chaer, 1994: 267; Kridalaksana, 2001: 231; Santoso, 2003: 5).

Crystal, (1985: 96) menjelaskan bahwa secara formal, khususnya dalam ilmu bahasa yang dimaksud dengan wacana adalah suatu rangkaian sinambung bahasa yang lebih luas dari kalimat. Dari sudut pandang wicara sebagai satuan (unit) perilaku wacana adalah sehimpunan ujaran yang merupakan peristiwa wicara yang dapat dikenali seperti percakapan, lelucon, khotbah, dan wawancara. Sementara itu, Eriyanto (1995) menguraikan wacana sebagai komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan yang mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Menurut Duranti (1997), wacana diartikan sebagai sebuah produk dan praktik budaya yang muncul melalui suatu proses semiotik

kebudayaan.

Ritual menurut Goody (dalam Dhavamony, 2002: 175) adalah kategori adat perilaku yang dibakukan, dimana hubungan antara sarana-sarana dan tujuan bersifat irasional atau nonrasional. Termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan magi dan religius. Sementara itu, Sitanggang dkk. (2003: 649), mengartikan ritual sebagai sesuatu yang berkenaan dengan ritus.

Konsep wacana ritual dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah sebuah wacana yang berhubungan dengan kegiatan upacara religius (ritual). *Segehan sah-sah* dan *cah-cah* hanyalah sebagian kecil dari semua wujud *segehan* yang ada dalam masyarakat Hindu Bali. *Segehan sah-sah* dan *cah-cah* termasuk wacana ritual karena berhubungan dengan hal-hal yang religius yang sifatnya irasional. *Segehan sah-sah* dan *cah-cah* adalah sebuah wacana yang merupakan suatu komunikasi antara manusia dan makhluk-makhluk adikodrati/supernatural yang dikenal umat Hindu sebagai *bhuta kala*.

Segehan sah-sah dan *cah-cah* adalah sebuah wacana berbahasa Bali dalam hubungannya dengan fungsi ritual. *Segehan sah-sah* dan *cah-cah* adalah wujud kebudayaan yang merupakan hasil karya manusia dalam hubungannya dengan masalah keagamaan. *Segehan sah-sah* dan *cah-cah* sebagai sebuah wujud ritual dalam keagamaan umat Hindu di Bali baru akan bermakna kalau dideskripsikan dengan bahasa. Sebagai sebuah wacana, *segehan sah-sah* dan *cah-cah* memiliki wujud ritual, struktur linguistik, dan makna, yang digunakan dalam hubungannya dengan ritual *Butha Yadnya* 'kurban untuk *butha kala*'.

Berdasarkan uraian tersebut maka ada beberapa masalah yang dapat dikaji. Namun, dalam kesempatan ini hanya akan dibahas dua masalah. Adapun masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimanakah makna struktur linguistik wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*?
- (2) Bagaimanakah makna kontekstual wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* tersebut?

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

- (1) mendeskripsikan makna struktur linguistik wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*, dan
- (2) mendeskripsikan dan mendalami makna kontekstual wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*.

Pada tahap pengumpulan data, digunakan tiga metode, yaitu (1) metode studi pustaka, (2) metode observasi seperti yang dikemukakan Hadi (1990), dan (3) metode wawancara seperti yang dikemukakan oleh Danandjaja (1989), Labovitz dan Hagedorn (1982), dan Nawawi (1983). Dalam analisis data dilakukan beberapa langkah yaitu menelaah data, mereduksi data, dan menyusun data (Moleong, 1996: 190). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data, menerjemahkan data, dan menafsirkan makna yang ada di dalam dan di balik wacana ritual tersebut. Hasil dari analisis data disajikan dengan metode *formal* dan metode *informal* seperti yang dikemukakan oleh Sudaryanto (1982: 16).

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori linguistik antropologi seperti yang dikemukakan oleh Foley (1997), Sibarani (2004), Halliday, 1977 dalam Sutjaja (1990), dan Duranti (1997). Selain itu juga digunakan teori linguistik struktural seperti yang dikemukakan oleh Alwi dkk. (2000) dan Djajasudarma (1997).

2. Makna Wacana Ritual *Segehan Sah-Sah* dan *Cah-Cah*

Makna menurut Palmer (1976: 22) tidak semata-mata merefleksikan realitas dunia nyata, tetapi lebih menampakkan minat atau perhatian dari pemakainya. Sementara itu, Halliday (1978: 112, 123–124) mengatakan bahwa bahasa sebagai proses sosial tidak terlepas dari seperangkat makna atau teks. Makna diproduksi dan direproduksi berdasarkan kondisi sosial tertentu dan melalui pelaku dan objek-objek materi tertentu. Makna dalam hubungannya dengan subjek dan objek secara konkret tidak bisa diuraikan, kecuali berdasarkan seperangkat hubungannya dengan struktur sosial masyarakat, hubungan peran, dan perilaku.

Makna merupakan pembentuk utama kebudayaan. Kata memperoleh maknanya melalui penggunaannya dalam konteks budaya (Pausen, 1990: 2, dalam Gara, 2006: 80). Sejalan dengan itu, Cassier (1987: 63–68) menyebutkan bahwa makna berhubungan dengan kebudayaan yang di dalamnya mengandung muatan mental dan kognitif berupa prasangka, pengetahuan, pandangan, kepercayaan, norma, dan nilai. Hal itu menunjukkan bahwa makna bahasa bukan dibentuk oleh aspek linguistiknya semata, melainkan juga oleh pandangan pemakai bahasa dalam mempersepsikan dan mengabstraksikan acuannya (bdk. Foley, 1997: 19; Duranti, 2001: 9; Aminuddin, 2002: 42–44).

Makna yang dimaksud dalam tulisan ini adalah makna yang tersurat dan makna yang tersirat. Makna tersurat adalah makna yang ada atau dapat dilihat pada kamus. Makna tersurat adalah makna struktur linguistik yang terdapat dalam wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*. Makna tersirat disebut juga makna kontekstual adalah makna yang tidak terdapat dalam kamus, namun dapat ditelusuri dengan melihat konteksnya (Halliday, 1982 dalam Riana, 2003: 10).

2.1 Makna Struktur Linguistik

Makna struktur linguistik dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai makna primer, yaitu makna dari struktur teks -makna tekstual- wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*. Struktur teks adalah struktur linguistik yang terdapat pada teks mantra dan *saa* dalam wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*. Makna struktur teks dapat dilihat dari kalimat imperatif dan verbanya dalam mantra dan *saa* yang digunakan. Lebih jelasnya, perhatikan data berikut.

Data 1. Mantra Segehan Sah-Sah

*"Ong Ang Durgha Bhucari ya namah suaha,
ih Kita Durgha Bhucari,
metu Sira saking sunia,
ingsun paweh tadah,
saji ganjaran sega sasah,
iki tadah sajinira,
ngraris amuktisari,
wus Sira amuktisari,
aja angadakaken lara roga kageringan,
angadakaken urip kekaren waras,
dirghayusa ring manusa,
muah mantuk Sira ring Dang Kahyangan Sira"*
(Sudarsana, 2001: 82).

Terjemahan bebas:

*"Ya Tuhan yang dilambangkan dengan aksara Ang
yang disebut Durgha Bhucari,
wahai Engkau Durgha Bhucari,
keluarlah Engkau dari kesunyian!,
aku berikan makanan,
upah makanan berupa nasi sasah,
ini makanlah makanan-Mu,
silakan menikmati!,
setelah Engkau menikmati,*

janganlah membuat berbagai macam penyakit!,
ciptakanlah kehidupan yang tertib!,
panjang umur pada manusia,
pulanglah Engkau ke asal-Mu!

Data 2. Mantra Segehan Sasah Brumbun

*"Sa, Ba, Ta, A, I,
Panca Maha Bhutaya namah suaha,
ih Sira Dhurga Bhucari,
metu Kita saking madya,
iki insun pawéh sira tadah saji ganjaran,
maka sega sasah brumbun,
iki tadah sajinira,
wus anadah saji,
aja Sira angadakaken lara roga,
kageringan ring jagaté,
angadakaken Sira urip waras dirghayusa,
ngraris Sira amuktisari,
sumurup Sira ring Bhetari Dhurga,
Ang Ah mertha bhutaya namah suaha"*
(Sudarsana, 2001: 95)

Terjemahan bebas:

'Sa, Ba, Ta, A, I,
yang dikenal dengan *Panca Maha Bhuta,*
wahai Engkau *Durga Bucari,*
keluarlah Engkau dari tengah!,
aku berikan Engkau upah makanan,
berwujud nasi berwarna *brumbun,*
nikmatilah makananmu!,
selesai menikmati,
janganlah Engkau membuat berbagai penyakit!,
kesengsaraan di dunia,
ciptakanlah kehidupan yang wajar dan umur panjang!,

silakan menikmati,
kembalilah Engkau ke *Dewi Durga!*,
ya Tuhan yang disimbolkan dengan *aksara Ang Ah*
anugerahkanlah
berkah-Mu melalui wujud para *bhuta'*.

Data 3. Saa Segehan Cah-Cah

*"Singgih Ratu Sang Bhuta Raja, Kala Raja, Yaksa Raja,
Sang Bhuta Bala, Kala Bala, Yaksa Bala,
puniki titiyang ngaturang segehan nasi cah-cah,
mangda lédang ngwehin para ancangan, bala, wadwa druwéné,
risampun pada amukti saji,
mangda lédang ngamijilang kesidian,
titiyang sekeluarga nunas kerahayuan,
antuk kekuranganipun titiyang nunas pangampura."*

Terjemahan bebas:

'Hormat kepada raja para *Bhuta, Kala, dan Yaksa,*
pengikut para *bhuta, kala, dan yaksa,*
ini hamba persembahkan *segehan nasi cah-cah,*
sudilah Engkau memberikan para pengikut-Mu!,
setelah semua menikmati,
sudilah Engkau memberikan anugerah!,
hamba sekeluarga mohon keselamatan,
atas kekurangannya hamba mohon maaf'.

Berdasarkan strukturnya wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* memiliki lima makna, yaitu 1) makna perintah, 2) makna permohonan, 3) makna penghormatan, dan 4) makna larangan.

2.1.1 Makna Perintah

Makna perintah dalam wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* tercermin pada verba yang digunakan dalam

kalimat imperatif halus dan imperatif transitif. Perhatikan contoh data berikut.

- (1) 1/3 metu Sira *saking sunia*.
'**keluarlah** Engkau dari kesunyian.'
- (2) 1/6 iki tadah *sajinira*.
'**ini makanlah** makanan-Mu.'
- (3) 1/7 *ngraris amuktisari*.
'**silakan** menikmati.'
- (4) 1/9 *aja angadakaken lara roga kageringan*.
'**janganlah** membuat berbagai macam penyakit!'
- (5) 1/10 *angadakaken urip kekaren waras*.
'**ciptakanlah** kehidupan yang tertib!'
- (6) 1/12 *muah mantuk Sira ring Dang Kahyangan Sira*.
'dan **pulanglah** Engkau ke asal-Mu'.

Kalimat pada contoh di atas adalah kalimat yang berisi perintah dari pembicara yang dalam hal ini adalah pengucap mantra kepada lawan bicara (*bhuta kala*) agar berbuat sesuatu. Kalimat pada contoh 3 tergolong perintah halus yang ditandai dengan kata *silakan*, sedangkan pada contoh kalimat yang lainnya adalah perintah biasa. Akhiran (-lah) pada verba tersebut mengakibatkan makna perintah menjadi lebih lunak. Makna juga dapat dilihat pada data 2 dan 3. Pada data 2, makna perintah itu tercermin pada kalimat 4, 7, 9, 11, 12, dan 13. Pada data 3, makna tersebut tercermin dalam kalimat 4 dan 6 yang ditandai dengan pemakaian kata *sudilah* sebagai cermin makna perintah halus.

2.1.2 Makna Permohonan

Kalimat imperatif permohonan sering juga disebut sebagai kalimat imperatif perizinan. Makna permohonan dalam kalimat imperatif jenis itu terlihat pada pemakaian kata *mohon*. Dalam data wacana ritual *segehan cah-cah* ditemukan kalimat imperatif yang bermakna permohonan

yang ditandai dengan kata *nunas* yang juga bermakna 'mohon'.

(7) 3/7 *titiyang sekeluarga nunas kerahayuan.*

'hamba sekeluarga **mohon** keselamatan.'

(8) 3/8 *antuk kekuranganipun titiyang nunas pangampura.*

'atas kekurangannya hamba **mohon** maaf.'

Pada contoh 7 dan 8 dapat diketahui bahwa kalimat tersebut mengandung makna permohonan. Hal itu terlihat pada pemakaian kata "mohon" dalam kedua kalimatnya. Makna itu diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu "mohon" dan "memohonkan".

2.1.3 Makna Penghormatan

Makna penghormatan dalam wacana tersebut di atas tidak eksplisit dalam data. Makna tersebut terbungkus dalam ungkapan, seperti "Ya Tuhan yang disimbolkan dengan aksara Ah", yang terdapat di awal dan akhir data. Makna penghormatan dalam wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*, secara umum juga tercermin pada pemakaian kosakata bahasa halus atau bentuk hormat. Lebih jelas tentang makna penghormatan dalam wacana ritual tersebut, dapat dilihat pada contoh data berikut.

(9) 1/1 *"Ong Ang Durgha Bhucari ya namah suaha.*

'Ya Tuhan yang dilambangkan dengan aksara Ang yang disebut *Durgha Bhucari*.'

(10) 2/14 *Ang Ah mertha bhutaya namah suaha.*

'ya Tuhan yang disimbolkan dengan aksara Ang Ah **anugerahkanlah** berkah-Mu melalui wujud para *bhuta*.'

(11) 3/1 *Singgih Ratu Sang Bhuta Raja, Kala Raja, Yaksa Raja,*

'**Hormat** kepada raja para *Bhuta, Kala, dan Yaksa*.'

Makna penghormatan dalam wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* yang terdapat pada contoh 9 tercermin dalam kalimat "Ya Tuhan yang dilambangkan dengan aksara Ang yang disebut Durgha Bhucari". Secara keseluruhan, kalimat tersebut mengimplisitkan makna penghormatan, yaitu rasa hormat si pengucap mantra kepada Tuhannya. Pada contoh kalimat 10, makna penghormatan itu tercermin dalam pemakaian kata "anugerahkanlah". Secara logika dapat dilihat bahwa kata itu hanya digunakan oleh yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Berbeda halnya dengan kedua contoh tersebut, pada kalimat 11- data 3 baris pertama – makna penghormatan itu tampak jelas pada pemakaian kata *singgih* yang berarti 'hormat'.

2.1.4 Makna Larangan

Kalimat imperatif yang menggunakan kata *jangan* disebut kalimat imperatif yang berklasifikasi perintah negatif. Kalimat imperatif klasifikasi perintah negatif adalah kalimat imperatif yang mengandung makna perintah negatif kepada lawan bicara supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dinyatakan oleh predikatnya (Mulyani dkk., 2004: 97). Dalam data wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* ditemukan kalimat imperatif yang mengandung makna larangan yang ditandai dengan kata *aja* yang merupakan kosakata bahasa Jawa Kuna yang berarti 'jangan'. Berikut adalah contoh datanya.

(12) 1/9 dan 2/9 *aja angadakaken lara roga kageringan.*

janganlah membuat berbagai macam penyakit!

2.2 Makna Kontekstual

2.2.1 *Segehan Sah-Sah*

Kata *sah-sah* adalah bentuk ulang dalam bahasa Bali yang berasal dari kata *asah* yang berarti 'rata'. Kata *sah-sah* itu sendiri berarti 'dibuat rata'. *Segehan sah-sah* adalah

sebuah wujud ritual *segehan* yang nasinya ditaruh begitu saja atau terurai; tanpa warna; beralaskan daun *telujungan* 'pucuk daun pisang'; dengan lauk *jejeron matah* 'jeroan mentah', *uyah* 'garam', *bawang* 'bawang merah', dan *jahé* 'jahe'. Berikut adalah wujud ritualnya.

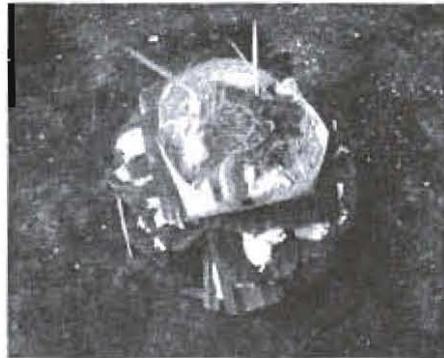


Segehan sah-sah adalah sebuah wujud ritual yang biasanya dipersembahkan kepada para makhluk-makhluk halus seperti *wong samar*, *deté*, *tonya*, dan sebagainya. Secara implisit dalam *Ajaran Kandapatsari* dijelaskan bahwa *segehan sah-sah* digunakan sebagai persembahan kepada makhluk halus yang berada di bawah kekuasaan *I Ratu Gedé Mecaling* yang bersthana di *Pura Dalem Nusa* dan *Dalem Ped*. Pada saat-saat tertentu, *segehan sah-sah* bersama-sama dengan wujud ritual *segehan* yang lain, yang dipersembahkan di setiap pojok pekarangan rumah, juga digunakan sebagai lambang persembahan kepada *bhuta kala* yang berfungsi sebagai penjaga perbatasan yang disebut sebagai *Sang Bhuta Pemali Wates*.

2.2.2 *Segehan Cah-Cahan*

Segehan cah-cahan adalah sajen *segehan* yang beralaskan *taledan* yang berisi beras, benang putih, uang, *base tampél*, dan *bijaratus* (Kamiartha, 1992: 58). *Segehan cah-cah* atau *cah-cahan* dalam tulisan ini adalah sebuah wujud

ritual *segehan* dengan nasi berwarna putih, yang dibentuk kecil-kecil seperti di-*cah-cah* 'direcah' dan ditaruh di atas *tamas* 'alas daun kelapa yang dibentuk menyerupai piring'. Kata *cah-cahan* adalah kosakata bahasa Bali yang berarti 'recahan'. Wujud ritual *segehan* tersebut bersama-sama dengan wujud ritual lainnya, umumnya dipersembahkan untuk ritual *bhuta yadnya* 'persembahan kepada *bhuta kala*' yang sederhana seperti pada saat *kliwon*, *purnama*, dan *tilem* (Pemprov. Bali, 2005: 115). Berikut adalah wujud ritualnya.



Segehan cah-cahan yang utuh seharusnya terdiri atas atau berjumlah 133 buah. Namun, ada kalanya dibuat 108, 66, 33, dan 11 buah. Angka-angka tersebut mengandung makna sebagai berikut. Angka 133 menggambarkan bahwa *segehan* itu ditujukan kepada *bhuta kala* yang seluruhnya berjumlah 133. Dalam ajaran *kandapatsari* dijelaskan bahwa ada 133 *bhuta kala* yang dikenal dalam ajaran Hindu. Dikenal dalam hal ini mengandung makna 'diketahui nama, tugas, dan fungsinya'.

Menurut lontar *Sundari Siksa*, ada 1800 *bhuta kala* di alam ini. Berikut adalah kutipannya.

"pawilangan kala haneng bhuwana kwéhnya siyu domas, yan maring umah séket pat-pat, lwirnya maring purwa pañca tang kala, ring gnéyan kutus tang kala, ring daksina siya, ring néritya tatiga, pascima pitu, ring wayabya siki, ring utara pat-pat, ring érsanya nem-nem, ring madya kutus, ring lawanging pamesuan siki, ring kiwa tengening pamesuan sama satunggal, pasamodhayanya séket pat-pat..."

Terjemahan:

'Menurut perhitungan *bhuta kala* di dunia ini berjumlah 1800, kalau di lingkungan rumah 54, yaitu di Timur berjumlah lima, di Tenggara delapan, di Selatan sembilan, di Barat tujuh, di Barat Daya tiga, di Barat Laut satu, di Utara empat, di Timur Laut enam, di Tengah delapan, di pintu masuk pekarangan satu, di kiri kanan pintu masuk pekarangan rumah sama juga berjumlah satu, seluruhnya adalah lima puluh empat...'

Segehan cah-cah yang berjumlah 133 kadangkala dibuat berbeda sesuai dengan keperluan. Jumlah 133 itu bisa menjadi 108, 66, 33, dan 11. Hal itu disebabkan karena sudah ada wujud *segehan* yang lain sebagai penggantinya, misalnya *segehan agung, pulangan, wong-wongan, sah-sah*, dan sebagainya. Makin kecil jumlah *segehan cah-cah* itu disebabkan oleh makin banyak ada *segehan* lain yang dianggap telah melengkapi jumlah tersebut.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian pada 2 dapat disimpulkan bahwa makna dalam wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu 1) makna struktur linguistik dan 2) makna kontekstual. Makna

struktur linguistik adalah makna yang tercermin dalam mantra wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah*. Makna itu dibedakan menjadi empat, yaitu 1) makna perintah, 2) makna permohonan, 3) makna penghormatan, dan 4) makna larangan. Makna perintah ditandai dengan verba transitif dan akhiran (-lah). Makna permohonan ditandai dengan kata *mohon*. Makna penghormatan tercermin pada pemakaian kata *singgih* dan ungkapan yang mengandung makna penghormatan. Sedangkan makna larangan ditandai dengan pemakaian kata *aja* 'jangan'.

Makna kontekstual wacana ritual *segehan sah-sah* dan *cah-cah* adalah makna yang terdapat di balik wacana tersebut. *Segehan sah-sah* dan *cah-cah* adalah sebagian kecil dari wujud ritual *segehan* dalam kehidupan beragama umat Hindu di Bali yang ditujukan kepada Tuhan atau perwujudan Tuhan sebagai *Bhutakala* dengan tujuan keselamatan bagi pelaksananya. *Segehan sah-sah* adalah wujud ritual yang mengandung makna bahwa pelaksananya ingin memperoleh keselamatan atau tidak mendapat gangguan dari para *bhutakala* atau makhluk halus *ancangan*, *bala*, dan *wadwa-Nya I Ratu Gede Mecaling* yang dikenal dengan *wong samar*, *memedi*, *dete*, *tonya*, dan sebagainya. Sedangkan *segehan cah-cah* secara kontekstual mengandung makna persembahan kepada seluruh *bhutakala* yang berjumlah 133. Ritual tersebut umumnya dilaksanakan bersama-sama dengan wujud ritual *segehan* yang lainnya untuk memperoleh ketenteraman dan keserasian di dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, dkk. 2002. *Analisis Teks dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Alwi, Hasan, et al. 2000. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crystal, D. 1985. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics ed. Ke-2*. Oxford Basil, Blackwell, London: Andre Deutch.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1997. *Analisis Bahasa Sintaksis dan Semantik*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Duranti, Alessandro. 1997. *Linguistik Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. (ed.). 2001. *Linguistic Anthropology: A Reader*. USA: Blackwell Publishers.
- Eriyanto. 1995. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: Lkis.
- Foley, William A. 1997. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Oxford: Blackwell Published.
- Gara, I Wayan. 2006. "Wacana Samodana Usaba Sambah pada Masyarakat Tengenan Pegringsingan: sebuah Kajian Linguistik Kebudayaan". Denpasar: Program Doktor, Program Studi Linguistik Unud.
- Hadi, S. 1990. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language and Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Halliday dan Ruqaiya Hasan. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Labovitz, Sanford dan Robert Hagedorn. 1982. *Metode Riset Sosial: Suatu Pengantar*. Jakarta Pusat: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyani, Yeni Supriatin dkk. 2004. *Struktur dan Pemarkah Kalimat Imperatif Sajak-sajak Keagamaan Tahun 1930-an*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Palmer, F.R. 1976. *Semantics: A New Out Line*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pemprov. Bali. 2005. *Wariga Dewasa*. Denpasar: Pemprov.Bali.
- Riana, I Ketut. 2003. "Linguistik Budaya: Kedudukan dan Ranah Pengkajiannya". Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Linguistik Budaya pada Faksas Unud. Denpasar: Universitas Udayana.
- Santoso, Riyadi. 2003. *Semiotika Sosial: Pandangan Terhadap Bahasa*. Surabaya: Pustaka Eurika dan JP Press.
- Sibarani, Robert. 2004. *Antropolinguistik: Antropologi Lingusitik, Linguistik Antropologi*. Medan: Poda.
- Sudaryanto. 1982. *Metode Linguistik, Kedudukan, Aneka Jenisnya, dan Faktor Penentu Wujudnya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.
- Sutjaja, I Gusti Made. 1990. *Perkembangan Teori M.A.K. Halliday* (dalam Bambang K.S. (peny.). 1990. PELLBA 3. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.

KATEGORISASI HOMONIM DALAM BAHASA BALI

Ni Wayan Sudiati

1. Pendahuluan

Leech (1975:228) mengatakan, homonim adalah sejumlah satuan bahasa yang bentuknya sama, tetapi memiliki makna yang berbeda-beda. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, homonim diberi pengertian sebagai satuan bahasa yang bentuknya sama, tetapi maknanya berbeda-beda didaftar sebagai entri-entri yang berbeda. Verhaar (1981:135) mengatakan homonim itu mencakupi satuan bahasa yang memiliki bentuk yang sama tulisan atau ucapannya dengan makna yang berbeda-beda, sedangkan Sitindoan (1984:132) mengatakan bahwa homonim adalah kata-kata yang bentuknya identik, tetapi mengandung dua atau lebih makna yang berlainan. Kata-kata yang bersifat homonim tidak ada hubungan makna satu sama lain.

Masalah homonim merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kata yang berhomonim dalam bahasa Bali. Hal itu dapat dilihat pada contoh kalimat di bawah ini.

- (1) *Anak cerik ento kereng ngeling.*
'Anak **kecil** itu suka menagis.'
- (2) *Mémé meli cerik di peken.*
'Ibu membeli **selendang** di pasar.'

Jika diamati secara saksama, kalimat (1)–(2) mempunyai sebuah unsur yang bentuknya sama, tetapi berbeda maknanya, yakni *cerik*. *Cerik* dalam kalimat *Anak cerik ento kereng ngeling* mempunyai makna 'kecil', sedangkan *cerik* pada kalimat *Mémé meli cerik di peken* mempunyai makna

'selendang'. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa di dalam bahasa Bali ada dua kata *cerik* yang masing-masing mempunyai makna yang sangat berbeda, yakni *cerik I* 'kecil' dan *cerik II* 'selendang'. Hubungan antara *cerik I* dan *cerik II* disebut homonim.

Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana bentuk homonim dalam bahasa Bali? (2) Bagaimana kategorisasi homonim dalam bahasa Bali?

Secara umum tulisan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang homonim dalam bahasa Bali. Di samping itu, tulisan ini secara khusus membahas kedua permasalahan seperti telah disebutkan di atas.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak dan dalam pelaksanaannya dibantu dengan teknik catat, yaitu mencatat semua data yang ditemukan dari sampel penelitian yang telah ditetapkan. Dalam analisis data dipakai metode distribusional (Sudaryanto, 1982: 13). Di dalam tahapan penyajian hasil analisis digunakan metode formal dan informal (Sudaryanto, 1982: 16).

2. Bentuk dan Kategorisasi Homonim dalam Bahasa Bali

2.1 Homonim Dilihat dari Segi Bentuk

Homonim dalam bahasa Bali, dilihat dari segi bentuknya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) homonim bentuk kata dasar dan (2) homonim berbentuk kata turunan. Sebelum membicarakan bentuk-bentuk homonim, akan dibicarakan pengertian kata dasar dan kata turunan.

Ramlan (1983: 43) mengatakan kata dasar adalah kata tunggal yang menjadi dasar bentukan bagi bentuk kata yang lebih besar. Di dalam bahasa Bali, *labuhang* 'jatuhkan' terbentuk dari kata dasar *labuh* 'jatuh' kata dasar ini merupakan satu morfem. Oleh karena itu, kata dasar *labuh*

termasuk kata dasar tunggal. Jadi, kata dasar selalu berupa kata tunggal. Kata turunan adalah kata yang diturunkan dari suatu bentuk dasar melalui proses pembubuhan afiks, perulangan, dan pemajemukan. Misalnya, kata turunan *labuhang* 'jatuhkan' diturunkan dari bentuk dasar *labuh* 'jatuh' melalui proses pembubuhan sufiks /-an/. Kata turunan *nglabuhang* 'menjatuhkan' diturunkan dari bentuk dasar *labuhang* 'jatuhkan' melalui proses pembubuhan prefiks /N-/. Kata turunan terdiri atas dua morfem atau lebih. Oleh karena itu, kata turunan termasuk kata kompleks.

2.1.1 Homonim Tunggal Berbentuk Kata Dasar

Homonim berbentuk kata dasar banyak ditemukan di dalam bahasa Bali. Beberapa di antaranya dicontohkan di bawah ini.

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (a) <i>bales</i> , | <i>bales I</i> 'lebat' |
| | <i>bales II</i> 'balas' |
| (b) <i>dedeh</i> , | <i>dedeh I</i> 'halau' |
| <i>dedeh</i> | <i>dedeh II</i> 'berawan' |
| (c) <i>pedih</i> , | <i>pedih I</i> 'perih' |
| | <i>pedih II</i> 'marah' |

Untuk membuktikan bahwa kata-kata di atas adalah homonim, dapat dilihat pemakaiannya pada kalimat berikut.

- (3) *Ujan bales ibi sanja.*
'Hujan **lebat** kemarin sore.'
- (4) *Bales surat timpalé ané uling Jakarta.*
'**Balas** surat teman yang dari Jakarta.'
- (5) *Dedeh sampiné aba ka uma.*
'**Halau** sapi itu bawa ke sawah.'
- (6) *Langité dedeh uling ibi semengan.*
'Langit itu **berawan** sejak kemarin pagi.'
- (7) *Paningalané pedih kena tabia.*
'Matanya **perih** kena cabai.'

- (8) *Pedih basangé ningehang munyiné buka kéto.*
'**Marah** mendengar kata-katanya seperti itu.'

Berdasarkan contoh kalimat (3)-(8) terbukti bahwa kata *bales* (3)-(4), *dedeh* (5)-(6), dan *pedih* (7)-(8) memiliki makna yang berbeda dan tidak memiliki hubungan makna. Dengan demikian, kata-kata itu adalah kata-kata yang dilihat dari segi bentuknya berupa kata dasar.

2.1.2 Homonim Berbentuk Kata Turunan

Di dalam bahasa Bali ditemukan homonim berbentuk kata turunan seperti terlihat di bawah ini.

- (a) *ngamesang*, *ngamesang* I 'mencelupkan'
ngamesang II 'bertambah lahap'
(b) *ngulak-ulak*, *ngulak-ulak* I 'berdagang secara tengkulak.'
ngulak-ulak II 'menggulung benang dengan *ulakan*'
(c) *bulan kepangan*, *bulan kepangan* I 'gerhana bulan'
bulan kepangan II 'berwajah ceria/cerah'

Contoh kalimat berikut membuktikan kata-kata di atas adalah kata-kata yang homonim.

- (9) *Sarni ngamesang kamen batik.*
'Sarni **mencelupkan** kain batik.'
(10) *Bapa ngamesang gati madaar.*
'Bapak **bertambah lahap** makan.'
(11) *Mémé ngulak-ulak ka peken.*
'Ibu **berdagang secara tengkulak** ke pasar.'
(12) *Ia ngulak-ulak sambilanga magending.*
'Ia **menggulung benang dengan ulakan** sambil bernyanyi.'
(13) *Tanggal pitu bulan solas wénten bulan kepangan.*
'Tanggal tujuh bulan sebelas ada **gerhana bulan**.'
(14) *Nguda adi kéto cara bulan kepangan?*
'Mengapa adik **berwajah cerah/ceria?**'

Berdasarkan data di atas, kata-kata homonim berbentuk kata turunan ada yang berafiks (contoh kalimat 9), kata ulang (contoh kalimat 11), dan kata majemuk (contoh kalimat 13).

Kata homonim *ngamesang* (9) adalah kata berafiks yang terbentuk dari bentuk dasar *ames*. Kata *ngulak-ulak* (11) adalah homonim yang dibentuk dengan perulangan, sekaligus afiksasi, yaitu dengan mengulang bentuk dasar *ulak*. Adapun kata *bulan kepangan* (13) adalah homonim majemuk yang terjadi dari penggabungan bentuk dasar *bulan* 'bulan' dan *kepangan* 'gerhana'.

2.2 Homonim Berdasarkan Kategori Katanya

Menurut Kridalaksana (1992:22), konsep kategori kata atau kelas kata hanya diberikan kepada satuan sintaksis, yaitu kata. Senada dengan itu, Alwi (1993:36) menyatakan bahwa kata termasuk dalam kategori sintaksis dan kategori sintaksis itu sering juga disebut kategori atau kelas kata. Dengan kata lain, kategori hanya dapat diberikan pada tingkat kata, sedangkan untuk morfem dan leksem tidak (Kridalaksana, 1992:22).

Bahasa Indonesia mengenal empat kategori sintaksis utama, yaitu (1) verba (kata kerja), (2) nomina (kata benda), (3) Adjektiva (kata sifat), dan (4) adverbial. Selain empat kategori itu, dalam bahasa Indonesia dikenal pula satu kelompok lain yang disebut kata tugas. Yang termasuk dalam kelompok kata tugas itu adalah preposisi (kata depan), konjungtor (kata sambung), dan partikel (Alwi dkk., 1993:37); bdk. Kridalaksana, 1992:23).

Pada umumnya kata masuk dalam kategori sintaksis tertentu dan tidak sekaligus masuk kategori yang lain. Misalnya, dalam bahasa Bali kata-kata seperti *siap* 'ayam', *lumbur* 'gelas', dan *biu* 'pisang' termasuk kategori nomina. Namun, ada juga nomina yang memiliki kategori ganda.

Dalam bahasa Bali, misalnya, kata *gunting* 'gunting' termasuk kategori nomina, misalnya dalam *gunting ento* 'gunting itu' sekaligus termasuk kategori verba, misalnya dalam *gunting kertasé* 'gunting kertas itu'.

Pembagian kategori kata yang diacu dalam tulisan ini mengikuti model Alwi dkk. (1993:37). Di dalam tulisan ini dibahas (1) homonim verba, (2) homonim nomina, dan (3) homonim adjektiva. Ketiga jenis homonim ini diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Homonim Verba

Ciri-ciri verba dapat diketahui dengan mengamati (a) perilaku semantis, (b) perilaku sintaksis, (c) bentuk morfologisnya. Secara umum, verba dapat diidentifikasi dan dibedakan dari kelas kata yang lain, terutama dari adjektiva. Ciri-ciri verba dapat diuraikan sebagai berikut.

- (a) Verba berfungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat dalam tataran klausa atau kalimat. Misalnya, *kayeh* 'mandi' dalam *Mémé kayeh di tukadé* 'Ibu mandi di sungai' adalah predikat, dan sebagai inti predikat dalam *tondén kayeh* 'belum mandi'. Dalam tataran frase, verba dapat diperluas ke kiri, antara lain dengan *énggalang*, *becatang*, *gangsarang* 'cepatkan', *tondén* 'belum', *tusing*, *sing* 'tidak', dan *lakar* 'akan' sehingga diperoleh bentuk-bentuk seperti *énggalang/becatang*, *gangsarang kayeh* 'cepatkan mandi', *tondén kayeh* 'belum mandi', *tusing/sing kayeh* 'tidak mandi', dan *lakar kayeh* 'akan mandi'.
- (b) Secara morfologis, verba bahasa Bali berciri *N-* (*ngabut* 'mencabut'), *ma-* (*mabatis* 'berkaki'), *ka-* (*kajagur* 'dipukul'), *-in* (*tanemin* 'tanami'), *-ang* (*bawakang* 'pendekkan').
- (c) Verba bahasa Bali secara semantis dibedakan menjadi verba perbuatan (tindakan), verba proses, dan

verba keadaan. Uraian tentang ciri-ciri verba di atas, khususnya ciri morfologis, menyiratkan bahwa verba berdasarkan bentuknya dapat dibedakan atas (a) verba asal dan (b) verba turunan. Secara semantis verba dapat dibedakan atas (a) verba perbuatan, (b) verba proses, dan (c) verba keadaan.

Di dalam tulisan ini, homonim verba juga dibicarakan berdasarkan pembagian di atas sehingga ditemukan (a) homonim verba asal, (b) homonim verba turunan, (c) homonim verba perbuatan, (d) homonim verba proses, dan (e) homonim verba keadaan. Perbedaan masing-masing homonim itu dapat dilihat pada sajian berikut.

2.2.1.1 Homonim Verba Asal

Verba asal adalah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks (Alwi dkk., 1993:107). Di dalam bahasa Bali ditemukan beberapa kata homonim verba asal, sebagai berikut.

- | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|
| (a) <i>desdes</i> , | <i>desdes</i> I | 'usut terus-menerus' |
| | <i>desdes</i> II | 'kenai bertubi-tubi' |
| (b) <i>tedun</i> , | <i>tedun</i> I | 'turun' |
| | <i>tedun</i> II | 'salin' |

Kata-kata di atas bermakna homonim terbukti dengan kalimat-kalimat berikut ini.

- (15) *Desdes takonin apang nyak ia ngaku.*
'Usut terus-menerus supaya dia mau mengaku.'
- (16) *Malingé desdes aji batu apang kanti mati.*
'Pencuri itu kenai bertubi-tubi dengan batu sampai mati.'
- (17) *Ida sampun tedun saking palinggihan.*
Beliau sudah turun dari tempat duduk.'
- (18) *Tedun lontaré ento!*
'Salin lontar itu!'

Kalimat (15) – (16) di atas membuktikan bahwa kata-kata seperti *desdes* dan *tedun* adalah kata-kata homonim. Kata-kata homonim itu termasuk kategori verba karena tidak dibentuk melalui afiksasi, perulangan, atau pemajemukan. Kata-kata homonim dalam kalimat (15) –(16) termasuk verba asal.

2.2.1.2 Homonim Verba Turunan

Verba turunan adalah verba yang telah mengalami afiksasi, perulangan, dan pemajemukan, atau paduan dua leksem menurut Kridalaksana (1992:49). Di dalam bahasa Bali ditemukan pula kata-kata homonim yang berupa verba turunan. Kata-kata homonim itu adalah sebagai berikut.

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| (a) <i>nyanguak,</i> | <i>nyanguak</i> I | 'menangkap' |
| | <i>nyanguak</i> II | 'memotong
pembicaraan' |
| (b) <i>masalah,</i> | <i>masolah</i> I | 'berkelakuan' |
| | <i>masolah</i> II | 'menari' |
| (c) <i>uek-uek,</i> | <i>uék-uék</i> I | 'robek-robek' |
| | <i>uék-uék</i> II | 'muntah-muntah' |

Contoh kalimat berikut membuktikan bahwa verba turunan di atas adalah homonim.

- (19) *Ia nyanguak bal ané kasépak baan timpalné.*
'Ia **menangkap** bola yang ditendang oleh temannya.'
- (20) *Tusing dadi nyanguak reraosan anak tua.*
'Tidak boleh **memotong pembicaraan** orang tua.'
- (21) *Anaké ané masolah becik patut tulad.*
'Orang yang **berkelakuan** baik patut ditiru.'
- (22) *Ida masolah ring RRI.*
'Beliau **menari** di RRI.'
- (23) *Eda uék-uék bajune ento?*
'Jangan **robek-robek** baju itu?'

- (24) *Uling semengan ia suba uék-uék krana ngidam.*
 'Dari pagi ia sudah **muntah-muntah** karena ngidam.'

Kalimat (19)–(23) di atas adalah homonim yang berupa verba turunan. Verba turunan di dalam kalimat: (19) dan (21) dibentuk melalui proses afiksasi, sedangkan dalam kalimat (23) dibentuk melalui proses perulangan. Homonim verba *nyanguak* (19) dan *masolah* (21) berasal dari bentuk asal *janguak* I 'tangkap' dan *janguak* II 'potong', *solah* I 'kekuatan' dan *solah* II 'prakatagori'. Afiksasi yang terjadi pada bentuk-bentuk asal tersebut adalah sebagai berikut.

N- + *janguak* -----> *nyanguak*

ma- + *solah* -----> *masolah*

Homonim verba turunan yang terbentuk dari proses perulangan terlihat pada contoh kalimat (23), yaitu *uék-uék*. Verba turunan *uék-uék* berasal dari bentuk dasar *uék*, mengalami perulangan penuh.

2.2.1.3 Homonim Verba Perbuatan

Alwi dkk. (1993:4) mengatakan bahwa verba perbuatan adalah verba yang mengandung makna inheren perbuatan. Verba jenis ini biasanya dapat menjadi jawaban atas pertanyaan, "Apa yang dilakukan oleh subjek?" Di samping itu, verba perbuatan dapat dipakai dalam kalimat perintah. Dengan demikian, jika sebuah verba dapat menjadi jawaban atas pertanyaan, "Apa yang dilakukan oleh subjek?" dapat digunakan dalam kalimat perintah dan memiliki makna lebih dari satu.

Di dalam bahasa Bali ditemukan sejumlah homonim verba perbuatan sebagai berikut.

- (a) *ngimbangang*, *ngimbangang* I 'membandingkan'
ngimbangang II 'menerbangkan'

- | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|
| (b) | <i>nebteb</i> , | <i>nebteb</i> I
<i>nebteb</i> II | 'memangkas'
'mengentak-
ngentakkan kaki' |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|

Kehomoniman verba perbuatan di atas terlihat pada kalimat berikut.

- (25) *Ia ngimbangang désané ento, akuda jlemané sugih ditu.*
'Ia **membandingkan** desa itu, berapa orang kaya disana.'
- (26) *Bapané ngimbangang dara di umahné.*
'Bapak **menerbangkan** burung dara di rumahnya.'
- (27) *Ia nebteb pagehan.*
'Ia **memangkas** pagar.'
- (28) *Beli nebteb ngalih balang.*
'Kakak (laki-laki) **mengentak-ngentakkan kaki** mencari belalang.'

Kata-kata di dalam (25)–(28), yaitu *ngimbangang* dan *nebteb* adalah kata-kata homonim. Kata-kata homonim itu termasuk verba perbuatan. Dengan demikian kata-kata tersebut dapat menjadi jawaban pertanyaan. *Apa gaéné teken subjek?* Apa yang dilakukan oleh subjek?

2.2.1.4. Homonim Verba Proses

Verba proses adalah verba yang mengandung makna inheren proses (Alwi dkk., 1993:94). Verba proses biasanya dapat menjawab pertanyaan Apa yang terjadi pada subjek? Selain itu, verba proses juga menyatakan adanya perbuatan dari suatu keadaan yang lain. Verba proses di dalam bahasa Bali ada juga yang bermakna homonim. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut.

- (a) *makedus, makedus* I 'berasap'
makedus II 'berbau'

- (b) *makeplug*, *makeplug* I 'tertumpah'
makeplug II 'meletus'

Kehomoniman verba proses di atas terlihat pada kalimat berikut.

- (29) *Nasiné makedus* krana suba lebeng.
'Nasinya **berasap** karena sudah masak.'
- (30) *Makedus* bon bé sampiné ané magoréng.
'**Berbau** lezat daging sapi yang digoreng.'
- (31) *Lengisé makeplug* uling pucungé.
'Minyak itu **tertumpah** dari botolnya.'
- (32) *Gunung Agungé makeplug*.
'Gunung Agung itu **meletus**.'

Kata-kata *makedus* (29) dan *makeplug* (31) adalah homonim. Kata-kata *makedus* dan *makeplug*' dapat digunakan menjawab pertanyaan, "Apa yang dilakukan subjek?" dan "Apa yang terjadi pada subjek?" tidak digunakan dalam kalimat perintah. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut.

- (a) *lebar*, *lebar* I 'wafat'
lebar II 'buang'
lebar III 'bubar'

Pemakaiannya dapat dilihat pada kalimat berikut.

- (33) *Pedanda Tabanan sampun lebar*.
'Pedeta Tabanan sudah **wafat**.'
- (34) *Wusan macaru, bantené lebar* ka semané.
'Setelah upacara korban, **buang** sajen itu ke kuburan.'
- (35) *Ida sampun mayoga pitung rahina, bénjang jagi lebar*.
'Beliau sudah bertapa tujuh hari, besok akan **bubar**.'

Kata *lebar* di dalam kalimat di atas adalah kata homonim verba keadaan. Dikatakan demikian, karena kata-kata tersebut tidak dapat menjadi jawaban pertanyaan,

"Apa yang dilakukan oleh subjek?" dan "Apa yang terjadi pada subjek?" Selain itu, kata homonim verba keadaan tidak digunakan dalam kalimat perintah.

2.2.2 Homonim Nomina

Secara semantis nomina bahasa Bali adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dengan demikian, kata seperti *bapa* 'ayah', *sapi* 'sapi', *korsi* 'kursi', *kasugihan* 'hal kekayaan' adalah nomina. Selain itu, secara sintaksis nomina mempunyai ciri sebagai berikut:

- (a) Dalam kalimat yang predikatnya verba cenderung menempati fungsi subjek, objek, atau pelengkap, misalnya *dagangé* 'pedagang itu' menempati posisi subjek dalam *Dagangé madérét di sisin pasihé* 'Pedagang berderet di pinggir pantai'.
- (b) Nomina dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung maupun di antara kata *ané* 'yang', misalnya *anak luh jegeg* 'perempuan cantik' atau *anak luh ané jegeg* 'perempuan yang cantik'

Berdasarkan bentuknya, nomina dibedakan menjadi (1) nomina dasar dan (2) nomina turunan. Nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas satu morfem, sedangkan nomina turunan adalah nomina yang diturunkan melalui afiksasi, perulangan, atau pemajemukan (Alwi dkk. 1993:244 dan 247). Sejalan dengan itu, homonim nomina dibedakan menjadi dua seperti uraian berikut ini.

2.2.2.1 Homonim Nomina Dasar

Seperti telah diuraikan, nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas satu morfem. Dengan demikian, homonim nomina dasar adalah homonim yang berupa satu morfem. Di dalam bahasa Bali ditemukan sejumlah homonim nomina

dasar, sebagai berikut.

- | | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| (a) <i>gajih</i> , | <i>gajih</i> I | 'gaji/upah' |
| | <i>gajih</i> II | 'ketan/gajih' |
| (b) <i>gambar</i> , | <i>gambar</i> I | 'gambar' |
| | <i>gambar</i> II | 'kaca rasa' |

Kehomoniman nomina dasar tersebut di atas, dapat dilihat pada kalimat berikut.

- (36) *Tiang suba nyemak **gajih** bulan Méi.*
'Saya sudah mengambil **gaji/upah** bulan Mei.'
- (37) *Ketan **gajih** jaen pesan daarang jaja uli.*
'Ketan **gajih** (dipakai tapai) enak sekali dimakan bersama dengan kue uli.'
- (38) ***Gambar** ento, luung pesan gantungan di tongosé pules.*
'**Gambar** itu, bagus sekali digantungkan di tempat tidur.'
- (39) *Umahné ané puun dingdingina **gambar**.*
'Rumahnya yang terbakar diberi **kaca rasa** (supaya apinya tidak menjalar).'

Kata-kata seperti *gajih* dan *gambar* di dalam kalimat (36)–(39) tersebut di atas adalah homonim memiliki makna yang berbeda. *Gajih* dan *gambar* termasuk nomina dasar karena terdiri atas satu morfem dan sesuai dengan ciri-ciri nomina bahasa Bali.

2.2.2.2 Homonim Nomina Turunan

Homonim nomina turunan terbentuk sebagai akibat proses pembubuhan afiks (afiksasi), perulangan, dan pemajemukan. Di dalam bahasa Bali ditemukan homonim nomina turunan. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut :

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| (a) <i>pangagelan</i> , | <i>pangagelan</i> I | 'pemukul' |
| | <i>pangagelan</i> II | 'pemotong' |

- (b) *langit-langit*, *langit-langit* I 'bagian atap rumah'
langit-langit II 'langit-langit
(mulut bagian atas di belakang gigi)'
(c) *kebo dongol*, *kebo dongol* I 'kerbau yang
tidak bertanduk'
kebo dongol II 'cuek'.

Kalimat-kalimat di bawah ini memperlihatkan kehomoniman kata-kata nomina turunan di atas.

- (40) *Kayu gedé buin lantang anggona pangagelan cicing.*
'Kayu yang besar dan panjang dipakai pemukul anjing.'
(41) *Pangagelan kayu ané gedé lung.*
'Pemotongan kayu yang besar itu patah.'
(42) *Langit-langit umah tiangé suba usak.*
'Bagian atap rumah rumahnya sudah rusak.'
(43) *Tiang nyepsep gula ngantos neket di langit-langit.*
'Saya mengisap permen sampai melekat di langit-langit.'
(44) *Kebo dongol ngamah padang di tegalé.*
'Kerbau yang tidak bertanduk makan rumput di ladang.'
(45) *Ci sing ningehang munyi, jlema cara kebo dongol.*
'Kamu tidak mendengarkan ucapan orang, cuek saja.'

Kata-kata di dalam kalimat (40) – (45), yaitu *pangagelan*, *langit-langit*, dan *kebo dongol* adalah homonim yang berkategori nomina turunan. Pada kalimat (40) – (41) terdapat kata homonim *pangagelan* yang dibentuk dengan afiksasi. Kata itu terdiri atas bentuk dasar *agel* dan afiks *pan--an*.

Homonim nomina turunan juga dapat dibentuk melalui perulangan. Hal itu terlihat pada kata *langit-langit* (42) – (43). Kata itu berasal dari bentuk dasar *langit*, kemudian mengalami perulangan sehingga terbentuk kata *langit-langit*.

Selain melalui afiksasi dan perulangan, homonim nomina turunan juga dibentuk melalui pemajemukan. Homonim nomina yang berupa kata majemuk terlihat pada kata *kebo dongol* (44)–(45). Homonim *kebo dongol* terdiri atas bentuk kata *kebo*, yang bermakna 'kerbau' dan tidak bertanduk', dan prakategori *dongol*. Penggabungan bentuk dasar *kebo* dan prakategori *dongol* membentuk kata majemuk *kebo dongol*, yang bermakna homonim I 'kebo yang tidak bertanduk' dan II 'cuek'.

2.2.3 Homonim Adjektiva

Di dalam bahasa Bali adjektiva adalah kategori yang ditandai dengan kemungkinannya untuk:

- (a) bergabung dengan partikel *tusing* 'tidak', misalnya *tusing jaen* 'tidak enak', *tusing melah* 'tidak baik';
- (b) mendampingi nomina, misalnya *anak luh jegég* 'perempuan cantik', *anak cerik gelem* 'anak kecil sakit';
- (c) didampingi partikel, seperti *pesan 'sekali'*, *gati 'sekali'* misalnya *dueg pesan/gati* 'pintar sekali' (bdk. Kridalaksana, 1986:57).

Berdasarkan bentuknya, adjektiva bahasa Bali dapat dibedakan menjadi (1) adjektiva dasar dan (2) adjektiva turunan. Kedua adjektiva itu dideskripsikan berikut ini.

2.2.3.1 Homonim Adjektiva Dasar

Homonim adjektiva dasar merupakan bentuk yang terdiri atas satu morfem (monomorfemis). Di dalam bahasa Bali juga ditemukan homonim adjektiva yang monomorfemis. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut.

- (a) *kaon*, *kaon* I 'buruk'
kaon II 'kalah'
- (b) *badoh*, *badoh* I 'lambar'
badoh II 'hambar'

Kata-kata di atas dapat digunakan dalam kalimat-kalimat berikut untuk melihat kehomonimannya.

- (46) *Tingkah anaké ento kaon pisan.*
'Perbuatan anak itu **buruk** sekali.'
- (47) *Ida kaon maklecan.*
'Beliau **kalah** berjudi.'
- (48) *Pejalané badoh pesan.*
'Jalannya **lamban** sekali.'
- (49) *Tapené badoh pesan rasané.*
Tapainya **hambar** sekali rasanya.'

Kata-kata *kaon* dan *badoh* pada kalimat di atas adalah kata homonim adjektiva bentuk dasar. Kata-kata itu memiliki makna yang berbeda-beda dan tidak terdiri atas lebih dari satu morfem.

2.2.3.2 Homonim Adjektiva Turunan

Homonim adjektiva turunan (polimorfemis) pada umumnya terjadi oleh penggabungan kata sinonim dan pemajemukan. Di dalam bahasa Bali, terdapat adjektiva polimorfemis *nyem lalah* yang bermakna I 'cukup pedas' dan II 'sinting'. Pemakaiannya dapat dilihat pada kalimat berikut.

- (50) *Jukuté masa nyem lalah dogén.*
'Sayur itu terasa **cukup pedas**.'
- (51) *Bikasné sing nyidaang nerima, jlema nyem lalah.*
'Sifatnya tidak dapat diterima, manusia **sinting**.'

Pada kalimat (50) *nyem lalah* bermakna 'cukup pedas', sedangkan pada kalimat (51) kata tersebut bermakna 'sinting' sehingga dapat dikatakan bahwa *nyem lalah* adalah homonim. Dilihat dari segi bentuk, *nyem lalah* termasuk adjektiva polimorfemis, yaitu terbentuk dari morfem dasar *nyem*, yang bermakna 'tawar/hambar' dan morfem dasar *lalah* 'pedas'.

Dengan demikian, homonim *nyem lalah* terbentuk sebagai akibat proses pemajemukan.

3. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Dilihat dari segi bentuknya, homonim dalam bahasa Bali dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu (1) homonim berbentuk kata dasar dan homonim berbentuk kata turunan. Dilihat dari segi kategori katanya, homonim dalam bahasa Bali dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) homonim verba, (2) homonim nomina, dan (3) homonim adjektiva. Homonim verba dibedakan menjadi lima, yaitu homonim verba asal, homonim verba turunan, homonim verba perbuatan, homonim verba proses, dan homonim verba keadaan. Homonim nomina dibedakan menjadi dua, yaitu homonim nomina dasar dan homonim adjektiva dibedakan menjadi dua, yaitu homonim adjektiva dasar dan homonim adjektiva turunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasan, dkk. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1976. "Satua-Satua Sané Banyol ring Kasusastraan Bali". Singaraja: Balai Penelitian Bahasa.
- Kridalaksana, Harimurti. 1992. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia.
- Leech, Geoffrey. 1975. *Semantics*. Great Britain : Hesell, Watson & VinicyLtd.
- Ramlan, M. 1983. *Ilmu Bahasa Indonesia : Morfologi*. Yogyakarta: UP Karyono.
- Sitindoan, Gustaf. 1984. *Pengantar Linguistik dan Tata Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- Sudaryanto. 1984. *Pengantar Linguistik dan Tata Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- Sudiati, Ni Wayan. 2000. "Homonimi dalam Bahasa Bali". Denpasar: Balai Bahasa Denpasar.
- Verhaar, J.W.M. 1981. *Pengantar Linguistik*. Jilid I, Cetakan II, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Warna, I Wayan dkk. 1990. *Kamus Bali - Indonesia*. Denpasar: Pemda Tk. I Propinsi Bali.
- Wijana, I Dewa Putu. 1983. "Sebab-Sebab Terbentuknya Homonim dalam Bahasa Indonesia" dalam MLI Universitas Atma Jaya.

PEMAKAIAN BAHASA OLEH MASYARAKAT JAWA DI KOTA BANGLI

I Wayan Sudana

1. Pendahuluan

Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat dalam suatu kelompok etnik atau lebih (antaretnik). Berdasarkan fungsi tersebut haruslah diakui bahwa bahasa, khususnya bahasa lisan, selalu digunakan dalam dimensi sosial, artinya pemakaian bahasa senantiasa melibatkan dua dimensi sosial pemakaian bahasa.

Berbicara pada hakikatnya adalah perbuatan instrumental serta kooperatif. Berbahasa itu bersifat kooperatif. Maksud, kegiatan berbicara membutuhkan alat dan kerja sama. Alat berupa bahasa tersebut digunakan dengan pilihan dan susunan/komposisi yang dapat dipahami oleh teman tutur sehingga diperoleh tanggapan (verbal maupun nonverbal) sesuai dengan maksud pembicara.

Oleh karena pemakaian bahasa berkaitan dengan faktor (hubungan) sosial, setiap orang yang terlibat di dalam proses komunikasi senantiasa pula diatur oleh seperangkat norma pemakaian bahasa. Norma tersebut berfungsi mengatur pemilihan unsur-unsur verbal maupun nonverbal di dalam komunikasi.

Berbagai pandangan mengenai bahasa tersebut mengisyaratkan bahwa bahasa sangat penting bagi kehidupan, juga bahasa berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Dengan kata lain, pemakai bahasa memegang peranan penting dalam komunikasi. Jika fungsi suatu bahasa ditekankan pada pemakainya, hubungan antara bahasa dan pemakainya, serta hubungan antar pemakainya perlu

mendapat perhatian untuk memperoleh informasi mengenai fungsi, kedudukan dan peran suatu bahasa yang ada dan hidup di dalam suatu masyarakat.

Sejumlah fenomena menarik mengenai hubungan antara bahasa dan pemakainya meliputi, antara lain: jumlah penutur, jumlah variasi pemakaian (termasuk jumlah bahasa yang hidup di dalam suatu masyarakat), dan merosotnya fungsi, kedudukan dan peran, ketumpangtindihan fungsi dan kedudukan, pergeseran fungsi dan kedudukan, serta sikap berbahasa penutur. Dari beberapa fenomena tersebut, dua di antara yang kini menarik perhatian para peneliti, pakar bahasa, dan pemerhati masalah sosiolinguistik, yakni (1) kedwibahasaan (*bilingualisem*), termasuk keanekaanbahasaan (*multilingualism*); dan (2) kepunahan bahasa (*language death*). Dampak langsung dari kedua fenomena ini, yakni timbulnya pergeseran dan ketumpangtindihan pemakaian bahasa serta hilangnya satu unsur budaya yang merupakan jati diri etnik penutur suatu bahasa. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, kedua dampak tersebut di atas telah mencapai kondisi yang memprihatinkan. Fakta menunjukkan bahwa telah ada bahasa daerah (bahasa lokal) yang kini telah berkurang jumlah penuturnya, bahkan ada pula yang punah, misalnya penutur bahasa Sansekerta di Indonesia.

Situasi sebagaimana digambarkan di atas tentu menimbulkan kekhawatiran. Fokus kekhawatiran sesungguhnya terarah pada bahasa-bahasa kecil yang potensial punah sebagai "muara" dari salah satu dampak situasi kedwibahasaan dan keanekabahasaan. Kekhawatiran tersebut mendorong penulis untuk meneliti situasi kedwibahasaan pada masyarakat Jawa di Kota Bangli.

Wilayah penelitian kekerapan pekaian bahasa oleh masyarakat Jawa ini ditetapkan daerah sebarannya, yaitu pada masyarakat perkotaan karena dipandang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tingkat mobilitas yang

tinggi tersebut memungkinkan adanya kontak bahasa dan kontak budaya dengan anggota masyarakat lain yang pada gilirannya menumbuhkan masyarakat yang berdwibahasa. Berdasarkan pertimbangan dan kriteria dimaksud, maka yang dijadikan titik pengamatan dalam penelitian ini, yakni masyarakat penutur bahasa Jawa yang ada di Kota Bangli. Masyarakat penutur bahasa Jawa di Kota Bangli tersebar di empat kelurahan, yakni Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan, dan Kelurahan Bebalang.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan pada kajian ini adalah bagaimana kedwibahasaan pada masyarakat Jawa di Kota Bangli? Hal-hal yang tercakup di dalam pokok masalah itu adalah (1) kajian kuantitatif, meliputi: kekerapan pemakaian bahasa dan tingkat keberbedaan kekerapan pemakaian bahasa; (2) kajian kualitatif, meliputi: gambaran pemakaian bahasa, dan makna sosial pemakaian bahasa-bahasa.

Data dan informasi mengenai pilihan bahasa pada masyarakat nonetnik Bali di Kota Bangli ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang bahasa-bahasa apa saja yang mereka gunakan dalam berkomunikasi yang sesuai dengan: seting, topik, dan partisipan yang berbeda. Di samping itu, tulisan ini juga mendeskripsikan bahasa yang paling sering digunakan oleh geyup Jawa yang ada di Kota Bangli dalam mengadakan interaksi verbal. Tujuan teoretis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pembuktian secara faktual bahwa ekologi bahasa dapat berpengaruh besar terhadap pilih-memilih bahasa.

Setiap hasil usaha atau produksi pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian ini. Berorientasi dari tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini, yakni:

- a. sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu sosiolinguistik;

- b. sebagai pertimbangan bagi perumusan program perencanaan bahasa;
- c. sebagai salah satu landasan pijak bagi penelitian selanjutnya (khususnya dalam bidang sosiolinguistik).

Penelitian tentang kedwibahasaan pada masyarakat Jawa di Kota Bangli didasarkan pada hipotesis sebagai berikut.

- a) Pilihan dan pemakaian suatu bahasa berdasarkan variabel tertentu memiliki tingkat kekerapan tertentu pula;
- b) ada beberapa tingkat kekerapan pemakaian bahasa antar-subvariabel di dalam variabel yang sama;
- c) pemilihan dan pemakaian bahasa tertentu memiliki makna tertentu pula;
- d) masyarakat Jawa di Kota Bangli yang berdwbahasa memiliki profil kedwibahasaan tertentu berdasarkan fakta pemilihan dan pemakaian bahasa.

Kedwibahasaan (*bilingualism*) adalah penggunaan dua bahasa secara berganti-ganti oleh seorang atau oleh sekelompok orang (Kridalaksana, 1992:25). Pengertian tadi mengandung dua konsep, yakni kedwibahasaan individu (*individu bilingualism*), dan kewibahasaan masyarakat (*societal bilingualism*).

Secara konseptual, kedua jenis kedwibahasaan tersebut tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, untuk kepentingan penelitian ini, kedua konsep kajian di atas dibedakan berdasarkan fokus dan lingkup kajian. Fokus kajian kedwibahasaan perorangan ialah penguasaan bahasa oleh setiap individu, sedangkan fokus kajian kedwibahasaan masyarakat ialah penggunaan bahasa-bahasa di dalam suatu masyarakat tutur, yang meliputi alih kode dan campur kode (lihat Grosjean, 1982:145).

Walaupun terdapat perbedaan fokus kajian (dan fokus pengamatan), namun harus disadari bahwa keduanya berhimpitan, artinya kedwibahasaan individu berada (dan mungkin hidup atau digunakan) di dalam suatu masyarakat tutur. Sebaliknya, adanya kedwibahasaan masyarakat karena adanya individu yang berdwibahasa. Kedwibahasaan pada hakekatnya adalah gejala perorangan (*parole*) dan merupakan karakteristik pemakai bahasa. Dengan demikian, kedwibahasaan sesungguhnya merupakan perilaku berbahasa dan penguasaannya.

Fishman mengatakan bahwa kedwibahasaan masyarakat adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh sekelompok besar penduduk, walaupun tidak semua anggota guyup adalah dwibahasa.

Kedwibahasaan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan tingkat penguasaan bahasa-bahasa. Berdasarkan kriteria ini, kedwibahasaan dibedakan atas dua, yakni (1) kedwibahasaan sempurna; dan (2) kedwibahasaan tidak sempurna (*cf. Fishman, 1977:103*). Kedwibahasaan sempurna adalah penguasaan dua bahasa atau lebih sama baiknya. Sebaliknya, kedwibahasaan tidak sempurna adalah penguasaan bahasa tertentu lebih dari bahasa lain.

Selain itu, kedwibahasaan dapat diklasifikasikan atas tiga, yakni: (1) kedwibahasaan koordinat (*coordinate bilingualism*); (2) kedwibahasaan majemuk (*compound bilingualism*); dan (3) kedwibahasaan subkoordinat (*sub-coordinate bilingualism*).

Kedwibahasaan koordinat diperoleh melalui pembelajaran bahasa-bahasa pada lingkungan yang terpisah, atau dalam lingkungan sosial yang berbeda. Kedwibahasaan majemuk diperoleh melalui pembelajaran bahasa dalam konteks sosial yang sama. Sedangkan kedwibahasaan subkoordinat adalah penguasaan bahasa kedua berdasarkan bahasa pertama yang dianggap dominan (lihat juga Fishman, 1977:107).

Sehubungan dengan pilih-memilih bahasa, selain berkaitan dengan variabel sosiolinguistik, juga berkaitan dengan ranah (*domain*). Ranah tidak ditentukan oleh jumlah pemakaiannya atau kelompok yang terlibat di dalamnya, melainkan atas dasar: (1) konteks kelembagaan dan (2) tingkah laku pelibat. Ranah adalah konstelasi antara variabel-variabel sosiolinguistik (topik, situasi, pelibat, dan latar) (lihat Fishman 1972:29; Fasold, 1984:49-51).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik yang mengacu kepada pemilihan bahasa (*language choice*). Pemilihan dan pemakaian bahasa merupakan fenomena sosiolinguistik yang ada di dalam masyarakat tutur yang mengisyaratkan bahwa di dalam masyarakat tutur itu terdapat lebih dari satu bahasa atau pun ragam bahasa. Pilihan bahasa atau ragam bahasa merupakan cermin kemampuan berkomunikasi individu sebagai aspek fundamental dari sifat manusia (Fishman, 1977:24).

Pilihan bahasa atau ragam bahasa berlangsung terus menerus, dan lama kemudian terkesan bahwa pemilihan bahasa tersebut berlangsung secara alamiah. Untuk itu, perlu dikaji perilaku pemilihan dan pemakaian, serta kekerapan (*frequency*) pemakaiannya.

Pemilihan dan pemakaian bahasa dalam konteks sosial didukung oleh repertoar verbal penuturnya. Repertoar verbal merupakan milik individu yang digunakan sesuai konteks. Konteks menurut Fishman disebut ranah (*domain*). Trudgill (1992:29) mengartikan ranah sebagai konsep yang dikembangkan dari alih-kode (*code-switching*) karena adanya perbedaan pemakaian bahasa dalam konteks sosial yang berbeda.

Sehubungan dengan pemilihan dan pemakaian bahasa dan situasi kedwibahasaan maupun keanekabahasaan, Fishman (1979:16) mengatakan bahwa kajian pemakaian bahasa mencakupi: (1) bahasa apa yang digunakan, (2) siapa

pelibat pembicaraan, (3) kapan dan di mana pembicaraan berlangsung, dan (4) apa topik pembicaraan. Dikatakan pula bahwa topik tertentu diperbincangkan dengan saksama dalam bahasa tertentu dari pada bahasa lainnya dalam konteks anekabahasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilihan dan pemakaian bahasa dalam masyarakat yang berdwibahasa maupun beraneka bahasa ditentukan oleh variabel-variabel: (1) topik; (2) situasi; (3) hubungan pelibat; dan (4) latar. Variabel-variabel ini sekaligus merupakan variabel penelitian dalam mengungkap profil kedwibahasaan pada masyarakat etnik Jawa di Kota Bangli.

Selain adanya faktor "*multilingualisme* masyarakat", pilihan bahasa juga ditentukan oleh konteks institusional tertentu yang disebut domain atau ranah. Ranah itu sendiri merupakan konstruksi sosial budaya yang diabstraksikan dari partisipan, lokasi, dan topik (Fishman, 1972:22–24). Mengingat ranah itu merupakan konstelasi dari topik, partisipan, dan lokasi, tiap-tiap ranah pemakaian bahasa dapat dianalisis berdasarkan topik, partisipan/pelibat, dan lokasi/tempat. Ranah keluarga, misalnya, dapat dikaji sebagai tempat (lokasi) yang menjadi sarana pertemuan, komunikasi, dan interaksi verbal komunitas terkecil antara ayah, ibu, dan anak-anak dengan topik yang senantiasa berulang, seperti nasihat, larangan, dan senda gurau.

Ranah-Ranah Pemakaian Bahasa

Ranah	Pelibat/Partisipan	Tempat/lokasi	Topik
Keluarga	Orang tua-anak	Di rumah	Nasihat
Agama	Ustad- Jemaha	di tempat ibadah	Hal suci
Pergaulan	Teman-teman	di lapangan	Olah raga
Pekerjaan	Atasan - bawahan	di kantor	Pekerjaan

(Fishman, 1972:22)

Tiap-tiap ranah pemakaian bahasa seperti di atas akan menciptakan situasi hubungan antarpelibat yang berbeda-beda. Misalnya, di tempat ibadah, seperti di masjid, khususnya ceramah agama, jelas akan tercipta suasana yang resmi dan kaku. Demikian pula di kantor dan di sekolah kerap tercipta situasi yang sangat resmi. Berbeda halnya dengan di lapangan dan di pasar akan tercipta situasi yang santai. Hal itu berarti bahwa pilihan bahasa dipengaruhi oleh unsur-unsur siapa berbicara kepada siapa, tentang apa, dalam situasi yang bagaimana, dan dalam jalur apa (Fishman dalam Pride dan Holmes, 1979:15).

Konsekuensi pilihan bahasa itu menimbulkan adanya gejala kebertahanan dan pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa itu terjadi apabila ranah-ranah itu mulai "bocor" dan bahasa mayoritas merembes masuk dan menggantikan fungsi bahasa minoritas. Apabila pergeseran itu berlangsung secara total, akan membawa konsekuensi terjadinya kepunahan bahasa karena bahasa minoritas sudah tidak berfungsi lagi pada semua ranah dan digantikan oleh bahasa mayoritas (Fasold, 1984: 213 dan Sumarsono, 1998: 154). Kalau dikaitkan dengan kajian ini, masyarakat nonetnik Bali yang ada di Kota Bangli, khususnya etnik Jawa) dapat dikategorikan sebagai kaum minoritas tidak mampu mempertahankan bahasa asalnya dalam persaingan dengan bahasa mayoritas. Dalam hal ini bahasa mayoritas menjadi dominan.

Dalam penelitian ini ada dua masalah yang harus dijawab, yaitu pemakaian atau pilihan bahasa pada masyarakat Jawa di Kota Bangli dan mengapa mereka memilih bahasa tersebut. Terkait dengan kedua masalah itu diperlukan data yang memadai melalui penelitian di lapangan.

Untuk keperluan masalah pemakaian atau pilihan bahasa pada masyarakat nonetnik Bali (khususnya etnik Jawa) di Kota Bangli, datanya berupa tuturan yang diambil

dari peristiwa tutur yang terjadi pada guyup nonetnik Bali (etnik Jawa) yang ada di Kota Bangli dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan intrakeluarga maupun antarkeluarga. Adapun metode yang digunakan adalah metode observasi berpartisipasi, yaitu peneliti berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak orang-orang saling berbicara. Metode observasi berpartisipasi ini oleh Sudaryanto (1993) dapat disejajarkan dengan metode "simak libat cakap" (SLC). Dalam hal ini peneliti ikut berpartisipasi menyimak siapa berbicara dengan siapa, di mana peristiwa tutur itu berlangsung, dan bahasa apa yang digunakan..

Selain metode observasi di atas, untuk memperoleh data tentang pemakaian atau pilihan bahasa oleh etnis Jawa di Kota Bangli, digunakan pula metode angket. Metode angket ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 100 orang responden yang telah dipilih sebelumnya dari berbagai lapisan masyarakat (seperti pada sampel penelitian).

Semua data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara rinci. Data mengenai masalah pemakaian atau pilihan bahasa yang telah dikumpulkan, berupa rekaman tuturan yang terjadi dalam etnis Jawa di Kota Bangli, ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan dengan tambahan keterangan tentang situasi yang melatarbelakangi tuturan tersebut. Kemudian, data yang telah ditranskripsi itu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil analisis data pemakaian atau pilihan bahasa yang diperoleh dari angket dan observasi disajikan dengan cara mendeskripsikannya. Selanjutnya, untuk penyajian hasil analisis pemilihan bahasa yang diperoleh dari wawancara disajikan dengan deskripsi dan penjelasan dengan kata-kata biasa. Metode penyajian hasil analisis seperti di atas disebut pula metode formal dan informal (Sudaryanto, 1993:145).

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat etnik Jawa yang ada di kota Bangli. Berdasarkan data dari

statistik Kabupaten Bangli, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan warga nonetnik Bali (khususnya etnik Jawa) yang ada di Kota Bangli tidak begitu besar, yaitu sekitar 125 KK dengan jumlah penduduk seluruhnya 432 jiwa (Statistik Kabupaten Bangli, 2005). Dari 135 KK yang ada itu, 55 KK etnis Jawa berdomisili di Kelurahan Kawan dengan jumlah jiwanya sebanyak 160, 30 KK etnik Jawa berdomisili di kelurahan Cempaga dengan jumlah penduduknya sekitar 97 jiwa, 35 KK etnik Jawa berdomisil di Kelurahan Bebalang dengan jumlah penduduk sekitar 115 jiwa, sedangkan sisanya lagi berdomisili di Kelurahan Kubu yaitu 15 KK dengan jumlah penduduk sekitar 60 jiwa. Dari keseluruhan jumlah warga geyup Jawa yang ada itu selanjutnya dilakukan pemilihan sampel orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri populasi sebelumnya (Hadi, 1984:82). Adapun penutur yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang diambil berdasarkan karakteristik lapisan geyup Jawa, yaitu dari kelompok pedagang, pemuka agama, dan pegawai. Selanjutnya, mereka yang dipilih sebagai sampel adalah golongan masyarakat yang berumur 20 tahun ke atas. Batas maksimal umur yang dipakai subjek adalah 40 tahun.

2. Pemakaian Bahasa oleh Masyarakat Jawa di Kota Bangli

Kekerapan pemakaian bahasa menunjukkan jumlah seringnya pemilihan dan pemakaian bahasa tertentu berdasarkan variabel tertentu. Jumlah pemilih dan pemakai tersebut diperoleh/diketahui berdasarkan jawaban responden terhadap sejumlah pertanyaan pada daftar pertanyaan berkenaan dengan pemilihan dan pemakaian bahasa dimaksud.

Berdasarkan penjelasan di atas kekerapan pemakaian bahasa pada masyarakat etnik Jawa di Kota Bangli secara umum dipilah menjadi dua, yakni: (1) kekerapan pemakaian

bahasa berdasarkan variabel topik, setting, situasi, dan hubungan pelibat; (2) kekerapan pemakaian bahasa berdasarkan variabel bebas: usia dan tingkat mobilitas/lama kontak dengan etnik lain.

2.1 Variabel Latar

Latar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat yang mengikat peserta pembicaraan dalam menghasilkan perilaku bahasa dan sesuai dengan tata krama sosial bahasa. Latar mencakup dua pengertian, yaitu tempat di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga.

2.1.1. Latar di dalam Rumah Tangga

Pengertian latar di dalam rumah tangga adalah terjadinya kegiatan kebahasaan antara penutur yang terjadi di dalam rumah tangga. Kegiatan berbahasa di dalam rumah tangga dilakukan oleh penutur bahasa, baik yang termasuk anggota keluarga (Bapak, Ibu, Adik, Suami/Istri, dan lain sebagainya), maupun yang bukan anggota keluarga tetapi bersama-sama berada di dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan bahwa pemakaian bahasa Jawa di dalam rumah tangga menunjukkan kekerapan pemakaian paling tinggi; pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa kelompok masyarakat Indonesia menempati peringkat kedua; pemakaian bahasa Bali sebagai bahasa masyarakat kelompok etnik Bali menempati peringkat ketiga; pemakaian bahasa campuran (BJ+BI) menempati posisi keempat; dan pemakaian bahasa campur (BJ+BB, BI+BB) menempati posisi kelima dalam artian bahasa campur ini tidak pernah digunakan.

Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat etnik Jawa di Kota Bangli jika berkomunikasi dengan lawan bicaranya dalam rumah tangga sebagian besar dari peristiwa bahasanya memakai bahasa Jawa sebagai sarana

utama untuk mewahana isi pesannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa masih mempertahankan bahasa ibunya.

2.1.2. Latar di Luar Rumah Tangga

Latar di luar rumah tangga adalah tempat terjadinya komunikasi atau berlangsungnya hubungan kebahasaan di luar lingkungan rumah tangga. Yang tergolong latar di luar rumah tangga, yaitu peristiwa pembicaraan yang berlangsung seperti: di jalan, di pasar, di kantor, di sekolah, di toko, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekerapan pemakaian bahasa oleh masyarakat Jawa di kota Bangli dapat dijelaskan sebagai berikut. Di luar rumah tangga, pemakaian bahasa Indonesia mencapai frekuensi pemakaian tertinggi di antara pemakaian bahasa yang lainnya. Pemakaian bahasa Bali menempati urutan kedua. Pemakaian bahasa campur (BB+BI) menempati urutan ketiga. Pemakaian bahasa Jawa menempati urutan keempat. Pemakaian bahasa campuran (BJ+BB) menempati urutan kelima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa frekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional oleh etnik Jawa di kota Bangli khususnya di luar rumah tangga, memiliki frekuensi pemakaian bahasa yang tertinggi. Hal ini sudah sewajarnya karena telah berbaurnya masyarakat nonetnik Bali di kota Bangli dengan penduduk asli yang juga rata-rata telah menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehingga mereka tidak bisa lepas dari kebiasaan dalam menghadapi penutur dengan tingkat penguasaan bahasa yang beraneka bahasa.

Pemakaian bahasa Jawa di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga menunjukkan kekerapan pemakaian yang tidak seimbang, artinya pemakaian bahasa Jawa di dalam rumah tangga menunjukkan frekuensi pemakaian

yang sangat tinggi, sedangkan pemakaian bahasa Jawa di luar rumah tangga menunjukkan pemakaian yang tidak begitu tinggi. Ini membuktikan bahwa bahasa Jawa masih menjadi bahasa yang utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, dalam latar di dalam rumah tangga, sedangkan pada latar di luar rumah tangga tidak begitu menonjol pemakaiannya.

2.2. Variabel Situasi

Variabel situasi dalam penelitian ini adalah keadaan atau suasana berlangsungnya hubungan kebahasaan. Situasi tidak dapat dilepaskan dengan unsur-unsur yang membangun peristiwa tutur itu. Dengan demikian, situasi selalu berhubungan dengan status dan latar yang menghambat situasi pola tingkah laku. Pola tingkah laku berbahasa, yaitu mencakup pengertian kecermatan memilih bahasa dan variasi bahasa yang mampu mendukung situasi. Dalam penelitian situasi yang dapat menimbulkan pola tingkah laku berbahasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu situasi formal (resmi) dan situasi nonformal (tidak resmi)

2.2.1 Situasi Resmi

Situasi resmi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai hubungan tetap terikat dengan norma-norma atau aturan-aturan yang bersifat resmi, seperti aturan-aturan dalam dinas pemerintahan dan dalam swasta yang juga merupakan tempat berlangsungnya hubungan kebahasaan.

Pemakaian bahasa yang bersifat resmi yang dihadapi oleh masyarakat nonetnik Bali di kota Bangli antara lain: percakapan etnik Jawa dengan atasan, petugas kepolisian, pegawai camat, kesehatan, kepala desa, dan pegawai bank.

Masyarakat Jawa yang tinggal di kota Bangli adalah termasuk masyarakat anekabahasawan. Hal ini disebabkan

oleh pengaruh bahasa yang mengelilinginya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa dalam situasi resmi pemakaian bahasa Indonesia menunjukkan dominannya. Di samping itu, pemakaian bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia menunjukkan kekerapan yang tinggi, artinya bahasa ini juga sering digunakan dalam situasi resmi. Pemakaian bahasa campuran, yaitu bahasa Bali dan bahasa Indonesia (BB+BI) dalam situasi resmi sekali-kali juga digunakan, sedangkan bahasa Bali dalam situasi resmi tidak pernah dipergunakan oleh etnik Jawa sehingga kekerapan pemakaian bahasa Bali menunjukkan nol persen. Begitu pula dengan bahasa campuran (BB+BJ) juga tidak pernah digunakan dalam situasi yang bersifat formal. Hal ini membuktikan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat nonetnik Bali di kota Bangli sudah bernar-benar berfungsi sebagai bahasa pengantar yang utama dalam melakukan hubungan kebahasaan khususnya dalam situasi resmi. Seperti diketahui dalam situasi resmi masalah komunikasi banyak dipengaruhi oleh unsur kedinasan/keresmian sehingga wacana lebih didominasi oleh bahasa resmi, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

2.2.2 Situasi Tidak Resmi

Situasi tidak resmi dalam penelitian ini dimaksudkan adalah keadaan atau suasana berlangsungnya hubungan kebahasaan yang tidak terikat oleh aturan-aturan atau norma-norma yang sah dari pemerintah atau jawatan dinas dan tidak terdapat dalam pemerintahan. Situasi tidak resmi terjadi pada saat santai, bersendagurau, menyapa di jalan, berbelanja, dan sebagainya. Hubungan yang terjadi pada masyarakat etnik Jawa di kota Bangli, khususnya dalam situasi tidak resmi, seperti percakapan di warung, di pasar,

di tempat hiburan, dan lain sebagainya. Partisipan yang melakukan hubungan kebahasaan dalam situasi tidak resmi seperti disebutkan di atas, tidak banyak terikat dengan pemilihan pemakaian bahasa yang bersifat formal atau pemakaian bahasa yang memenuhi syarat-syarat bahasa resmi. Pemakaian bahasa yang tidak resmi biasanya akan banyak menimbulkan pemakaian bahasa yang bervariasi.

Masyarakat etnik Jawa sebagai kelompok masyarakat yang sudah lama bertempat tinggal di kota Bangli dan telah berbaur dengan masyarakat sekitarnya sehingga menjadikan dirinya lebih akrab dengan masyarakat Bali yang mendapinginya.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui pemakaian bahasa yang paling banyak dalam situasi tidak resmi adalah bahasa Bali, kemudian disusul oleh pemakaian bahasa Indonesia dan pemakaian bahasa campur.

Pergaulan masyarakat etnik Jawa dalam situasi tidak resmi dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa Bali mendominasi pemakaian bahasa yang lainnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa bahasa Bali selalu hadir pada setiap pembicaraan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Jawa yang terdapat di kota Bangli secara terus menerus bergaul dengan masyarakat sekitarnya, yaitu masyarakat Bali yang selalu menggunakan bahasa Bali dalam berkomunikasi. Dengan demikian, mau tak mau masyarakat etnik Jawa harus belajar menggunakan bahasa Bali kalau ingin bergaul dengan masyarakat Bali.

Perbedaan pemakaian bahasa oleh masyarakat Jawa di atas tidak lepas dari faktor-faktor luar bahasa yang mempengaruhi terhadap pemakain bahasa, seperti: tempat, keadaan, partisipan, dan faktor lainnya. Perubahan faktor-faktor tersebut di atas akan menghasilkan keanekaragaman bahasa yang dikuasai oleh masyarakat penuturnya.

2.3 Variabel Topik Pembicaraan

Topik merupakan variabel penting yang menentukan pemilihan dan pemakaian suatu bahasa, khususnya dalam masyarakat berdwibahasa. Fishman mengatakan bahwa topik merupakan pengatur pemakaian bahasa dalam latar/suasana anekabahasa (lihat Pride & Holmes, 1979:17).

Baik masyarakat tradisional maupun modern senantiasa berhubungan dengan berbagai kegiatan dan khazanah sosial budaya masyarakat. Sehubungan dengan itu, yang dimaksud dengan topik tradisional adalah topik (isi tuturan) yang berhubungan dengan kegiatan dan khazanah yang bersifat tradisional. Sedangkan topik modern adalah topik (isi tuturan) yang berhubungan dengan kegiatan dan khazanah masyarakat yang bersifat modern.

2.3.1 Pemakaian Bahasa Berdasarkan Topik Tradisional

Dalam konteks kajian ini, topik tradisional yang dijadikan isi tuturan (*content of speech*) meliputi hal-hal yang bersifat fisik-material, dan hal-hal yang bersifat mental-spiritual. Untuk membicarakan topik tradisional yang berkaitan dengan wujud budaya mental-spiritual, masyarakat etnik Jawa biasanya menggunakan bahasa Jawa karena konsep atau ungkapan-ungkapan tertentu dianggap memiliki kekuatan/nilai magis. Apabila ungkapan-ungkapan tertentu diungkapkan dengan bahasa lain maka kekuatan magisnya akan dirasakan kurang. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan tradisional mereka akan menggunakan bahasa Jawa.

2.3.2 Topik Pembicaraan Modern

Topik modern sangat kompleks. Walaupun demikian, topik modern masih dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok dimaksud, yakni hal-hal yang berhubungan dengan mental spiritual dan hal-hal yang

berhubungan dengan fisik-material.

Kompleksnya topik modern ini memandu penulis untuk membatasi topik modern tersebut pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat etnik Jawa. Masyarakat Jawa masih memiliki berbagai kegiatan dan khazanah budaya yang mentradisi dan diwahanai oleh bahasa Jawa sebagai bahasa etnik. Walaupun demikian, masyarakat Jawa di kota Bangli yang tergolong masyarakat terbuka karena tingkat mobilitas mereka tinggi, setiap saat menerima inovasi kehidupan yang mengarah kepada modernisasi. Dengan demikian, hal-hal modern pun masuk dan menyatu dengan sistem kehidupan mereka sehingga muncul wahana bahasa lain di samping bahasa Jawa untuk mengungkapkan hal-hal modern tersebut.

Mengacu kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, maka topik modern yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai kegiatan dan khazanah masyarakat yang bersifat inovatif. Kegiatan dan khazanah yang bersifat inovatif, meliputi agama, kesehatan dan keluarga berencana, teknologi elektronik, pendidikan, sistem perekonomian, media massa, dan hari-hari besar nasional. Topik-topik ini secara nyata terdapat dalam masyarakat Jawa di kota Bangli.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyimakan, diperoleh fakta bahwa untuk membicarakan topik modern, masyarakat Jawa biasanya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Pemakaian unsur-unsur lingual bahasa Indonesia lebih sering karena unsur-unsur dimaksud (bersama bendanya) tidak terdapat dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Bali. Unsur-unsur berupa kata, seperti: televisi, merek, digitec, sony, Panasonic, dan sebagainya merupakan hasil modernisasi yang belum mentradisi dalam masyarakat Jawa sehingga tidak dapat diganti dengan unsur-unsur lingual bahasa Jawa maupun

bahasa Bali. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa pemakaian bahasa Indonesia dalam konteks semacam itu disebabkan oleh kendala leksikal.

Topik modern mendorong pemakaian unsur-unsur bahasa modern. Bagi masyarakat etnik non-Bali, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa modern di samping bahasa asing. Konsep atau benda yang bersifat modern mengharuskan pelibat wicara untuk menggunakan bahasa modern, karena konsep modern tidak akan tuntas jika dibicarakan dengan bahasa daerah atau bahasa Jawa.

2.4 Variabel Hubungan Pelibat

Memilah variabel hubungan antarpelibat erat kaitannya dengan variabel situasi. Secara umum, hubungan antarpelibat dibedakan atas dua, yakni: (1) hubungan akrab dan (2) hubungan tidak akrab. Hubungan sebagaimana dikemukakan Fishman tersebut bersifat relatif. Hubungan akrab maupun tidak akrab sesungguhnya ditentukan oleh jarak "kejiwaan" yang terealisasi pada pilihan kata, pemakaian unsur-unsur suprasegmental, isi pembicaraan, dan konteks aktual yang melatarinya.

Partisipan hubungan akrab dalam berkomunikasi akan memilih bahasa daerah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kedekatan mereka dan rasa hormat mereka. Dalam hubungan tidak akrab, mereka akan memakai bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan, mengingat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di samping itu bahasa ini dianggap paling netral di antara bahasa lainnya.

3. Simpulan

Masyarakat etnik Jawa di kota Bangli memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan pemakaian bahasa pada saat melakukan komunikasi verbal, baik antaretnik maupun interetnik dalam variabel-variabel latar, situasi,

topik, dan hubungan pelibat.

Komunikasi dan interaksi interetnik masyarakat Jawa didominasi oleh pemakaian bahasa Jawa. Hal ini ditunjang oleh data dan analisis data kuantitatif yang menunjukkan bahwa bahasa Jawa memiliki kekerapan pemakaian bahasa tertinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa campuran, dalam variabel-variabel latar di dalam rumah tangga, situasi tidak resmi, topik pembicaraan tidak resmi, topik pembicaraan tradisional, peran partisipan hubungan akrab, dan peran partisipan hubungan tidak akrab. Namun, dalam variabel situasi resmi dan variabel topik pembicaraan modern, bahasa Indonesia memiliki kekerapan pemakaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemakaian bahasa Bali maupun bahasa campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. Basil Blackwell.
- Fisman, Joshua A. (ed.). 1971. *Advances in the Sociology of Language*, Vol. I: Basic Concept, Theories and Problems-Alternative Approaches. Paris: The Haque.
- , 1972. *Reading in Socilogy of Language*. Paris: The Haque Mouton Publisher.
- , 1973. *Advances in The Study of Multilingualism*. Paris: The Haque Mouton.
- Grosjean, Francois. 1982. *Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Statistik 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hymes, Dell (ed.) 1964. *Language in Culture and Society*. London: Harper and Row Publisher.
- Kridalaksana, Harimurti. 1992. *Kamus Linguistik*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Pride, J.B. dan Janet Holmes. (ed.) 1979. *Sociolinguistics*. Harmondsworth. Middlesex, England: Piguin Books.
- Statistik Kabupaten Bangli*. 2005. Diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Bangli
- Sudaryanto. 1993. *Metodelogi Penelitian Bahasa*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Trudgill, Peter. 1992. *Introduction Language and Socioety*. London: Pinguin English.

POLA KALIMAT SURAT UNDANGAN DINAS DI DENPASAR

Ni Luh Partami

1. Pendahuluan

Surat undangan merupakan salah satu kegiatan surat-menyurat. Kegiatan surat-menyurat mempunyai lingkup yang luas sehingga dalam tulisan ini surat-menyurat yang dijadikan objek dibatasi pula. Kegiatan surat-menyurat yang umum dilakukan di sebuah perkantoran (negeri) adalah surat-menyurat dinas. Surat menyurat dinas pun ada beberapa macam. Untuk kepentingan penelitian ini, surat-menyurat dinas yang difokuskan adalah surat undangan. Jenis surat undangan yang akan dipilih disesuaikan dengan data yang terkumpul, yaitu surat undangan dinas yang berkaitan dengan birokrasi dan lembaga pendidikan.

Secara umum penelitian dengan objek surat dinas di Denpasar sudah pernah dilakukan walaupun sangat terbatas. Dua di antaranya adalah "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas di Lingkungan Universitas Udayana" (Suparwa, 1989) dan "Pemakaian Bahasa Indonesia Laras Administrasi Perkantoran di Bali" (Partami *et al.*, 2003).

Penelitian surat undangan perlu dilakukan didasarkan pada asumsi bahwa masih banyak dijumpai penggunaan bahasa Indonesia yang beragam pada surat undangan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah pola kalimat yang digunakan dalam laras surat undangan di Denpasar.

Teori yang diterapkan dalam tulisan ini adalah teori struktural yang telah diterapkan dalam buku-buku terbitan Pusat Bahasa dan tentu saja dapat mendukung tulisan ini.

2. Pola Kalimat

Berdasarkan jumlah klausa, kalimat dalam surat undangan dinas terdiri atas (i) kalimat tunggal, (ii) kalimat urutan, dan (iii) kalimat majemuk.

2.1 Kalimat Tunggal

Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya dapat diisi dengan sebuah klausa. Dengan kata lain, konstituen inti seperti subjek dan predikat yang menjadi bagian inti kalimat hanya satu. Akan tetapi, unsur-unsur kalimat yang bukan inti, seperti pelengkap atau keterangan boleh lebih dari satu. Berikut ini dideskripsikan pola kalimat berdasarkan data.

(1) Kalimat Berpola SPK

Kalimat berpola SPK hanya dapat diisi oleh dua pengisi fungsi inti sintaksis kalimat, yaitu subjek dan predikat dan satu pengisi fungsi bukan inti. Perhatikan contoh berikut.

(1) Atas perhatian Saudara // kami ucapkan // terima kasih.
K P S

(2) Atas perhatian dan pelaksanaannya // kami ucapkan //
K P
terima kasih.
S

Pada kalimat (1) – (2) pengisi fungsi sintaksis subjek menempati posisi akhir kalimat, yaitu gabungan kata *terima kasih*, pengisi fungsi sintaksis predikat adalah *kami ucapkan*, dan pengisi fungsi sintaksis bukan inti keterangan menempati posisi awal kalimat, yaitu *atas perhatian Saudara* (1) dan *atas perhatian dan pelaksanaannya* (2).

(2) Kalimat Berpola SPPeIK

Kalimat berpola SPPeIK terdiri atas unsur pengisi fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Dalam data, kalimat ber-pola SPPeIK memiliki keterangan lebih dari satu dan cenderung berposisi di awal dan di akhir kalimat. Dalam data ditemukan kalimat dengan pola SPPeIK seperti berikut.

(1) Dalam rangka mengantisipasi PNS yang telah memasuki masa pensiun di Lingkungan Propinsi, Kota, atau Kabupaten se-Bali // kami // minta // kehadiran Saudara //
K S P Pel
pada
K

(2) Sehubungan dengan hal tersebut // kami // mohon //
K S P
kesediaan Saudara // untuk menghadirkan nama-nama
Pel K
Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Anugerah Tanda Kehormatan "Satyalancana" //

Kalimat (1) memiliki dua unsur keterangan, yaitu *dalam rangka mengantisipasi PNS yang telah memasuki masa pensiun di Lingkungan Propinsi, Kota, atau Kabupaten se-Bali* dan *pada ...*. Kalimat (1) dilengkapi pula dengan unsur pengisi fungsi subjek, yaitu *kami*, unsur pengisi fungsi predikat *minta*, dan unsur pengisi fungsi pelengkap *kehadiran Saudara*.

Kalimat (2) adalah kalimat yang berpola SPPeIK yang memiliki dua unsur keterangan, yaitu *sehubungan dengan hal tersebut* dan *untuk menghadirkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Anugerah Tanda Kehormatan "Satyalancana"*.

(3) Kalimat Berpola SPOK

Dalam pola kalimat seperti ini terdapat tiga unsur inti ditambah dengan satu unsur bukan inti sebagai pemerluas kalimat. Ketiga unsur inti tersebut adalah subjek, predikat, dan objek, sedangkan unsur bukan inti berupa keterangan.

Unsur keterangan dalam kalimat yang berpola SPOK ini tidak hanya satu. Dengan kata lain, dalam pola kalimat seperti itu unsur keterangan bisa lebih dari satu dan dapat menempati posisi awal dan akhir kalimat, seperti terlihat pada (1) – (2).

(1) Mengingat Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan Universitas Udayana yang telah ditetapkan sejak tahun 1976 tampaknya belum berjalan dengan baik di masing-masing Fakultas dan Program Studi//kami//mengundang//

K S P

Bapak/Ibu/Saudara//untuk menghadiri lokakarya

O K

implementasi PIP Kebudayaan Lingkungan Unud // pada

K

(2) Dalam rangka Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Jawa Barat ke Propinsi Bali//dengan ini//

K K S P

kami//mengundang Bapak/Ibu/Saudara//untuk me-

O K

nerima kunjungan kerja Pansus dimaksud// nanti pada...

K K

Pada kalimat (1) ditemukan tiga unsur keterangan, yaitu (i) *mengingat Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan Universitas Udayana yang telah ditetapkan sejak tahun 1976 tampaknya belum berjalan dengan baik di masing-masing Fakultas dan Program Studi*, (ii) *untuk menghadiri lokakarya*

implementasi PIP Kebudayaan di Lingkungan Unud, dan (iii) pada Unsur keterangan (i) bermakna keterangan sebab, unsur keterangan (ii) bermakna keterangan tujuan, dan unsur keterangan (iii) bermakna waktu dan tempat. Ketiga unsur keterangan itu berposisi pada awal kalimat (satu buah) dan pada akhir kalimat (dua buah) setelah objek Bapak/Ibu/Saudara.

Pada kalimat (2) ditemukan empat unsur keterangan, yaitu (i) *dalam rangka Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Jawa Barat ke Propinsi Bali*, (ii) *dengan ini*, (iii) *untuk menerima kunjungan kerja Pansus dimaksud*, dan (iv) *nanti pada* Makna keempat unsur keterangan yang terdapat pada (2) berbeda karena pemarkah keempat unsur keterangan itu berbeda. Keterangan (i) bermakna *keterangan yang menyatakan hal* yang dimarkahi dengan preposisi *dalam*, keterangan (ii) bermakna *keterangan yang menyatakan penyerta* yang dimarkahi dengan preposisi *dengan*, keterangan (iii) bermakna *keterangan tujuan*, yang dimarkahi dengan preposisi *untuk*, dan keterangan (iv) bermakna *keterangan waktu dan tempat*, yang dimarkahi dengan preposisi *pada*.

(4) Kalimat Berpola SPO

Kalimat yang berpola SPO diisi oleh tiga unsur inti, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dalam data, verba yang mengisi unsur predikat dalam pola kalimat seperti ini berciri aktif, seperti pada (1) – (2).

(1) Beliau//meninggalkan//ide, gagasan-gagasan kebudayaan
S P O
Bali, agama Hindu, dan dinamikanya.

(2) Kumpulan cerpen tersebut//memuat//tiga puluh
S P O
cerpen nominasi.

Kalimat (1) memiliki unsur pengisi subjek, yaitu *beliau*, unsur pengisi predikat *meninggalkan*, dan unsur pengisi objek berupa *ide, gagasan-gagasan kebudayaan Bali, agama Hindu, dan dinamikanya*. Verba pengisi unsur predikat pada (1) memiliki ciri aktif, yang dimarkahi dengan konfiks *meng – kan*.

Kalimat (2) terdiri atas tiga unsur inti, yaitu subjek *kumpulan cerpen tersebut*, predikat *memuat*, dan objek *tiga puluh cerpen nominasi*. Verba yang mengisi unsur predikatnya juga berciri aktif, yang dimarkahi dengan prefiks *meng-*.

(5) Kalimat Minor (Kalimat Taklengkap)

Pola kalimat (1) – (4) yang telah dibahas sebelumnya merupakan kalimat lengkap. Pada bagian ini (5) pembahasan difokudkan pada kalimat minor atau kalimat taklengkap. Kalimat minor pada dasarnya adalah kalimat yang tidak ada subjek dan/atau predikatnya. Hal itu biasa terjadi dalam wacana karena unsur yang tidak muncul itu sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya.

Dalam data surat undangan dinas, dijumpai pula bentuk kalimat minor dengan pola K(eterangan) P(predikat) seperti dapat dicermati berikut ini.

(1) Demikian// kami sampaikan.

K P

Bentuk *Demikian kami sampaikan* (1) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap *Demikian surat ini kami sampaikan*.

Selain kalimat taklengkap (1), dalam data ditemukan pula formula yang berdiri sendiri seperti kalimat (2) berikut.

(2) ... Terima kasih.

Bentuk pada (2) tampaknya tidak mempunyai padanan bentuk lengkap. Setelah dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa pola kalimat tunggal dalam surat undangan terdiri atas lima pola seperti pada Pola 1.

Pola 1

Pola Kalimat Tunggal dalam Surat Undangan Dinas

No.	Pola Kalimat Tunggal
1.	SPK
2.	SPPelK
3.	SPO
4.	SPOK
5.	KP

2.2 Kalimat Urutan

Kalimat urutan yang ditemukan dalam surat undangan dinas tergolong kalimat lengkap, tetapi di dalamnya terdapat konjungsi antarkalimat yang menandakan bahwa kalimat urutan itu merupakan bagian kalimat sebelumnya. Konjungsi antarkalimat yang terdapat dalam kalimat urutan yang ditemukan dalam data, antara lain adalah (1) *sehubungan dengan hal tersebut*, (2) *berkenaan dengan hal tersebut*, (3) *oleh karena itu*, dan (4) *untuk itu*, seperti terlihat pada contoh (1) – (4) berikut.

- (1) *Sehubungan dengan itu*, kami mohon kesediaan Saudara untuk menghadirkan nama-nama pegawai negeri sipil yang mendapat Anugrah Tanda Kehormatan "Satyalancana".
- (2) *Berkenaan dengan hal tersebut*, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.
- (3) *Oleh karena itu*, SK tersebut akan kami susulkan segera setelah kami menerimanya.
- (4) *Untuk itu*, kami sangat mengharapkan partisipasi Saudara dalam acara tersebut yang akan dilaksanakan pada...

Konjungsi antarkalimat *sehubungan dengan itu* pada (1) diurut kalimat *kami mohon kesediaan Saudara untuk menghadirkan nama-nama pegawai negeri sipil yang mendapat tanda penghargaan "Satyalancana"*. Kalimat yang mengurut *sehubungan dengan itu*, berpola SPOK. Jadi, kalimat urutan (1) dapat dipolakan menjadi (KAK) + SPOK, atau dapat ditulis kembali seperti berikut ini.

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{KAK} \\ \textit{sehubungan dengan itu} \end{array} \right\} + \text{S + P + O + K}$$

Konjungsi antarkalimat *berkenaan dengan* beserta frasa nominal *hal tersebut* pada (2) sebagai pengikutnya langsung diurut kalimat *kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu*. Kalimat yang mengurut *berkenaan dengan* berpola SPOK. Dengan demikian, kalimat urutan (2) dapat dipolakan menjadi (KAK) + SPOK. Kalimat urutan (2) dapat ditulis kembali seperti berikut.

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{KAK} \\ \textit{berkenaan dengan} \end{array} \right\} + \text{S + P + O + K}$$

Konjungsi antarkalimat *oleh karena itu* pada (3) diurut kalimat *SK tersebut akan kami susulkan segera setelah kami menerimanya*, yang berpola SPKK. Jadi, kalimat urutan (3) dapat dipolakan menjadi (KAK) + SPK(K) atau dapat ditulis dengan rumusan sebagai berikut.

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{KAK} \\ \textit{oleh karena itu} \end{array} \right\} + \text{S + P + K + K}$$

Konjungsi antarkalimat *untuk itu* pada (4) diurut kalimat *Kami sangat mengharapkan partisipasi Saudara dalam acara tersebut yang akan dilaksanakan pada ...* yang berpola SPOK. Kalimat urutan (4) dapat dipolakan menjadi (KAK) + SPOK atau dapat ditulis kembali dengan rumusan sebagai berikut.

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{KAK} \\ \text{untuk itu} \end{array} \right\} + \text{S+P+O+K}$$

Kalimat urutan yang sudah dideskripsikan dapat dicermati pada Pola 2 berikut.

Pola 2

Pola Kalimat Urutan dalam Surat Undangan Dinas

No.	Konjungsi Antarkalimat	Unsur Pengisi Fungsi Sintaksis				
		S	P	O	Pel	K
1.	Sehubungan dengan itu	S	P	O	-	K
2.	Berkenaan dengan	S	P	O	-	K
3.	oleh karena itu	S	P	-	-	K
4.	untuk itu	S	P	O	-	K

2.3 Kalimat Majemuk

Kalimat majemuk yang digunakan dalam laras bahasa surat undangan dapat dideskripsikan berdasarkan kajian (1) ciri sintaksis dan (2) ciri semantis. Dengan kajian (1) diperoleh bentuk kalimat majemuk, sedangkan dengan kajian (2) diperoleh kemaknawian kalimat majemuk, baik kalimat mejemuk setara maupun bertingkat.

Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang mengandung konjungsi yang setipe dengan konjungsi *dan*. Apabila kalimat majemuk mengandung konjungsi yang setipe dengan *meskipun*, kalimat majemuk yang terbentuk adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi, keberadaan kalimat majemuk berdasarkan ciri-ciri sintaksis kalimat sangat ditentukan oleh keberadaan konjungsi. Kedua jenis kalimat majemuk, baik setara maupun bertingkat dideskripsikan berikut ini, ke dalam bentuk surat undangan dinas dan surat undangan pribadi.

2.3.1 Kalimat Majemuk Setara

Secara lebih mendalam, kalimat majemuk setara (koordinatif), menurut Sugono, (1986:121), dapat didefinisikan sebagai struktur kalimat yang di dalamnya terdapat, sekurang-kurangnya, dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal. Dalam bagian ini pembahasan kata majemuk setara hanya dilakukan pada laras bahasa surat undangan dinas karena kalimat majemuk setara dalam surat undangan pribadi tidak ditemukan.

- (1) ... Kumpulan cerpen tersebut memuat 30 cerpen nominasi *dan* salah satu cerpen Saudara termuat di dalamnya.
- (2) Kami mohon agar Saudara membaca buku itu *serta* memberikan tanggapan atau masukan

Kalimat majemuk setara (1) terdiri atas dua kalimat tunggal, yaitu (a) *kumpulan cerpen tersebut memuat 30 cerpen nominasi* dan (b) *salah satu cerpen Saudara termuat di dalamnya*. Kedua kalimat tunggal pada (1) dihubungkan dengan konjungsi *dan*. Kalimat majemuk setara (2) juga terdiri atas dua kalimat tunggal, yaitu (a) *kami mohon agar Saudara membaca buku itu* dan (b) *memberikan tanggapan atau*

masuk... Kalimat majemuk pada (2) ditandai dengan konjungsi *serta*. Akan tetapi, pada unsur kedua kalimat (2) terdapat pelepasan subjek, yang sebenarnya harus diisi subjek *Saudara*.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan ternyata kalimat majemuk yang ditemukan sangat sederhana, yaitu berupa kalimat majemuk setara koordinatif.

2.3.2 Kalimat Mejemuk Bertingkat

Sugono (1986:132) mengatakan bahwa kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti (*utama*) dan satu atau beberapa kalimat dasar (*tunggal*) yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu.

Dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat dua hal yang perlu dicermati, yaitu (a) induk kalimat dan (b) anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri seperti halnya kalimat tunggal yang terdapat dalam kalimat majemuk setara, sedangkan anak kalimat adalah unsur yang tidak dapat diperlakukan sebagai kalimat, tetapi hanya sebagai pengisi fungsi sintaksis keterangan. Jadi, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri seperti halnya kalimat tunggal.

Dalam data surat undangan diperoleh kalimat majemuk bertingkat seperti (1) – (6).

- (1) *Mengingat* pentingnya acara, kehadiran Saudara tepat waktu sangat kami harapkan.
- (2) *Dalam* rangka mempersiapkan acara promosi doktor bagi mahasiswa calon doktor di PS Linguistik, Kedokteran, dan Kajian Budaya, kami mengundang Saudara dalam rapat yang akan diselenggarakan pada
- (3) *Sehubungan dengan* dilaksanakannya final lomba musikalisasi HUT ke-55 *Bali Post*, kami mengundang

Bapak untuk menyaksikan penampilan 10 grup/sanggar yang berhasil menjadi finalis

- (4) *Menunjuk* Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 014/TK/Tahun 2003 ... Saudara mendapat Anugrah Tanda Kehormatan "Satyalancana" dari Presiden Republik Indonesia.
- (5) *Untuk* menghormati jasa-jasa beliau sebagai salah seorang pemikir Hindu, Program Magister (S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia akan menyelenggarakan seminar internasional.
- (6) Kami sangat berterima kasih *jika* Bapak/Ibu ikut menyumbang pemikiran dalam bentuk tertulis yang akan kami dokumentasikan dalam bentuk buku.

Contoh (1)–(6) adalah kalimat majemuk bertingkat dengan penanda konjungsi *mengingat* (1), *dalam* (2), *sehubungan dengan* (3), *menunjuk* (4), *untuk* (5), dan *jika* (6). Kalimat majemuk bertingkat (1)–(6) dapat dipolakan dengan mendeskripsikan induk kalimat dan anak kalimat. Berdasarkan data, kalimat majemuk bertingkat dalam surat undangan kebanyakan berpola AK/IK, seperti (1)–(5), sedangkan (6) berpola IK/AK. Pemolaannya dapat dilihat pada (1a)–(6a) berikut.

(1a) *Mengingat pentingnya acara, kehadiran Saudara tepat*
AK

waktu sangat kami harapkan.

IK

(2a) *Dalam rangka mempersiapkan acara promosi doktor bagi mahasiswa calon doktor di PS Linguistik, Kedokteran, dan Kajian Budaya, kami mengundang Saudara dalam*

AK

IK

rapat yang akan diselenggarakan pada

- (3a) *Sehubungan dengan dilaksanakannya final lomba musikalisasi HUT ke-55 Bali Post, kami mengundang*
AK IK
Bapak untuk menyaksikan penampilan 10 grup/sanggar yang berhasil menjadi finalis
- (4a) *Menunjuk Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 014/TK/Tahun 2003 ... Saudara mendapat*
AK IK
Anugrah Tanda Kehormatan "Satyalancana" dari Presiden Republik Indonesia.
- (5a) *Untuk menghormati jasa-jasa beliau sebagai salah seorang pemikir Hindu, Program Magister (S2) Ilmu Agama dan*
AK IK
Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia akan menyelenggarakan seminar internasional.
- (6a) **Kami sangat berterima kasih jika Bapak/Ibu ikut**
IK AK
menyumbang pemikiran dalam bentuk tertulis yang akan kami dokumentasikan dalam bentuk buku.

Pola kalimat majemuk bertingkat dalam laras bahasa surat undangan dapat juga dideskripsikan berdasarkan peran anak kalimat. Pemolaan peran anak kalimat disesuaikan dengan jenis konjungsi sebagai pemarkah kalimat majemuk bertingkat. Dengan demikian, konjungsi *mengingat* pada kalimat (1) dan *menunjuk* pada kalimat (4) memerani anak kalimat keterangan pengacuan, konjungsi *dalam* pada kalimat (2) memerani anak kalimat keterangan yang menyatakan hal cara, konjungsi *sehubungan dengan* pada kalimat (3) memerani anak kalimat keterangan yang menyatakan cara, konjungsi

untuk pada kalimat (5) memerani anak kalimat keterangan yang menyatakan tujuan, dan konjungsi *jika* pada kalimat (6) memerani anak kalimat keterangan yang menyatakan syarat.

Pola 3
Jenis Anak Kalimat dalam Surat Undangan Dinas

No.	Jenis Peran Anak kalimat	Konjungsi Pemarkah
1	Anak kalimat keterangan pengacuan	Mengingat, menunjuk
2.	Anak kalimat keterangan cara	Dalam, sehubungan dengan
3.	Anak kalimat keterangan tujuan	Untuk
4.	Anak kalimat keterangan syarat	Jika

3. Simpulan

Tulisan surat undangan dinas di Denpasar kali ini mengkhususkan permasalahan pada pola kalimat yang digunakan dalam surat undangan dinas. Dari beberapa sumber data ditemukan 3 jenis pemakaian kalimat, yaitu (1) kalimat tunggal, (2) kalimat urutan, dan (3) kalimat majemuk. Kalimat-kalimat seperti itu memang sudah umum digunakan dalam laras bahasa surat undangan dinas. Yang menarik, dalam sumber data ditemukan juga jenis kalimat minor berpola K(eterangan) + P(redikat) yang masih dapat dirujuk bentuk lengkapnya. Selain itu, ditemukan pula pemakaian kalimat seperti ... *Terima kasih*. yang tidak dapat dirujuk bentuk lengkapnya. Menurut kaidah, kedua bentuk yang terakhir tidak dianjurkan pemakaiannya dalam laras bahasa surat undangan dinas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman *et al.* 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alwi, Hasan *et al.* 1991. *Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.71/1993 tentang "Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas". Jakarta: ANRI.
- Lumintintang, Yayah B. 1995. "Bahan Penyuluhan Laras Bahasa Surat-Menyurat Dinas". Penataran Nasional Penyuluh Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Partami, Ni Luh *et al.* 2004. "Pemakaian Bahasa Indonesia Laras Administrasi Perkantoran di Bali". Denpasar: Proyek Pembinaan & Pengembangan Bahasa Indonesia dan Daerah Bali, Balai Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugema, Bambang. 1985. "Bahasa Administrasi sebagai Bahasa Pelayanan". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia V*. Anton M. Moeliono (ed.). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sugono, Dendy. 1993. "Pelesapan Subjek dalam Bahasa Indonesia". (Disertasi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suparwa, INyoman. 1989. "Pemakaian Bahasa Indonesia pada Surat Dinas Universitas Udayana". Denpasar: Universitas Udayana.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CAMPUR
KODE DALAM DHARMA WECANA AGAMA HINDU
DI KOTA DENPASAR**

I Nengah Budiassa

1. Latar Belakang

Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah besar yang ada di Indonesia. Sebagai bahasa daerah, bahasa Bali memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bahasa Bali, interaksi dapat terjadi, baik dalam situasi formal maupun informal. Situasi formal menyangkut pembicaraan serius, resmi, dan situasi budaya, sedangkan situasi informal dapat dilihat pada pembicaraan aspek-aspek kehidupan yang populer. Peristiwa pembicaraan yang tidak menegangkan dapat terjadi dalam suasana santai (Pride, 1971:4). Fungsi dan kedudukan bahasa daerah itu dijelaskan secara lebih lengkap dan terperinci dalam Politik Bahasa Nasional (Halim, 1980: 151).

Sehubungan dengan fungsi dan kedudukan bahasa daerah tersebut, bahasa daerahlah yang dikenal lebih dahulu oleh sebagian besar suku tertentu sejak usia kanak-kanak. Bahasa daerah juga dipakai anak-anak dalam berinteraksi verbal dengan lingkungan sosial budayanya. Dengan demikian, bahasa daerah telah digunakan sebagai bahasa ibu dan bahasa pertama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia di berbagai daerah, khususnya di daerah pedesaan.

Bahasa Bali sebagai bahasa ibu bagi penutur Bali tidak terlepas dari norma-norma pemakaian bahasa yang berlaku pada masyarakat. Norma-norma pemakaian bahasa tersebut sering diistilahkan dengan tatakrama sosial berbahasa. Masyarakat akan menjadi kacau apabila dalam kehidupan

berbahasa tidak ada norma-norma yang membatasi.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi telah membawa perkembangan yang begitu besar pada kehidupan komunikasi masyarakat Bali. Namun, kemajuan ini bukan berarti melemahkan fungsi dan kedudukan bahasa Bali, melainkan memperkokoh keberadaan bahasa Bali sebagai sarana komunikasi lokal dan terpelihara dengan baik, terutama untuk mengekspresikan budayanya. Selanjutnya, bahasa Bali sebagai salah satu unsur pemer kaya kosakata bahasa Indonesia, masyarakat penuturnya tetap berkewajiban memelihara dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Situasi kebahasaan yang demikian mengakibatkan penutur Bali menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Bali dengan baik. Ini berarti penutur Bali berkesempatan menukarkan bahasa pada saat berinteraksi verbal. Dengan kata lain, fenomena campur kode cenderung terjadi pada penutur yang menguasai dua bahasa atau lebih. Fishman (1971:17) menegaskan bahwa dalam masyarakat yang anekabahasa, biasanya untuk topik-topik tertentu lebih tepat disalurkan melalui bahasa tertentu, sedangkan untuk topik yang lain lebih tepat diungkapkan dengan bahasa yang lain.

Setiap masyarakat bahasa di mana pun berada tidak ada seorang pembicara menggunakan hanya satu ragam bahasa dalam setiap kesempatan berbicara (Anwar, 1990:41). Demikian halnya masyarakat tutur bahasa Bali di Denpasar yang mengenal dua bahasa atau lebih sudah tentu dapat menggunakan bahasa secara silih berganti bergantung pada bermacam-macam situasi. Lebih-lebih dalam situasi *dharma wecana* agama Hindu yang pendengar atau pesertanya berasal dari beraneka ragam profesi atau golongan masyarakat tertentu, seperti pegawai negeri sipil, guru-guru, pegawai hotel, dan masyarakat umum. Keanekaragaman peserta

atau pendengar seperti ini memberi peluang terjadinya pemakaian dua bahasa atau lebih agar komunikasi antara penceramah dan peserta atau pendengar dapat berjalan dengan lancar. Situasi kebahasaan semacam itu, tentu merupakan lahan yang sangat subur bagi peneliti bidang sosiolinguistik, khususnya yang berkaitan dengan campur kode. Oleh karena itu, penelitian capur kode bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, khususnya dalam *dharma wecana* agama Hindu perlu dilakukan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ada satu permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya capur kode antara penceramah pendengar dalam *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar.

Penelitian tentang campur kode bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia dalam *dharma wecana* agama Hindu di Denpasar mempunyai dua tujuan, yaitu (1) tujuan umum dan (2) tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang alih kode bahasa Bali ke dalam bahasa Indonesia dalam *Dharma Wecana* agama Hindu di Denpasar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penceramah dan peserta atau pendengar bercampur kode.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode digunakan teori pendekatan etnografi komunikasi Hymes (1972). Dalam masyarakat multilingual tidak terlepas dari penggunaan dua bahasa atau lebih sehingga memungkinkan menjadi masyarakat yang berdwibahasa. Kedwibahasaan yang dimiliki oleh seorang warga masyarakat menyebabkan terjadinya pemilihan bahasa pada saat berkomunikasi. Pemilihan bahasa sepenuhnya bergantung kepada faktor partisipan, tujuan, pesan, suasana, topik, dan saluran yang digunakan

dalam pembicaraan sehingga dapat dipakai untuk menelaah penggunaan bahasa.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode dalam *Dharma Wecana* Agama Hindu di Denpasar

Secara garis besarnya, faktor penyebab terjadinya campur kode dapat dibedakan atas dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal (Kachru, 1978:36). Demikian pula halnya dengan campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar. Kedua aspek tersebut dapat mempengaruhi terjadinya fenomena campur kode dalam sebuah tuturan. Aspek eksternal merupakan potensi di luar bahasa, yaitu mengungkap potensi kebahasaan penutur, baik dalam penguasaan kebahasaan maupun psikologis penutur yang tereksresi lewat campur kode tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sikap komunikan dan komunikator dalam menerima dan menyampaikan pesan, baik dalam situasi resmi maupun tidak resmi. Aspek internal merupakan kebalikannya, yaitu terkait dengan potensi bahasa itu sendiri dalam keberadaannya di masyarakat. Masing-masing aspek yang dimaksud tersebut diuraikan sebagai berikut.

2.1 Aspek Eksternal

Seperti telah diuraikan di depan, bahwa aspek eksternal ini tidak terlepas dari partisipan baik komunikan maupun komunikator. Dalam hal ini partisipan yang berada di luar bahasa dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, serta konteks situasi tertentu merupakan faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya campur kode. Hal itu berarti pendidikan dan pengalaman seseorang sangat menentukan pilihan bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi terhadap masyarakatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa yang terpenting dalam peristiwa komunikasi adalah segala bentuk pesan yang disampaikan dalam tuturan itu dapat dipahami maksud dan artinya. Dengan kata lain, pesan yang diucapkan dan didengarkan oleh komunikator dan komunikan dapat saling memahami tuturan tersebut sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Hal itu juga terlihat pada diri penutur (penceramah) dalam sebuah tuturan yang disertai dengan fenomena campur kode dalam komunikasi yang terjadi pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar. Dengan demikian, gejala campur kode yang ditemukan pada pemakaian bahasa Indonesia oleh penceramah itu memancarkan kompleksitas pribadi penutur (penceramah) yang merupakan sikap dasar manusia. Berbagai kompleksitas pribadi penutur yang diwujudkan dalam bentuk campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa Bali inilah merupakan faktor eksternal, khususnya faktor kejiwaan penutur. Dalam hal ini secara eksternal yang menyebabkan terjadinya fenomena campur kode itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tujuan penutur, dan pendidikan penutur.

2.1.1 Tujuan Penutur

Dalam sebuah tuturan, setiap penutur yang melakukan aktivitasnya dalam bertindak tutur selalu memiliki tujuan saat menyampaikan pesan tersebut kepada lawan tutur. Dalam menyampaikan pesan itu seorang penutur seringkali dipengaruhi oleh pengetahuan bahasa yang dikuasainya. Hal itu berarti bahwa dalam aktivitas bertindak tutur, seorang penutur akan memanfaatkan bahasa-bahasa yang dikuasainya itu untuk mewujudkan tujuannya. Sebagai konsekuensinya, akan terjadi campur kode yang dilandasi oleh tujuan tertentu dari penutur. Kalau dikaitkan dengan kajian ini, yaitu menyusupnya unsur bahasa Bali ke dalam tuturan bahasa Indonesia pada sebuah

kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar, yang dilandasi oleh tujuan tertentu dari penutur. Sesuai dengan data yang ada, tujuan penutur (penceramah) melakukan campur kode pada kegiatan pencerahan keagamaan itu adalah untuk (1) bergengsi, (2) bertindak sopan, (3) melucu, dan (4) menjelaskan. Masing-masing tujuan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

(1) Keinginan penutur untuk bergengsi

Berdasarkan data yang ada, fenomena campur kode yang terjadi pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar dapat terjadi dengan tujuan agar penutur kelihatan lebih bergengsi. Bergengsi dimaksud adalah rasa ingin dianggap terpelajar atau berprestise. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut penutur terdorong untuk menggunakan bahasa lain. Campur kode yang disebabkan oleh tujuan penutur untuk bergengsi umumnya berupa pemakaian unsur bahasa asing (Inggris). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan wacana berikut ini.

W4

Partisipan : Para Pemangku dan Warga Masyarakat
Seting : di Balai Desa Pekraman Ubung
Topik : Hidup Bermasyarakat dan Beragama

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama *tiang* yakin bapa dan ibu yang ada di Bali Desa ini pernah mendengar atau membaba berita di surat kabar tentang banyak kasus -kasus adat yang kadang-kadang sulit mencari pemecahannya. Misalnya, ada krama *kasepekang* karena melanggar *awig-awig* adat. Nah, menurut *tiang* cara pemecahanyang terbaik adalah dengan *win-win solution* sehingga persoalan tidaka akan berlarut-larut.

Fenomena campur kode yang memperlihatkan adanya tujuan penutur agar kelihatan bergengsi adalah pemakaian istilah //win-win solution// dalam tuturan tersebut. Sebenarnya istilah tersebut dapat diganti dengan istilah 'pemecahan yang menguntungkan kedua belah pihak' dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam tuturan itu penutur menyisipkan istilah bahasa Inggris agar kelihatan bahwa penutur (penceramah) sebagai kaum terpelajar dan berprestise. Dengan demikian, fenomena campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar disebabkan oleh tujuan penutur (penceramah) untuk bergengsi.

(2) Keinginan penutur untuk bertindak sopan

Selain untuk bergengsi, fenomena campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar juga dapat disebabkan oleh tujuan penutur untuk bertindak sopan. Bertindak sopan yang dimaksud di sini adalah pemakaian bahasa oleh penutur dengan tujuan menjaga perasaan lawan bicara supaya tidak tersinggung atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Campur kode dengan tujuan untuk bertindak sopan ini tampak dari penyisipan unsur-unsur bahasa Bali ragam halus ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan wacana berikut ini.

W5

Partisipan : Warga Desa Pekraman Tegal Kerta
Seting : di Balai Desa Tegal Kerta
Topik : Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan

Terkait dengan pelaksanaan Hari Raya *Galungan* dan *Kuningan*, sebenarnya kedua hari raya besar itu masih ada kaitannya dengan hari raya *Tumpek Wariga* atau *Tumpek Pengarah* atau *Tumpek Pengatag*. Nah, *mangda*

patut pelaksanaannya, *mangkin tiang* menjelaskan apa sebenarnya makna hari raya Tumpek Wariga tersebut.

Fenomena campur kode yang terdapat pada data di depan tampak dari penyisipan unsur bahasa Bali, yaitu */mangda/*, */patut/*, */mangkin/*, dan */tiang/*. Keempat kata yang menyisip itu dapat dikategorikan sebagai bahasa Bali ragam halus. Pemakaian ragam bahasa Bali halus ini dimaksudkan agar lawan bicara tidak merasa tersinggung. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi bahasa Bali ragam halus pada masyarakat Bali, yaitu digunakan untuk menghormati seseorang. Dengan demikian, jelaslah fenomena campur kode yang terjadi pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar oleh tujuan penutur (penceramah) untuk bertindak sopan.

(3) Keinginan penutur untuk membuat lelucon

Fenomena campur kode pada *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar dapat juga disebabkan oleh tujuan penutur (penceramah) untuk membuat lelucon. Membuat lelucon maksudnya adalah pemakaian bahasa oleh penutur dengan tujuan menghibur pendengar dengan guyonannya agar pendengar merasa senang dan tidak bosan mendengarkan materi yang diberikan oleh penceramah. Kata-kata yang digunakan itu, pada umumnya berupa penyisipan kata-kata bahasa Bali. Untuk lebih jelasnya perhatikan kutipan wacana berikut ini.

W6

Partisipan : Warga Desa Pakraman Kesiman
Setting : Wantilan Desa Pakraman Kesiman
Topik : Upacara "Ngenteg Linggih"

... Dalam setiap kegiatan upacara yang berskala besar, sudah pasti ada panitia yang mengaturnya. Lebih-

lebih tingkat upacara yang disebut *Ngenteg Linggih di Pura Kahyangan Jagat* yang sudah tentu umatnya banyak. Pelaksanaan upacara semacam ini biasanya menghabiskan banyak dana yang terkumpul dari umatnya dan masyarakat yang *mepunia* baik berupa barang maupun uang. Nah, begitu selesai upacara ini, sisa barang-barang yang tidak habis dipakai upacara, biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai daya *juang* yang sangat tinggi. Begitu pula dalam hal pembelian barang-barang untuk keperluan upacara, bagi panitia yang imannya rapuh sering menjalankan jurus-jurus ilmu *kebatinan* untuk kepentingan pribadinya. Pekerjaan seperti ini sudah tentu melanggar hukum dan bertentangan dengan ajaran agama....

Fenomena campur kode di atas dapat dilihat pada penyusupan kata */juang/* dan */kebatinan/*. Pada wacana itu, kata */juang/* yang dimaksud oleh penutur bukanlah 'berjuang' dalam bahasa Indonesia melainkan */juang/* dalam bahasa Bali yang berarti 'ambil'. Dalam konteks ini, panitia yang memiliki daya */juang/* tinggi berarti dia suka mengambil atau menggelapkan barang yang masih bersisa. Begitu pula halnya dengan kata */kebatinan/* yang dimaksud oleh penutur dalam wacana itu, bukanlah berarti 'yang terkait dengan tenaga dalam' melainkan cara dia mencari untung dalam pembelian barang keperluan upacara itu'. Kesan humor itu muncul setelah penutur menjelaskan makna kata */juang/* dan */kebatinan/* yang diplesetkan dan para pendengar baru merasakan ada kelucuan yang diucapkan oleh penutur (penceramah). Dengan kata lain, jelaslah penyisipan kata *juang* dan *kebatinan* pada tuturan bahasa Indonesia itu bertujuan agar timbul kesan humor. Jadi, pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar

terjadi campur kode yang disebabkan oleh tujuan penutur untuk melucu.

(4) Keinginan penutur menjelaskan

Fenomena campur kode yang terjadi pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar dapat disebabkan oleh tujuan penutur untuk menjelaskan. Hal ini terjadi apabila unsur-unsur bahasa pengantar (bahasa Indonesia) terdapat istilah yang kurang dipahami sehingga perlu dijelaskan dengan menggunakan bahasa Bali. Dengan demikian, campur kode pun tidak dapat dihindari. Untuk lebih jelasnya adanya fenomena campur kode yang disebabkan oleh tujuan penutur untuk menjelaskan dapat disimak pada cuplikan wacana berikut ini.

W7

Partisipan : Warga Masyarakat Br. Titih
Setting : Balai Banjar Titih
Topik : Upacara Pitra Yadnya

... Setelah mayat selesai dibakar dan semua sudah menjadi abu, pasti saja ada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti tulang gigi dan tulang-tulang keras lainnya tidak hancur sama sekali. Tahapan berikutnya yaitu adalah *ngereka* atau membuat sketsa tubuh manusia dari kumpulan abu tadi. Kemudian abu dimasukkan ke dalam periuk kecil diikuti dengan upacara dan sesudah itu abu yang sudah diupacarai itu *rarung* atau dibuang ke sungai atau ke laut...

Berdasarkan kutipan wacana di atas, tampak bahwa campur kode yang disebabkan oleh tujuan penutur untuk menjelaskan adalah penyisipan unsur bahasa Bali ke dalam tuturan bahasa Indonesia, seperti: */ngereka/* dan */rarung/*. Penyisipan kata */ngereka/* pada kutipan di atas jelas bertujuan

untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang dipahami oleh masyarakat. Kesan menjelaskan tampak dari pemberian uraian makna kata */ngereka/* (bahasa Bali), yaitu 'membuat sketsa tubuh manusia' dalam bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan pemakaian kata *rarung* (bahasa Bali) dengan makna 'buang' dalam bahasa Indonesia pada kutipan wacana di atas merupakan fenomena campur kode dengan maksud penutur memberikan penjelasan kepada pendengar. Dengan demikian, fenomena campur kode yang terjadi pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap sulit bagi pendengarnya.

2.1.2 Pendidikan Penutur

Selain tujuan penutur, faktor pendidikan penutur juga merupakan faktor pendukung terjadinya fenomena campur kode. Pendidikan penutur secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat penguasaan bahasanya. Hal itu berarti bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dan kemampuan kedwibahasaan seseorang. Jadi, kalau dikaitkan dengan kajian ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penutur merupakan faktor pendukung fenomena campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar.

Kalau diperhatikan secara lebih seksama, tingkat pendidikan masyarakat kota Denpasar yang ada saat ini kebanyakan masih berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri banyak anggota masyarakat Denpasar yang bekerja di sektor formal atau pemerintahan dan nonformal, seperti pegawai swalayan, toko, pabrik, garmen, hotel, dan restoran yang berpendidikan SMA dan bahkan ada berpendidikan perguruan tinggi. Namun, kalau dilihat dari segi kuantitas, jumlah dari kedua tingkat pendidikan itu masih lebih kecil

dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk kota Denpasar. Berbeda halnya dengan tingkat pendidikan para penceramah (narasumber), mereka pada umumnya berpendidikan sarjana. Hal itu mengisyaratkan ada perbedaan tingkat pendidikan antara masyarakat sebagai peserta ceramah dengan para penceramah. Adanya perbedaan semacam itu berpengaruh pula terhadap penggunaan bahasa antara masyarakat sebagai pendengar dan penceramah.

Hal itu tampak pada penyisipan kata asing *win-win solution* ke dalam tuturan bahasa Indonesia pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar. Penyisipan kosakata asing seperti itu merupakan fenomena campur kode yang dimungkinkan dilakukan oleh penceramah agama yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau sama dengan dengan masyarakat sebagai pendengarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berpeluang melakukan campur kode dalam sebuah tuturan, khususnya campur kode penyisipan kosakata asing.

2.2 Aspek Internal

Di depan telah dideskripsikan aspek eksternal penyebab terjadinya campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar. Selanjutnya, pada bagian ini dideskripsikan aspek internalnya. Aspek internal ditentukan oleh potensi bahasa yang bersangkutan sebagai medium komunikasi. Hal ini berbeda dengan aspek eksternal yang melihat penutur sebagai penyebab terjadinya campur kode. Jadi, dalam aspek internal ini melihat bahasa sebagai sistem kode yang dapat menyebabkan terjadinya campur kode (Appel dalam Arnold, 1982:124). Dikaitkan dengan kajian ini, aspek internal maksudnya adalah penyisipan unsur bahasa Bali ke dalam tuturan bahasa Indonesia yang disebabkan oleh ketepatan rasa (makna) dan kurangnya

kosakata dalam bahasa Indonesia. Masing-masing aspek itu diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Ketepatan Rasa (Makna)

Fenomena campur kode pada kegiatan *dharmawacana* agama Hindu di Kota Denpasar terjadi untuk memenuhi ketepatan rasa (makna). Maksudnya adalah ada kosakata dalam bahasa Indonesia yang dirasakan belum sesuai maknanya sehingga perlu diungkapkan dalam bahasa Bali. Hal itu dilakukan agar komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Komunikasi dikatakan berlangsung dengan lancar apabila penutur-penerima saling memahami dan mengerti setiap kata yang digunakan dalam sebuah tuturan. Dengan kata lain, jika seseorang menyampaikan pesan "A" maka pesan yang diterima oleh lawan bicara haruslah "A". Oleh karena itu, penutur akan berusaha menyampaikan pesan itu sebaik mungkin agar terjadi ketepatan rasa (makna). Dalam upayanya itu banyak penutur yang memanfaatkan kosakata bahasa ibunya. Dengan demikian, fenomena campur kode tidak dapat dihindari. Gejala campur kode semacam itu dapat disimak dalam kutipan wacana berikut ini.

W8

Partisipansi : Warga Masyarakat Banjar Margajati
Setting : Balai Banjar Margajati
Topik : Pelaksanaan *Upacara Manusa Yadnya*

....Berbicara tentang upacara *Manusa Yadnya* dalam agama Hindu di Bali banyak macam dan ragamnya. Dari manusia itu ada dalam kandungan sampai pada usia sudah cukup untuk melaksanakan pernikahan, dia sudah dibuatkan upacara. Khusus dalam tahapan upacara pernikahan, terutama dalam mengambil calon pengantin perempuan ada yang disebut dengan istilah *mlegandang* dalam adat dan agama Hindu Bali....

Makna kata bahasa Bali */mlegandang/* ini dapat diartikan 'melarikan gadis untuk dinikahi atau dinikahkan. Yang jelas, gadis yang dilarikan itu memiliki dua kemungkinan. Pertama, karena alasan orang tua tidak merestui pernikahan yang akan dilangsungkan, atau kedua, kemungkinan karena si gadis memiliki lelaki pujaan lain atau cintanya masih terbagi sehingga mereka mencari jalan untuk dapat melangsungkan pernikahan seperti itu. Seandainya penceramah mencarikan padanan */mlegandang/* dengan 'kawin lari', kadar ketepatan maknanya terasa kurang pas, bahkan bisa menimbulkan penafsiran yang meleset dari hakikat makna sesungguhnya dari kata tersebut, seperti 'kawin sambil berlari', 'mengambil gadis dengan cara berlari' Dengan demikian, penceramah melakukan campur kode dengan menyisipkan istilah bahasa Bali ke dalam tuturan bahasa Indonesia untuk memenuhi ketepatan rasa (makna).

2.2.2 Kurangnya Kosakata

Fenomena campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar dapat juga disebabkan oleh faktor kurangnya kosakata bahasa Indonesia yang belum mewahanai konsep bahasa lain, khususnya istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan adat dan agama Hindu di Bali. Hal itu mengindikasikan bahwa padanan yang terdapat di dalam bahasa Indonesia tersebut kurang sesuai untuk mewahanai konsep yang terdapat dalam bahasa Bali. Akibatnya, ada kecenderungan penutur (penceramah) untuk menggunakan istilah dalam bahasa Bali. Dengan demikian, terdapat fenomena campur kode sebagai akibat kurangnya kosakata bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai fenomena campur kode tersebut dapat dilihat pada cuplikan wacana berikut ini.

W9

Partisipan : Warga Masyarakat Banjar Kerthasari
Seting : Balai Banjar Kerthasari
Topik : *Pecaruan Saat Pengrupukan*

.... sehari sebelum Hari Raya Nyepi dikenal dengan hari *pengerupukan*. Pada hari ini, umat Hindu melaksanakan serangkaian upacara menjelang Nyepi, diawali dengan *maprani*, setelah itu pada tengah hari sekitar pukul 12.00 siang dilaksanakan upacara *pecaruan* dengan tujuan *nyomya* sang bhuta kala agar tidak mengganggu aktivitas umat manusia sehari-hari. ...

Berdasarkan kutipan wacana di depan tampak bahwa gejala campur kode sebagai akibat kurangnya kosakata bahasa Indonesia itu dapat disimak pada pemakaian kata */pengerupukan/*. Istilah */pengerupukan/* dalam bahasa Bali ini belum ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Istilah */pengerupukan/* dapat didefinisikan dalam bentuk parafrasa, yaitu berequivalen dengan 'melaksanakan upacara penyucian alam semesta beserta isinya'. Demikian pula halnya dengan kata bahasa Bali *maprani*, *pecaruan*, dan *nyomya* dapat didefinisikan dengan parafrase, yang secara berturut-turut berequivalen dengan 'sembahyang bersama pada hari-hari suci tertentu', 'memberikan santapan kepada *bhuta kala* atau roh halus agar tidak mengganggu kehidupan manusia', dan 'mengembalikan sang *bhuta kala* atau makhluk halus ke dunianya masing-masing'. Dengan kata lain, mengingat belum ditemukannya padanannya dalam bahasa Indonesia, penutur (penceramah) memiliki kecenderungan untuk menggunakan istilah dalam bentuk bahasa Bali. Jadi, fenomena campur kode sebagai akibat kurangnya kosakata bahasa Indonesia terjadi pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Kota Denpasar.

3. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penyebab terjadinya campur kode pada kegiatan *dharma wecana* agama Hindu di Denpasar, secara garis besar dibedakan atas dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ditentukan oleh tujuan penutur dan tingkat pendidikan penutur. Tujuan penutur dapat dirinci lagi menjadi empat macam, yaitu, (a) menyatakan gengsi penutur, (b) bertindak sopan, (c) membuat lelucon, dan (d) menjelaskan. Faktor eksternal ditentukan oleh ketepatan rasa (makna) dan kurangnya kosakata bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSATAKA

- Appel, R. 1976. *Sociolinguistics*. Utrecht: Het Spectrum.
- Bright, W. (Ed.). 1992. *Sociolinguistics*. Mouton: The Hague.
- Chaer, Abdul. 1995. *Sosiolinguistik, Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fasold, Ralph. 1984. *Sociolinguistics of Society*. New York: Basil Blackwell.
- Fishman, J.A. (Ed.) 1972. *Sociolinguistics: A Brief Introduction*. Rowley Mass: New House
- _____, 1976. "The Relationship between Micro and Macro Sociolinguistics in The Study of Who Speaks, What Language, to Whom and When" dalam J.B. Pride dan J. Holmes, (Ed.) *Sociolinguistics*, 15–32. England: Penguin Books.
- Grosjean, Francois. 1982. *Life with Two Languages*. England: Havard University Press.
- Gumpertz, J.J. 1982. *Discourse Strategies*. New York: Cambridge University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*, Jilid 1 dan 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Exploration in The Function of Language*. London: Edward Arnold.
- _____, 1994. *Language, Context, and Text: Aspects of Language in A Social-Semiotic Perspective*. Victoria: Deakin University Press.
- Hymes, Dell. 1976. " On The Communicative Competence" dalam J.B. Pride and B. Holmes, (Eds.) *Sociolinguistics*, 103. England: Penguin Book Ltd.

- Nababan, P.W.J. 1993. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pride, J.B. 1971. *Formal and Informal Language*. Wellington: The Victoria University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

ANEKA MAKNA ADJEKTIF BENTUK ULANG SECARA MORFEMIS DALAM BAHASA BALI

Ni Luh Komang Candrawati

1. Pendahuluan

Sampai saat ini bahasa Bali masih tetap tumbuh dan berkembang. Bahasa Bali berfungsi sebagai media komunikasi bagi para penuturnya untuk mempelajari, menghayati, dan mengungkapkan nilai-nilai budaya Bali. Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Bali berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam lingkungan keluarga, alat pengembangan bahasa dan budaya daerah, serta sebagai alat pengembangan bahasa nasional (bdk. Bagus, 1988:13).

Selain itu, daerah Bali adalah daerah pusat pariwisata yang banyak bersentuhan dengan kebudayaan asing. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah bahasa Bali mendapat perhatian yang lebih besar dari para ahli bahasa. Pada saat ini penelitian bahasa Bali semakin meningkat setelah Pusat Bahasa menggalakkan penelitian bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Dari sejumlah penelitian tentang bahasa Bali yang telah dilakukan, berikut ini hanya sebagian kecil disebutkan, terutama yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Hasil-hasil penelitian bahasa Bali yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, di antaranya sebagai berikut.

(a) *Tata Bahasa Bali* (1983) oleh Warna dkk.

(b) *Tata bahasa Baku Bahasa Bali* (1966) oleh Sulaga dkk.

Kedua buku tersebut tidak secara khusus membicarakan adjektif bentuk ulang dalam bahasa Bali. Adjektif

bentuk ulang pada kedua buku tersebut hanya disinggung sepintas dalam subbab, Makna Kata Ulang. Makna kata ulang dalam kedua buku tersebut, yaitu 'menyatakan sangat, mengeraskan pengertian, atau benda yang menjadi inti frase', contohnya *adeng-adeng* 'pelan-pelan' dan *belog-belog* 'bodoh-bodoh'. Selain itu, adjektif bentuk ulang juga disinggung dalam Subbab Menyatakan Tingkat Paling, contohnya *sejegang-jegeg* 'secantik-cantik' dan *sesiteng-siteng* 'sekuat-kuat' (Warna, 1983:60 – 61; Sulaga, 1996:165 – 166).

Hasil penelitian seperti itu telah menampakkan pengaruhnya terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Bali. Namun, dengan hal seperti itu bukan berarti bahasa Bali tidak perlu diteliti lagi. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini akan dibicarakan masalah adjektif dengan judul "Aneka Makna Adjektif Bentuk Ulang secara Morfemis dalam Bahasa Bali".

Tulisan ini menggunakan teori struktural. Teori ini memiliki konsep dasar yang memandang bahasa sebagai objek penelitian yang organik, yang memiliki struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikal (Bloomfield, 1956). Di samping itu, bahasa selalu memiliki bentuk dan arti. Kedua aspek itu perlu diberi perhatian yang seimbang seperti yang dianjurkan oleh Lyons (1977:537). Teori struktural pertama kali dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Kerangka teori ini pada mulanya berupa kumpulan kuliah tentang linguistik umum, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Cours de Linguistique Generale* oleh beberapa mahasiswanya pada tahun 1916 (Saussure, 1977; terjemahan Hidayat, 1988:3).

Selanjutnya, Saussure (1977:115) mengatakan bahwa tanda bahasa merupakan wujud psikis, tidak mempertimbangkan wujud dari *parole*. Tanda bahasa dikatakan mempunyai dua muka yang tidak dapat dipisahkan, yaitu konsep *signifie* yang 'ditandai' atau

'petanda', dan citra akustis adalah *signifiant* yang 'menandai' atau 'penanda'.

Saussure (1977:122) juga mengatakan bahwa bahasa sebagai relasi sintagmatis dan paradigmatis sistem itu terjadi dari tingkat-tingkat struktur. Pada tiap-tiap tingkat terdapat unsur-unsur yang saling berkontras dan saling berkombinasi untuk membentuk satuan-satuan yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip perstrukturannya pada tiap tingkat pada dasarnya sama, yakni mencari sistem (*langue*) tersebut dari kenyataan konkret (*parole*).

Selain itu, Saussure (1977) juga mengemukakan dikotomi sinkronik dan diakronik serta pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Dalam tulisan ini yang akan diterapkan adalah penelitian yang bersifat sinkronik, yaitu memusatkan penelitian bahasa pada kurun waktu tertentu tanpa melihat unsur kesejarahannya. Dengan demikian, data yang diperoleh atau terkumpul adalah data yang bersifat kekinian.

2. Konsep

Sebelum masalah pokok dibicarakan, terlebih dahulu diutarakan mengenai pengertian adjektif dan pengertian bentuk ulang bahasa Bali. Adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda. Kata keadaan adalah kata yang menerangkan keadaan, sifat khusus atau watak suatu benda. Secara semantis kata adjektif mengungkapkan makna keadaan suatu benda. Alwi (1993:209–216) menjelaskan bahwa adjektif atau kata sifat juga dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Jika hendak berbicara tentang sesuatu, tidak akan mungkin terlepas dari pengertian sesuatu itu. Begitu pula halnya dalam pembicaraan bentuk ulang adjektif bahasa Bali, tentu tidak terlepas juga pengetahuan tentang apa itu bentuk ulang.

Ramlan (1965:22) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ulang dalam bahasa Indonesia ialah proses perulangan bentuk, baik seluruh maupun sebagian saja, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil perulangan itu disebut kata ulang, sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Bentuk dasar ialah bentuk bahasa yang menjadi dasar pembentukan bagi bentuk yang lebih besar, contohnya, antara lain *lucu-lucu*, *kecil-kecil*, dan *cantik-cantik*.

Sebelum bentuk ulang dibicarakan lebih jauh, dipandang perlu untuk memberikan sedikit pengertian yang berkaitan dengan bentuk ulang. Bentuk ulang terdiri atas dua komponen, yaitu *bentuk* dan *ulang*. Pengertian *bentuk* diartikan sebagai bangun bunyi (struktur fonologi) yang dapat diamati secara visual. *Ulang* dalam komponen *bentuk ulang* dimaksud untuk mengacu bahwa untuk menghasilkan kata, bentuk tadi harus diulang. Jadi, jelaslah bahwa jika bentuk tidak diulang, tidak akan dihasilkan kata. Sesungguhnya, kata yang dihasilkan adalah kata tunggal (*monomorfemis word*). Bentuk ulang yang bukan kata ulang adalah pengulangan satuan lingual yang bentuk dasarnya bukan kata dan belum bermakna.

Parera (1980:40-42) menyatakan bahwa bentuk ulang yang dimaksud dipakai untuk mengacu pada salah satu proses morfologis, yaitu perulangan (reduplikasi) yang menghasilkan kata ulang. Dengandemikian, dapat dipastikan bahwa bentuk yang dimaksud adalah bentuk linguistik. Bentuk ulang yang bukan kata ulang tidak memiliki bentuk dasar sehingga bentuk ulang itu tidak dapat dimasukkan ke dalam proses morfologis. Bentuk ulang yang bukan kata ulang hanya merupakan bangun bunyi belaka. Jika diperhatikan, ternyata bentuk yang diulang tadi merupakan sebuah kata dasar yang tidak mungkin ditemukan bentuk dasarnya yang dianggap sebagai bentuk yang lebih kecil.

Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan contoh bentuk ulang berikut ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Bali.

Contoh dalam Bahasa Indonesia.

Cumi-cumi merupakan makanan yang sangat enak kalau sudah diolah

Contoh dalam Bahasa Bali.

Kupu-kupuné matinggah dibungané.

'**Kupu-kupu** itu hinggap di pohon bunga'

Berdasarkan contoh kalimat di atas, ternyata bentuk ulang yang bukan kata ulang, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Bali dibangun oleh struktur fonologis (bangun bunyi) yang sepiintas menyerupai kata. Dari segi bentuk tidak berbeda dengan kata dasar. Akan tetapi, dari segi makna ternyata bentuk ulang yang bukan kata ulang bentuk dasarnya tidak bermakna. Oleh karena itu, untuk kelengkapan pembicaraan bentuk ulang yang bukan kata ulang juga akan ditinjau dari beberapa segi. Untuk lebih lengkapnya perhatikan apa yang dimaksud dengan jenis-jenis bentuk ulang yang bukan merupakan kata ulang

Meskipun disadari bahwa bentuk ulang yang bukan merupakan kata ulang tidak memiliki bentuk dasar, tetapi untuk kesejajaran istilah *bentuk dasar* dalam kata ulang dipakai istilah *unsur*. Pada dasarnya unsur dalam bentuk ulang yang bukan kata ulang dapat dibedakan dalam dua jenis. Pertama, bentuk ulang yang bukan kata ulang yang mempunyai arti leksis. Kedua, unsur bentuk ulang yang bukan kata ulang yang tidak mempunyai arti leksis.

Dalam bahasa Bali, bentuk ulang yang bukan kata ulang merupakan kata ulang yang tidak memiliki arti leksis dan tidak begitu banyak ditemukan, misalnya, *omang-omang* 'umang-umang'. Bentuk ulang yang bukan kata ulang yang memiliki arti leksis perlu diperhatikan. Arti leksis itu tidak ada kaitannya dengan arti bentuk ulang itu. Hal ini

dikemukakan dengan harapan dapat memperjelas pokok bahasan yang dibicarakan dalam tulisan ini, misalnya, *nengil-nengil nganyudang* 'diam-diam menghanyutkan'.

Berikut ini disajikan jenis bentuk ulang yang bukan kata ulang berdasarkan cara pengulangannya yang dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu (1) bentuk ulang yang bukan kata ulang, diulang seluruh; (2) bentuk ulang yang bukan kata ulang, diulang sebagian; dan (3) bentuk ulang yang bukan kata ulang yang diulang dengan perubahan bunyi.

Bentuk ulang yang bukan kata ulang diulang seluruh bentuk dasarnya dilakukan dengan mengulang unsurnya dengan utuh. Dalam hal ini tidak ada unsur yang ditanggalkan atau diubah. Apabila dibandingkan dengan kata ulang, bentuk ulang seperti ini mirip dengan perulangan dwilingga. Beberapa contoh bentuk ulang seperti itu adalah *kunang-kunang* 'kunang-kunang' *becing-becing* 'berudu'.

Berbeda halnya dengan bentuk ulang seluruh, bentuk ulang sebagian memerlukan adanya unsur yang ditanggalkan, seolah-olah ada unsur yang diulang sebagian saja. Bentuk ulang semacam itu dalam bahasa Bali terbatas, misalnya *kekawa* 'laba-laba' dan *kekupu* 'kupu-kupu'.

Bentuk ulang yang mengalami perubahan bunyi bisa terjadi pada bunyi vokal dan juga bisa terjadi pada bunyi konsonan. Berdasarkan data yang telah ditemukan, bentuk ulang yang diulang dengan perubahan bunyi dapat dilihat pada contoh, *sledat-sledét* 'melirik-lirik' atau *bulak-balik* 'pulang pergi'.

Kata ulang yang berupa kata ulang penuh adalah pengulangan satuan lingual yang bentuk dasarnya sudah berstatus kata dan bermakna. Kata ulang merupakan hasil salah satu proses morfologis, yaitu perulangan (reduplikasi). Setiap kata ulang harus mempunyai bentuk dasar. Bentuk dasar tersebut dapat berupa kata tunggal, yaitu kata yang

terdiri atas morfem dasar dan berupa kata kompleks (kata berimbuhan dan kata majemuk), yaitu kata yang terdiri atas dua morfem atau lebih (Thoir, 1981:13).

Menurut Ramlan (1983:60), ada dua prinsip untuk menentukan bentuk dasar kata ulang. Kedua prinsip dasar itu adalah sebagai berikut.

(1) Pada umumnya, perulangan tidak mengubah golongan kata. Dengan demikian, bentuk dasar dan pengulangan mempunyai golongan kata / kelas kata yang sama.

Contoh: *kapah-kapah* 'jarang-jarang', *angseg-angseg* 'sengal-sengal'

(2) Bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa.

Contoh:

kauk-kauk 'memanggil-manggil',

umah-umahan 'rumah-rumahan'

Kata ulang *kauk-kauk* bentuk dasarnya *kauk* 'panggil' dan kata ulang *umah umahan* bentuk dasarnya *umah* 'rumah'.

Bertitik tolak dari pengertian kata ulang tersebut di atas dapat dikatakan yang dimaksud dengan kata ulang adalah proses perulangan bentuk dasar yang berupa kata. Apabila ada bentuk dasar yang tidak berstatus kata mengalami proses perulangan, hasilnya bukan kata ulang. Misalnya *becing-becing* 'berudu' bentuk dasarnya *becing* yang belum berstatus kata, hal itu disebut bentuk ulang.

3. Aneka Makna Adjektif Bentuk Ulang Bahasa Bali

Selanjutnya, akan diuraikan mengenai aneka makna adjektif bentuk ulang bahasa Bali secara morfemis, yaitu arti apa saja yang ditimbulkan akibat proses morfemisnya. Dengan kata lain, tipe-tipe makna secara morfemis adalah makna kata yang dengan segera dapat diketahui tanpa

melibatkan konteks sintaktiknya (Harimurti, 1978).

Sebelum hal ini dibicarakan lebih lanjut, ada baiknya dibicarakan dua jenis arti proses morfemis secara umum. Dalam garis besarnya, makna dapat dibagi dua, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Oleh proses morfemis tertentu kata yang dikenainya mengalami perubahan dalam kedua bidang ini. Kata *magending* 'bernyanyi' yang diturunkan dari kata *gending* 'nyanyian' berbeda arti leksikalnya dari kata yang menurunkannya. Selain itu, proses yang sama secara serentak memunculkan perubahan keanggotaan kategorial kata. Namun, ada kalanya proses morfemis tidak memunculkan perubahan arti leksikal.

Seperti halnya proses morfemis lainnya, bentuk ulang juga dapat dibagi atas bentuk ulang yang mengubah arti leksikal dan arti gramatikal. Selanjutnya, data memperlihatkan bahwa arti yang dapat dihubungkan dengan perulangan tertentu dapat ditentukan dengan segera tanpa memperhatikan konteks kata ulang yang bersangkutan. Di pihak lain, ada perulangan tertentu yang artinya bergantung pada konteksnya. Perulangan yang demikian disebut perulangan yang *terikat konteks*. Perulangan yang artinya dapat ditentukan dengan segera tanpa memperhatikan konteksnya disebut dengan perulangan yang *bebas konteks*.

Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan *terikat konteks* sehubungan dengan bentuk-bentuk perulangan tertentu adalah diperlukannya konteks tertentu untuk mengetahui atau menentukan arti yang dikandung oleh bentuk-bentuk perulangan yang bersangkutan. Jika kata *tua-tua* 'tua-tua' dalam kalimat (1) dan (2) berikut diperhatikan, akan tampak bahwa konteks kata tersebutlah yang menentukan arti perulangan tersebut.

- (1) *Tiang ningalin anak tua-tua negak di umah ento*
'Saya melihat orang **tua-tua** duduk di rumah itu.'

- (2) *Suba tua-tua, ia enu demen mapayas.*
'Sudah **tua-tua**, dia masih suka bersolek.'

Dalam kalimat (1) kata *tua-tua* 'tua-tua' berarti tidak 'tunggal', sedangkan pada kalimat (2) kata *tua-tua* 'tua-tua' berarti 'konesif'. Arti kata *tua-tua* 'tua-tua' pada kalimat (1) tanpa diberi konteks semacam itu pun dapat ditebak artinya, yaitu berarti 'taktunggal', sedangkan pada kalimat (2) sulit ditebak artinya tanpa melibatkan konteks. Oleh karena itu, adjektif bentuk ulang seperti yang terdapat pada contoh (1) inilah yang disebut makna adjektif bentuk ulang secara morfemis atau makna adjektif bentuk ulang bebas konteks yang akan dibicarakan dalam tulisan ini.

3.1 Makna Adjektif Bentuk Ulang secara Morfemis

Pengertian adjektif bentuk ulang secara morfemis rupanya tidak perlu lagi dibicarakan pada butir pembicaraan ini. Pengertiannya dapat diperhatikan pada uraian di atas.

Analisis makna adjektif bentuk ulang secara morfemis dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, seperti terlihat pada butir-butir pembicaraan berikut ini.

3.1.1 Menyatakan Makna 'Tidak Tunggal'

Arti 'tidak tunggal' yang dinyatakan oleh bentuk ulang adjektif dapat dirinci berdasarkan dasar kata ulang. Pada kata adjektif bentuk ulang yang tentu saja kata sebagai dasarnya, perulangan dapat menyatakan makna 'tidak tunggal' kata benda yang diterangkannya.

Contoh

- (3) *Murid di desa belog-belog.*
'Murid di desa **bodoh-bodoh**.'
- (4) *Keluargané sugih-sugih.*
'Keluarganya **kaya-kaya**.'

Bentuk ulang adjektif pada kedua contoh di atas menyatakan makna 'tidak tunggal'. Makna ketidak-tunggalannya tersebut menerangkan kata benda yang mendahuluinya. Misalnya, pada kalimat (3) kata adjektif bentuk ulang *belog-belog* 'bodoh-bodoh' menerangkan kata benda yang mendahuluinya, yaitu *murid-murid di desa* 'murid-murid di desa'. Maksudnya, yang *belog-belog* 'bodoh-bodoh' adalah *murid-murid di desa*. Begitu pula selanjutnya, adjektif bentuk ulang *sugih-sugih* 'kaya-kaya' pada kalimat (4) adalah menjelaskan kata yang mendahuluinya, yaitu *keluargané* 'keluarganya'.

3.1.2 Menyatakan Makna 'Intensif'

Perulangan yang dasarnya merupakan adjektif dapat dihubungkan dengan arti 'intensif'. Arti 'intensif' yang dimaksud di sini tidak harus selalu diartikan dengan 'D sekali' atau 'sangat D'. Namun, pengertian 'intensif' yang akan dibicarakan sehubungan dengan perulangan juga mencakup macam-macam 'pengerasan'. Dalam berbahasa ada kalanya seorang penutur ingin menarik perhatian para pendengarnya pada bagian tertentu dari hal yang ingin disampaikannya. Untuk itu, dia menonjolkan bagian-bagian tertentu itu. Penonjolan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan salah satu di antaranya adalah dengan mengulang kata. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian di bawah ini.

3.1.2.1 'Intensif' yang Mengandung Makna 'sangat D' atau 'D sekali'

Bentuk perulangan semantis (Rs) dapat dengan segera dilihat pada makna 'intensifnya'. Perulangan, seperti *putih-putih* 'putih-putih' dan *jelék-jelék* 'buruk-buruk', misalnya akan segera dapat ditentukan maknanya, yaitu 'D sekali' atau 'sangat D', sedangkan bentuk-bentuk perulangan yang lain

yang dapat dihubungkan dengan makna 'intensif' sering perlu diperhatikan konteksnya untuk menentukan maknanya.

Contoh:

- (5) *Témboké putih-putih.*
'Tembok itu **putih-putih.**'
- (6) *Baju di pekené jelek-jelek.*
'Baju yang di pasar **jelek-jelek.**'

Ada pula kata adjektif bentuk ulang yang menyatakan makna 'intensif' yang dikuatkan dengan sufiks *-an*. Contohnya:

- (7) *Ia anak mula sedeng-sedengan.*
'Ia memang orang **sinting-sinting-an**'
- (8) *Bangun uli nyongkok uyeng-uyengan asané.*
'bangun dari jongkok terasa **pusing.**'

3.1.2.2 'Intensif yang Mengandung Makna Penonjolan'

Seperti telah diuraikan di depan bahwa penonjolan dilakukan karena seorang penutur ingin menarik perhatian para pendengarnya pada bagian tertentu dari hal yang ingin disampaikannya. Untuk tercapainya tujuan tersebut, dilakukanlah perulangan pada bagian yang ingin ditonjolkan supaya lebih menarik dan lebih jelas.

Contoh:

- (9) *Apang bisa lulus tiang seken-seken melajah.*
'Supaya bisa lulus saya harus **sungguh-sungguh** belajar.'
- (10) *Ia seken-seken tresna teken pianakne.*
'Ia **benar-benar** mencintai anaknya.'

3.1.3 Menyatakan Makna 'Superlatif'

Di samping kata adjektif di atas yang menyatakan arti 'intensif', ada pula kata keterangan (yang menerangkan cara) yang diturunkan dari kata adjektif dengan perulangan

berimbuan *sa--ne 'se-nya'* mengandung makna 'superlatif'

Contoh:

(11) *Suwud kayeh ia mapayas sajegég-jegégné.*

'Sehabis mandi ia berhias secantik-cantiknya.'

(12) *Ia madaar sawareg-waregné.*

'Ia makan sekenyang-kenyangnya.'

3.1.4 Menyatakan Makna 'Pengaburan'

Sebelum diuraikan kata adjektif bentuk ulang yang menyatakan makna 'pengaburan', ada baiknya dijelaskan apa yang dimaksud dengan arti 'pengaburan'. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita tidak sanggup atau tidak ingin melukiskan atau menyatakan sesuatu secara pasti dan tegas. Jika dalam melukiskan seseorang dinyatakan bahwa *orangnya tinggi-tinggi*, yang dimaksud tentunya adalah orang tersebut termasuk kelompok orang ukuran badannya tinggi-tinggi. Akan tetapi, konsep yang dikandung oleh kata tinggi-tinggi itu sendiri adalah relatif dan merupakan satu kontinum agar apa yang dinyatakan *tinggi* itu lebih jelas, diperlukan norma ketinggian, antara lain untuk manusia dan gunung. Jika dalam melukiskan seseorang kita berkata *orangnya tinggi-tinggi*, secara implisit kita menyatakan kesadaran kita akan adanya norma relatif tadi, dan kita melakukannya melalui pengaburan yang diwujudkan dengan pengulangan kata.

Seperti dikatakan di atas, arti pengaburan juga bersumber pada keengganan untuk menyatakan sesuatu secara tegas atau terus terang. Sopan-santun atau tata krama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia tampaknya menghendaki hal demikian. Jika kita mengagumi hasil karya seseorang, misalnya, sebuah lukisan, dapat diduga bahwa orang tersebut akan mencoba merendahkan diri dan mengelak untuk mengiyakan bahwa lukisannya memang hebat. Dia akan berkata, misalnya, *Ah, cuma main-main saja* atau *Ah, cuma iseng-iseng, kok*, walaupun dia telah

bersusah payah untuk menyelesaikannya. Apabila ada yang menanyakan keadaan kita, biasanya akan dijawab dengan kata *baik-baik saja*, *baik* atau *baik saja*. Kedengaran kurang sopan walaupun sebenarnya arti yang terkandung dalam kata tersebut adalah maksud kita. Kita mencoba menghaluskan maksud kita dengan pengaburan yang dalam bahasa Indonesia, antara lain, dapat diwujudkan dengan pengulangan kata. Pengulangan demikian disebut dengan 'pengulangan penghalusan' (Simatupang, 1983:82).

Berikut ini akan diperlihatkan perincian bentuk-bentuk perulangan adjektif yang dapat dihubungkan dengan arti umum *pengaburan*. Arti 'pengaburan' yang dikandung oleh perulangan kata adjektif yang menyatakan makna 'agak' berdasarkan data yang diteliti, perulangan yang bebas konteks dengan arti demikian terdapat pada kata *kabur-kabur* 'kabur-kabur' dan *samur-samur* 'samar-samar'. Di samping itu, bentuk ulang yang bentuk dasarnya berasal dari adjektif dan mendapat imbuhan (konfiks) *ke-/an* akan menunjukkan makna 'agak', yaitu bentuk adjektif itu ada hubungannya dengan warna.

Contoh:

(13) *Baju anyar tiangé warnané kekuning-kuningan.*

'Baju baru saya warnanya agak kekuning-kuningan'

(14) *Bes terus mejemuh kulitné dadi kecoklat-coklatan.*

'Terlalu sering berjemur kulitnya menjadi kecoklat-coklatan'

3.1.5 Menyatakan Makna 'seakan-akan D'

Perulangan yang bentuk dasarnya berupa kata adjektif dan mendapat imbuhan (sufiks) *anga* 'di-/kan', dapat dihubungkan dengan arti 'seakan-akan D' sebenarnya bukan D, namun dibuat sedemikian rupa sehingga tampak D).

Contoh:

- (15) *Masalahné ento gedé-gedéange.*
'Masalah itu dibesar-besarkan.'
- (16) *Berita ento lebih-lebihange teken wartawane.*
'Berita itu dlebih-lebihkan oleh para wartawan.'

Makna bentuk ulang di atas dapat dihubungkan dengan pengertian negatif, yaitu bahwa sesuatu dilakukan tidak secara sepatutnya karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Makna kata ulang di atas akan berbeda dengan makna kata ulang di bawah ini.

Contoh:

- (17) *Yén ngaé jaja gedé-gedéang anaké.*
'Kalau membuat kue tolong dibesar-besarkan.'
- (18) *Mungkusné cenik-cenikang dogén.*
'Membungkusnya dikecil-kecilkan saja.'

Makna yang terkandung pada kata ulang (17) dan (18) di atas adalah menyatakan makna 'lebih D'. Pada contoh (17), di samping mengandung makna 'lebih D' juga menyatakan makna 'intensif'. Namun harus diperhatikan konteks sintaktiknya untuk dapat menentukan maknanya.

3.1.6 Menyatakan Makna 'Saling'

Adjektif bentuk ulang yang dapat dihubungkan dengan makna 'saling' dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

Contoh:

- (19) *Anak luhe ento majambak-jambakan bok di jalané.*
'Perempuan itu **bertarik-tarikan rambut (saling tarik rambut)** di jalan.'
- (20) *Penumpangé negak madesek-deseakan di bisé.*
'Para penumpang duduk berdesak-desakan di dalam bus'

4. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adjektif bentuk ulang dalam bahasa Bali dilihat dari segi makna. Aneka makna secara morfemis adalah makna kata yang dengan segera dapat diketahui tanpa melihat konteks sintaktiknya. Berdasarkan pengertian tersebut, aneka makna adjektif bentuk ulang bahasa Bali dapat dibedakan menjadi enam, yaitu

- (1) menyatakan makna 'tidak tunggal', *murid di désa belog-belog* 'murid di desa bodoh-bodoh';
- (2) 'intensif' (a) 'sangat D' *temboké putih-putih* 'tembok itu putih-putih'
(b) 'penonjolan' *apang bisa lulus tiang seken-seken malajah* 'supaya bisa lulus saya harus sungguh-sungguh belajar';
- (3) 'superlatif' *suwud kayeh ia mapayas sajegég-jegéné* 'sehabis mandi ia berhias secantik-cantiknya';
- (4) 'pengaburan' *baju anyar tiangé warnané kakuning-kuningan* 'baju baru saya warnanya kekuning-kuningan';
- (5) 'seakan-akan D' *masalahné ento gedé-gedéange* 'masalah itu dibesar-besarkan';
- (6) 'saling' *penumpangé negak madesek-desekan di bisé* 'para penumpang duduk berdesak-desakan di dalam bus.'

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan *et al.* 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Bagus, I.G.N. 1988. "Melangkah Menuju Masa Depan" dalam *Majalah Widya Pustaka*. Tahun VI, Edisi Khusus, Oktober 1988. Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Bawa, I Wayan. 1980. "Sedikit tentang Aliran-Aliran Linguistik Modern". Denpasar: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Unud.
- Bloomfield, Leonard. 1956. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Halim, Amran (ed). 1980. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kentjono, Djoko. 1982. *Dasar-Dasar Linguistik Umum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lyons, John 1977. *Pengantar Teori Linguistik*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama
- Marsono, D.J. 1983. Kata Sifat Bentuk Ulang Bahasa Jawa. dalam *Majalah Linguistik Indonesia*. Masyarakat Linguistik Indonesia.
- Parera, Jos Daniel. 1980. *Pengantar Linguistik Umum Bidang Morfologi*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Ramlan, M. 1965. *Tata Bahasa Indonesia Penggolongan Kata*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- , 1983. *Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: CV. Karyono.

- Saussure, de Ferdinand. 1977. *Course in General Linguistics*. London: Fontana Collins.
- Simatupang, M.D.D 1983. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia* Jakarta: Djambatan..
- Sitindoan, G.1984. *Pengantar Linguistik dan Tata Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sulaga, I Nyoman dkk. 1996. *Tata Bahasa Baku Bahasa Bali*. Denpasar: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Suartana, I Wayan. Kata Ulang Bahasa Indonesia dalam *Widyapustaka* Tahun III. No. 2 Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Thoir, Nazir dkk. 1981. *Sistem Perulangan Bahasa Sasak*. Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Warna, I Wayan dkk. 1978. *Kamus Bali-Indonesia*. Denpasar: Dinas Pengajaran Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- , 1983. *Tata Bahasa Bali*. Denpasar: Dinas Pengajaran Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

PERAN TOKOH PINGGIRAN:
PEMAHAMAN DEKONSTRUKSI RETORIS
NOVEL *PUTRI* KARYA PUTU WIJAYA

Puji Retno Hardiningtyas

1. Pendahuluan

Putri adalah novel yang sarat dengan permasalahan kehidupan, petualangan pikiran yang memihak kaum perempuan, adat istiadat, budaya, dan pertentangan tradisi. Cerita *Putri* merupakan karya yang menguak bentuk tradisi Bali dan makna sejarahnya. Novel ini menyajikan sebuah pertanyaan panjang tentang tradisi dengan perempuan sebagai ujung tombaknya. Sebuah petualangan pikiran memihak perempuan yang menyayangi laki-laki yang mencintainya (Wijaya, 2004).

Novel *Putri* merupakan cerita tradisi atau budaya Bali yang memihak perempuan yang menyayangi laki-laki yang mencintainya. Novel yang mempertanyakan apakah manusia mesti memberhalakan kearifan masa lalu atau memberikan reinterpretasi untuk mereposisinya sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. *Putri* hanyalah bayang-bayang kecil ketidakberdayaan ketika tatanilai bergerak cepat, jumpalitan, terkadang berbelok mendadak sehingga manusia terengah-engah mengejarnya (Wijaya, 2004). Sebuah novel yang mengungkapkan perbenturan nilai budaya dalam peradaban manusia khususnya di Bali dan manusia di mana saja, baik yang mengalami *future shock* dalam interen masyarakat budayanya sendiri maupun *cultural shock* dalam pergaulan dengan masyarakat budaya lainnya.

Novel ini mengungkapkan pergolakan yang menyangkut masalah adat atau tradisi di kalangan masyarakat

Hindu-Bali dalam konteks *desa-kala-patra* (tempat-waktu-kondisi) yang berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Masalahnya, apa yang ada di dalam tradisi lama yang usianya ratusan tahun itu dalam realita sekarang, sudah banyak yang tidak sejalan lagi dengan *desa-kala-patra* yang baru karena harus ada tafsiran baru atau rasional atau singkatnya harus ada tradisi baru.

Putu Wijaya tidak hanya bersandar pada pengalaman langsung yang dialami atau disaksikannya dalam membuat karyanya. Karya yang bercorak kejiwaan dan fisafat, realisme mengisyaratkan, dan arus kesadaran, selain kebenaran yang terperinci, juga kehadiran tokoh yang khas dalam keadaan yang khas, sungguh-sungguh berhasil diterapkan Putu Wijaya dalam karya-karyanya di masa ini. Contohnya, novel *Putri* yang mengisahkan kehidupan gadis bernama Putri, seorang gadis Bali yang menentang tradisinya demi mempertahankan laki-laki yang dicintainya. Putri, tidak lagi memandang kedudukan dan status sosial yang sudah mendarah daging sejak dahulu, bahkan adat yang rumit sebagai hak dan kewajiban yang harus *saklek* dilakukan, tetapi di balik keruwetan itu ada hal yang lebih penting, yaitu makna dari adat dan tradisi tersebut.

Karya Putu Wijaya tidak hanya melambangkan dunia absurditas, tetapi juga melambangkan adanya tokoh-tokoh yang tidak "mendaging secara psikologis" (*psychological materialization of character*) sebagai suatu konsep yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan keinginan pengarangnya dalam upaya menggambarkan kesadaran manusia yang tidak berbentuk lagi. Lain halnya dengan novel *Putri* yang berhasil menyuguhkan gambaran watak tokoh yang begitu tajam dan beragam. Masing-masing tokoh diceritakan benar-benar hidup dengan pikiran, pribadi, dan latar belakang kehidupan yang utuh. Nasib menimpa para tokoh akibat logis dari perwatakan mereka sendiri.

Hal yang berasa amat kuat dalam novel *Putri* adalah pelukisan watak tokoh-tokohnya. Perwatakan yang dihadirkan dalam *Putri* adalah perwatakan masyarakat umum dan bukan individu tertentu. Putu memperlihatkan nama tokoh dengan cara tidak memberi nama tokoh, tetapi disebutkan statusnya saja, seperti pengacara, anak buah Palakarma, perawat, dokter, dua tokoh lelaki, sopir taksi, penumpang pesawat, pramugari, pemuda Meliling, karyawan Suksema, dan lain-lain. Selain itu, Putu juga memasukkan nama-nama tokoh yang diambil dari kebudayaan Bali. Tokoh dalam *Putri* diberi penafsiran yang baru sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada individu ataupun masyarakat tertentu.

Di samping itu, budaya dan peristiwa yang terjadi di masyarakat disuguhkan pula dalam novel ini. Novel ini menyuguhkan konsep penokohan yang digambarkan dengan tokoh perempuan. Persoalan perempuan dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Tokoh perempuan merupakan simbol untuk melukiskan kesadaran manusia yang kompleks dengan logikanya sendiri, yang terpenting adalah kesadaran manusia dalam upaya mencari gambaran dan kepedulian dirinya dengan lingkungan. Tokoh-tokoh yang terdiri atas orang-orang yang sudah "jadi" dan orang yang ada dalam masyarakat.

Dengan menolak dunia sebelumnya tokoh Putri sedang menolak sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dialaminya. Ketika pengabenan Mangku Puseh yang akan dilakukan secara *nista*, masyarakat menolaknya. Putri menentang tradisi yang dianggapnya justru membebaninya, bukan persiapan upacara tiga tingkatan itu yang ia permasalahkan, tetapi makna upacaranya yang penting. Putri seperti berdiri di antara dua dunia yang saling menariknya. Dunia masa lalunya yang tidak menghendaki munculnya kebebasan, baik dalam berpikir maupun bertindak. Dunia

yang terbuka terhadap kebebasan yang sekarang sedang dibentuknya dan membentuk pola pikirnya.

Selain itu, novel *Putri* juga hendak menunjukkan hadirnya manusia yang menunjukkan ketahanannya yang prima saat berhubungan dengan dunianya. Namun, juga dihadirkan manusia yang menunjukkan kelemahannya dengan berbagai persoalan yang menimpanya. Tokoh perempuan pada novel ini mengalami kejadian yang memojokkan diri sendiri, ketidakberdayaannya, menerima perlakuan yang tidak dimengerti oleh tokohnya, tetapi setiap masalah dapat ia lalui dengan baik. Tokoh perempuan adalah simbol bagi manusia yang sedang berupaya merombak dan memahami dirinya sendiri, bukan sebagai perempuan yang individualistis yang tingkah lakunya ditentukan oleh strata sosial.

Berawal dari kehidupan yang berlatar belakang di Puri Puncak, Tabanan, pengarang memunculkan tokoh Ngruh Wikan dan Putri yang kemudian mengantarkan cerita pada persoalan yang lebih kompleks dan rumit, tetapi menarik sehingga memberikan gambaran sebuah "dunia baru" bagi pembaca. Di sini dikisahkan para tokoh dalam novel *Putri*, benar-benar hidup dengan pikiran, pribadi, dan latar belakang yang utuh. Nasib yang menimpa para tokoh adalah akibat logis dari perwatakan mereka sendiri. Misalnya, Ketut, karyawan Suksema berusia kira-kira 25 tahun, harus keluar meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan kaus *Suksema*. Sebagai orang yang berjasa memajukan kaus *Suksema* harus mundur karena karyawan-karyawan lain tidak menyukainya, tetapi di balik itu Ketut adalah musuh Putri yang nantinya menjerumuskan Putri untuk memimpin Mahakarya. Sebenarnya Ketut adalah anak buah dari Palakarma dan Nelly, pemilik Mahakarya. Dalam perannya Ketut merupakan tokoh yang tidak berpengaruh dalam novel *Putri*, ini dilihat dari munculnya

yang sepintas lalu. Namun, ia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin keutuhan cerita novel *Putri*, tanpa tokoh Ketut cerita *Putri* tidak akan menarik. Tokoh Ketut yang membuka jalan pertemuan Putri dengan Nelly. Ketut sudah menjadi anak buah Nelly dan Nelly, yang memberi usul kepada Nelly agar memesan kaus Suksema kepada Sueti tanpa sepengetahuan Putri. Rencana itu pun berjalan lancar, Sueti menyanggupi dan seribu kaus yang digunakan untuk mendemo pemerintah, yang mengantarkan Putri didampingi Wikan untuk memimpin Proyek Mahakarya, Bali Merdeka. Dengan konsep dekonstruksi peran tokoh Ketut memunyai peran dan fungsi yang sama dengan peran tokoh utama dalam novel *Putri*.

Penelitian ini akan difokuskan pada unsur tokoh, yaitu tokoh pinggiran yang langsung dibedakan, mana tokoh pinggiran utama dan mana tokoh pinggiran (yang memang) tambahan. Untuk lebih khusus lagi, tokoh pinggiran utama dan tokoh pinggiran (yang memang) tambahan diklasifikasikan dan ditinjau dari peran-peran tokoh berdasarkan keterlibatan tokoh pinggiran dalam cerita, hubungan tokoh pinggiran dengan tokoh utama, dan pengaruhnya tokoh pinggiran terhadap perkembangan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh merupakan unsur yang sangat vital dalam sebuah jalinan cerita dan unsur ini pun harus hadir dalam novel. Cerita dalam novel tercermin dalam perubahan dan perkembangan tokoh. Hal ini sejalan dengan pendapat Baribin (1985:52) bahwa masalah tokoh dan penokohan merupakan hal yang kehadirannya sangat penting, bahkan menentukan.

Dengan kajian yang luas dan cermat, tidak hanya tokoh utama atau "lakon" saja yang berperan dalam sebuah karya sastra, tetapi semua tokoh yang ada dalam sebuah karya sastra novel itu. Jadi, tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap kurang berperan, dilupakan oleh pembaca justru

memiliki peran yang sama dalam satu rangkaian cerita yang disampaikan oleh pengarang. Tokoh-tokoh yang dianggap pinggiran tersebut ikut pula menentukan kepaduan makna yang dibangun oleh sebuah novel.

Itulah sebabnya novel *Putri* dipilih sebagai objek penelitian untuk dikaji unsur peran tokohnya. Terkait dengan penelitian yang dilakukan ini, masalah yang dibahas adalah bagaimana penokohan dan peran tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan novel *Putri* karya Putu Wijaya.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengungkapkan penokohan tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan dalam novel *Putri*, dan mengungkap peran tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan dalam novel *Putri* karya Putu Wijaya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi sastra dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karya sastra Indonesia. Di satu pihak, penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif terhadap kehidupan manusia dengan cara memahami dan memberi arti dari berbagai unsur yang terkandung dalam novel Indonesia, serta memberikan sumbangan pemahaman positif terhadap karya-karya sastra, khususnya novel. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang sastra. Kedua, topik penelitian ini dapat menyajikan suatu model bahasa tentang fenomena peran tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan dalam novel *Putri* tersebut dari perspektif dekonstruksi yang dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam mengaji fenomena sastra dari berbagai sudut pandang. Selain itu, dapat memberikan kontribusi sebagai dasar bagi penelitian lanjutan. Kedua, deskripsi tersebut dapat diharapkan dapat pula bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca berkaitan dengan karya sastra, khususnya novel.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan menerapkan teori dekonstruksi retorik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif. Analisis dalam penelitian ini memfokuskan pada unsur tokoh dan penokohan yang terdapat dalam kajian teori strukturalisme. Langkah awal adalah mengelompokkan tokoh utama dan tokoh pinggiran, untuk mempermudah menganalisis tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan. Untuk mendeskripsikan penokohan pinggiran utama dan (yang memang) tambahan digunakan teori strukturalisme. Teori dekonstruksi retorik digunakan untuk menganalisis peran tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan novel *Putri* karya Putu Wijaya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengungkap novel *Putri* karya Putu Wijaya sebagai penelitian dan penelitian ini diberi judul "Peran Tokoh Pinggiran: Pemahaman Dekonstruksi Retorik Novel *Putri* Karya Putu Wijaya". Dengan memahami novel *Putri*, diharapkan pembaca dapat memperoleh wacana tentang peran tokoh dalam novel *Putri* dan memberi gambaran secara umum tentang kebudayaan dan tradisi Bali.

2. Dekonstruksi Retorik Paul de Man

Jika Derrida berangkat dari metafisika Barat, maka Paul de Man bertolak dari hasil-hasil penelitiannya mengenai puisi-puisi sastra romantik. Namun, sebenarnya Derrida dan Paul de Man mempunyai kesamaan pandangan, yakni bahasa merupakan sebuah struktur yang substantif dalam kehidupan manusia. Bahasa menurut mereka berada di luar dan di dalam kehidupan. Bahasa merupakan sistem simbol yang terdiri dari penanda dan petanda yang mempunyai hubungan arbitrer antara keduanya (Supriyanto, 1997).

Paul de Man adalah seorang pakar sastra dari Belgia yang menulis sejak remaja, khususnya pada majalah *Le Soir*,

yang lebih bersifat propaganda anti-Yahudi. Dalam peta dekonstruksi, konsep Paul de Man termasuk dalam kategori dekonstruksi aliran Amerika. Konsep dekonstruksi yang dibangun Paul de Man (tidak dapat dipungkiri) mendapat inspirasi atau bahkan pengaruh Derrida, walaupun pada akhirnya menemukan identitas terminologinya sendiri. Konsep dekonstruksi Paul de Man yang banyak diterapkan pada prinsip-prinsip romantik tersebut dikenal dengan istilah dekonstruksi retorik, yang berupa pembacaan atas *trope-trope* pada karya sastra (Saputra, 2002).

Pendekatan dekonstruksi bermaksud untuk melacak unsur-unsur *aporia*, yaitu yang berupa makna paradoks, makna kontradiktif, makna ironi, dalam karya (sastra) yang dibaca. Unsur dan atau bentuk-bentuk dalam karya itu dicari dan dipahami justru dalam arti kebalikannya. Unsur-unsur yang tidak penting dilacak dan kemudian dipentingkan, diberi makna, peran, sehingga akan terlihat (atau: menonjol) perannya dalam karya sastra yang bersangkutan. Misalnya, seorang tokoh cerita yang tidak penting berhubung hanya tokoh perifer, tokoh (kelompok) pinggiran saja, setelah didekonstruksi ia menjadi tokoh yang penting, yang memiliki fungsi (dan makna) yang menonjol sehingga tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam memaknai karya itu (Nurgiyantoro, 1995).

Cara pembacaan dekonstruksi bisa dilihat pada novel *Siti Nurbaya*. Secara struktural tokoh Datuk Maringgih selalu dianggap sebagai tokoh antagonis. Karena penempatannya menjadi tokoh antagonis, keberadaan Datuk Maringgih lalu menjadi tokoh yang jika diukur secara tradisi, prilakunya sangat tidak etis, jahat, dan menyebalkan. Di samping rentenir, Datuk Maringgih masih tega ingin menikahi Siti Nurbaya dengan tukar pembebasan utang.

Secara dekonstruksi, perilaku Datuk Maringgih bisa saja hanya sebagai kamufase untuk menyamarkan

ideologi pengarang. Bisa saja Datuk Maringgih, merupakan sebuah ringkikan (seperti ringkik kuda) pengarang akan kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ternyata dalam perilakunya, Datuk Maringgih tokoh yang tidak mau menurut ego penjajahan Belanda. Dengan demikian, dalam konsep ideologis, keberadaan Datuk Maringgih, bisa saja didudukkan sebagai pahlawan. Hal ini jelas "bertentangan" dengan struktur teks. Menurut dekonstruksi pemaknaan tersebut bisa jadi justru merupakan esensi ditulisnya novel Siti Nurbaya. Model seperti itulah yang menjadi konsep pemaknaan dekonstruksi (Fananie, 2000).

Sama halnya dengan novel *Putri*, sebenarnya dapat dilihat pemanfaatan potensi peran tokoh. Peran tokoh dalam karya Putu Wijaya, sangat kuat, dan bahkan cenderung mendominasi (alegoris). Putu Wijaya sangat lincah dalam memainkan nuansa tokoh yang (bahasanya metaforis dan realis), termasuk juga dalam memanfaatkan pasangan kata/wacana retorik/*trope-trope* yang berposisi secara aporitis. Penelitian ini akan mengkaji hal tersebut, terutama dengan memanfaatkan konsep dasar dekonstruksi retorik Paul de Man. Dekonstruksi retorik termasuk mazhab strukturalisme, tetapi bukan strukturalisme yang estetis, melainkan yang filosofis, yang merupakan asal dan tujuan makna. Kajian ini hanyalah salah satu hasil pembacaan yang bersifat tentatif, yang masih terbuka untuk pembacaan-pembacaan berikutnya, dengan interpretasi makna yang berbeda pula.

3. Novel *Putri*: Peran Tokoh Pinggiran

Novel *Putri* merupakan salah satu karya Putu Wijaya, yang diterbitkan pada bulan September, tahun 2004 dan merupakan cetakan pertama oleh Pustaka Utama Grafiti.

Berawal dari kehidupan yang berlatar belakang di Puri Puncak, Tabanan, pengarang memunculkan tokoh Ngurah dan Putri yang kemudian mengantarkan cerita

pada persoalan yang lebih kompleks dan rumit namun menarik sehingga memberikan gambaran sebuah “dunia baru” bagi pembaca. Di sini dikisahkan para tokoh dalam novel *Putri*, benar-benar hidup dengan pikiran, pribadi dan latar belakang yang utuh. Nasib yang menimpa para tokoh adalah akibat logis dari perwatakan mereka sendiri. Misalnya, Ketut, karyawan Suksema berusia 25 tahun, harus keluar meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan kaus Suksema. Sebagai orang yang berjasa memajukan kaus Suksema harus mundur karena karyawan-karyawan lain tidak menyukainya. Dalam perannya Ketut merupakan tokoh yang tidak berpengaruh dalam novel *Putri*, ini dilihat dari munculnya yang sepintas lalu. Namun, ia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin keutuhan cerita novel *Putri*, tanpa tokoh Ketut cerita *Putri* tidak akan menarik. Dengan konsep dekonstruksi peran tokoh Ketut mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan peran tokoh utama dalam menjalin keutuhan novel *Putri*.

Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel *Putri*, antara lain *Putri*, *Ngurah*, *Sueti*, *Abu*, *Mangku Puseh*, *Nelly*, *Oka*, *Cheryl*, *Ketut*, *Sin Hwa*, *Istri Sin Hwa*, *Palakarma*, *Gde*, *Margareth*, *Sadra*, *Kepala Adat*, *Komang*, *Pak Raka*, *Bu Ratih*, *George*, *Sato-san*, *Rai*, *Nyoman Rukni*, *Made Sukada*, *Mayor Prapto*, *Bu Prapto*, *Sesepuh Puri*, *Sato-an*, *Yoko*, *Isayama*, *Bu Gedong*, *Osaka*, *Amat*, *Rames*, *Garbi*, *Petugas Penjara*, *Petugas Bandara*, *Polisi*, *Pemuda Meliling*, *Karyawan Suksema*, *Sesepuh Puri Puncak*, *Mastra*, *Dadong Putri*, *Ibu Sato-san*, *Kabu*, *Abdul Saleh*, *Pak Tilem*, *Tokoh Lelaki*, *Made*, dan *Perawat*. Deretan nama-nama dalam novel *Putri* karya Putu Wijaya telah mampu memerankan perannya dengan baik. Peran mereka benar-benar telah disutradarainya dengan cermat. Hampir semua tokoh yang dimunculkan olehnya telah mampu menunjukkan karakteristik pribadi unik, sanggup memberikan pengindraan yang jelas dan terasa begitu nyata,

lengkap dengan segala penulisan gambaran, penempatan, dan perwatakannya masing-masing tokoh tersebut.

Dengan kajian yang luas dan cermat, tidak hanya tokoh utama atau "lakon" saja yang berperan dalam sebuah karya sastra, tetapi semua tokoh yang ada dalam sebuah karya sastra novel itu. Jadi, tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap kurang berperan atau bahkan kehadirannya dibenci, dilupakan oleh pembaca justru memiliki peran yang sama dalam satu rangkaian cerita yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Tokoh-tokoh yang dianggap pinggiran tersebut, ikut pula menentukan kepaduan makna yang dibangun oleh sebuah novel. Dengan kata lain tokoh pinggiran yang dianggap sebagai tokoh tambahan; tokoh yang tidak penting sebenarnya memiliki peran yang sama dengan tokoh utama dalam menjalin sebuah cerita novel.

Tokoh seyogyanya diamati dalam hubungannya dengan unsur cerita lainnya, dan dalam hubungannya dengan cerita itu secara keseluruhan (Sudjiman, 1988). Begitu pula, peran tokoh ditentukan oleh dominasi tokoh, banyaknya penceritaan, dan pengaruhnya terhadap perkembangan plot secara keseluruhan (Nurgiyantoro, 1955).

Pada penelitian ini, akan dibahas tokoh pinggiran yang langsung dibedakan tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan. Lebih khusus lagi, tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan diklasifikasikan dan ditinjau dari peran-peran tokoh berdasarkan keterlibatan tokoh pinggiran dalam rangkaian cerita *Putri*, hubungan tokoh pinggiran dengan tokoh utama, dan pengaruhnya tokoh pinggiran terhadap perkembangan alur cerita secara keseluruhan.

4. Novel *Putri*: Alegoris yang Ironis

Peran tokoh pinggiran pada novel *Putri* karya Putu Wijaya yang akan dianalisis adalah tokoh yang dianggap

kurang penting dan tidak mempunyai kedudukan dalam hal ini adalah tokoh tambahan utama sebagai berikut. *Sueti, Abu, Nelly, dan Oka*. Sedangkan *Sueti, Abu, Mangku Puseh, Nelly, Cheryl, Ketut, Sin Hwa, Istri Sin Hwa, Palakarma, Gde, Margareth, Sadra, Kepala Adat, Komang, Pak Raka, Bu Ratih, George, Sato-san, Rai, Nyoman Rukni, Made Sukada, Mayor Prapto, Bu Prapto, Sesepuh Puri, Sato-an, Yoko, Isayama, Bu Gedong, Osaka, Amat, Rames, Garbi, pemuda Meliling, karyawan Suksema, Sesepuh Puri Puncak, Mastra, Dadong Putri, Ibu Sato-san, Kabu, Abdul Saleh, Pak Tilem, Tokoh Lelaki, Made, Petugas, Anak Buah Palakarma, Kepala Desa, Dokter, dan Perawat*, merupakan tokoh pinggiran (yang memang) tambahan.

Kajian dekonstruksi tokoh novel *Putri*, yang memfokuskan pada tokoh pinggiran/periferal/tambahan utama mempunyai peran yang sama dengan tokoh utama. Dilihat dari hubungan dan keterlibatan tokoh pinggiran utama dengan peran tokoh utama memiliki kedekatan jalinan cerita yang berperan menentukan jalannya cerita *Putri*. Seperti, tokoh *Sueti, Abu, Nelly, Oka, Palakarma*, meskipun tokoh pinggiran, mereka terlibat secara langsung dan berperan ikut menentukan keputusan *Putri* dalam pengabean *Mangku Puseh*, ayah *Putri*, menentang tradisi yang melekat di Bali, usaha kaus *Suksema* yang mengalami kemajuan pesat, hubungan *Putri* dengan *Turah Wikan* yang berbeda kasta, dan sangat menentukan posisi *Putri* untuk bergabung di proyek *Mahakarya*, yang mendukung Bali Merdeka.

Tokoh *Mangku Puseh, Cheryl, Ketut, Sin Hwa, Istri Sin Hwa, Gde, Margareth, Sadra, Kepala Adat, Komang, Pak Raka, Bu Ratih, George, Sato-san, Rai, Nyoman Rukni, Made Sukada, Mayor Prapto, Bu Prapto, Sesepuh Puri, Sato-an, Yoko, Isayama, Bu Gedong, Osaka, Amat, Rames, Garbi, pemuda Meliling, Karyawan Suksema, Sesepuh Puri Puncak, Mastra, Dadong Putri, Ibu Sato-san, Kabu, Abdul Saleh, Pak Tilem, Tokoh Lelaki*

Saudara Palakarma, Dua Orang Laki-Laki Tua, Polisi, Made, Petugas, Anak Buah Palakarma, Kepala Desa, Pengacara, Dokter, dan Perawat, juga memiliki peran yang sama dengan tokoh pinggiran utama. Mereka sangat berperan dan terlibat secara langsung dengan tokoh Putri dan Wikan.

Sueti, Abu, Nelly, Palakarma, dan Oka, merupakan tokoh yang berperan penting dan mempunyai andil besar pada Putri dan Wikan, mereka adalah tokoh yang mempengaruhi Putri untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi Putri dengan Wikan, yang paling penting mempengaruhi sikap Putri dalam mengambil keputusan menerima untuk memimpin Mahakarya, yang menginginkan Bali Merdeka.

Abu, Cheryl, Margareth, Pak Rai, George, Rames, Sesepuh Puri Puncak, adalah tokoh yang mempunyai andil besar terhadap pilihan hidup Wikan, pilihan hubungan Wikan dengan Putri.

Tokoh Ketut mempunyai andil besar atau paling tidak cukup memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Putri, dapat *dipandang* sebagai simbolisme kemenangan perjuangan kaum politikus seperti, Palakarma, Nelly yang memiliki Mahakarya. Abu dan Ketut adalah alat yang digunakan Nelly dan Palakarma untuk mendapatkan kekuasaan yang diinginkan, dengan jalan apa pun. Jika dilihat perannya, Palakarma, Nelly dalam membangun Mahakarya, ia tidak memiliki peran yang besar. Dari awal hingga akhir cerita, justru tokoh-tokoh *Mangku Puseh, Ketut, Sin Hwa, Gde, Sadra, Kepala Adat, Komang, Pak Raka, Bu Ratih, Sato-san, Rai, Nyoman Rukni, Made Sukada, Mayor Prapto, Bu Prapto, Sesepuh Puri, Sato-an, Yoko, Isayama, Osaka, Rames, Pemuda Meliling, Karyawan Suksema, Sesepuh Puri Puncak, Mastra, Dadong Putri, Ibu Sato-san, Kabu, Pak Tilem, Anak Buah Palakarma, Kepala Desa, Pengacara, Dokter, dan Perawat*, merupakan pejuang bagi kehidupan perubahan hidupnya,

Putri, meskipun itu dilakukan secara tidak langsung atas permintaan Putri sendiri. Apa pun motivasinya, tokoh pinggiran (yang memang) tambahan itu, menjadi tokoh tambahan yang memerangi prinsip Putri. Artinya, tokoh pinggiran (yang memang) tambahan adalah pejuang yang mengubah kehidupan Putri, yang seberapa pun kecil andilnya, namun tokoh pinggiran itu telah berperan besar mempengaruhi kehidupan Putri dan Wikan.

Dalam novel *Putri*, tersirat perlawanan untuk meruntuhkan adat istiadat dan hukum yang secara tidak adil membatasi kebebasan dan perjuangan perempuan. Karena itu, perlawanan feminisme terarah pada kaum laki-laki agar perempuan memperoleh peran dalam menentukan adat istiadat dan hukum. Selain itu, novel *Putri* menyuguhkan protes sosial, politik yang terjadi setelah kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Jika tokoh-tokoh seperti Sueti, Abu, Oka, Nelly, Mangku Puseh, Kepala Adat, dan *krama desa* memiliki kecerdasan sebagai penghasil pendidikan tentang *political economy*, masalah sebesar apa pun yang terjadi di Bali dan Indonesia dapat teratasi dengan baik. Tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh Putu Wijaya hanya sebuah kamufase untuk menyindir pemerintah. Di zaman pemerintahan Soeharto, negara Indonesia sempat menikmati *booming* pertumbuhan ekonomi sehingga negara Indonesia digolongkan sebagai salah satu Asian Miracle. Setelah zaman Soekarno, negara Indonesia merasakan "Sama Rata Sama Rasa", tetapi rakyat masih merasakan kemiskinan. Dalam hal ketimpangan ekonomi, yaitu adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin begitu dalam dan terlihat jelas. Sistem ekonomi di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ini masih tetap sama dasarnya dengan sistem yang dipakai oleh zamannya Soeharto. Kondisi ini, dipararelkan apa yang terjadi di Puri Puncak dan Ngurah Wikan, serta masyarakat Desa Meliling dalam novel *Putri*.

Dari sudut pandang dekonstruksi, dikotomi struktur peran tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan dalam membangun novel *Putri* adalah tokoh-tokoh yang penting kedudukannya dengan tokoh utama. Dekonstruksi memosisikan peran tokoh-tokoh pinggiran sebagai tokoh yang memiliki kekuatan sama dengan unsur yang membangun totalitas novel secara keseluruhan. Dekonstruksi sanggup menempatkan peran pinggiran untuk menggugat konstruksi peran utama yang telah menindas kelompok-kelompok marginal. Pascakolonial kemudian membongkar (dekonstruksi) kembali wacana-wacana yang terstruktur, termasuk dalam memetakan politik dan kekuasaan yang diceritakan pengarang dalam novel *Putri*. Ide Ferdinand de Saussure tentang oposisi biner misalnya, telah dipakai dalam struktur-struktur kesadaran pengetahuan. Kemudian oposisi biner diperkuat pandangan Paul de Man yang mengambil teori berklibat pada Derrida, sedangkan Derrida berkiblat dari teori strukturalisme yang dipaparkan de Saussure. Oposisi biner telah membagi dunia dalam dua kategori, dan kategori yang satu biasanya lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Begitu pula novel *Putri* telah membagi mana yang baik dan mana yang buruk. Palakarmalah yang dianggap kategori baik dan Putri sebagai kategori buruk, tetapi sebaliknya secara struktural antara Palakarma dan Putri adalah pembalikan. Bagi postkolonial oposisi yang merupakan struktur tak disadari ini merugikan dua hubungan tersebut sebab akan terjadi dualitas masyarakat atau pemahaman yang saling menindas, dan muncullah apa yang disebut primordialisasi, dan sektarianisasi kelompok. Oposisi itu sendiri Jambatan laun terproduksi menjadi mitos dan kebenaran yang disembah mati-matian. Oposisi lelaki dan perempuan misalnya, perempuan cenderung ditempatkan sebagai 'yang dibawah lelaki' dan telah dimitoskan demikian, dianggap sesuatu

yang natural. Inilah kolonialisme dalam ruang privat, dan menjadi sumber gugatan feminisme yang senapas dengan gugatan postkolonial. Struktur-struktur oposan yang asimetris dalam wacana maupun pemahaman pembaca terhadap masyarakat dan dunia menghasilkan mitos siapa yang berhak menindas dan siapa yang boleh saja ditindas yang terdapat dalam novel *Putri* karya Putu Wijaya.

5. Simpulan

Novel *Putri*, cukup potensial dalam memanfaatkan tokoh-tokohnya, baik yang menyangkut tokoh utama maupun tokoh pinggiran. Peran tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan dalam novel *Putri* karya Putu Wijaya, berhasil menyejajarkan perannya dengan tokoh utama. Tokoh-tokoh pinggiran utama dan (yang memang) tambahan tidak begitu saja dikategorikan sebagai *tokoh* pinggiran, dengan konsep dekonstruksi, tokoh-tokoh tersebut, yang sebelumnya dianggap kurang berperan atau bahkan kehadirannya dilupakan pembaca, justru memiliki peran yang besar, kehadiran mereka (tokoh pinggiran) tidak hanya mendukung tokoh utama saja, melainkan juga menentukan kepaduan makna yang dibangun oleh sebuah novel. Dengan memanfaatkan tokoh-tokoh pinggiran, novel ini lebih sebagai alegoris yang ironis.

Terpecahnya kepribadian atau eksistensi Indonesia hari ini, dan pencarian pada masa lalu, pada politik, sejarah, ekonomi, budaya, dan tradisi, adalah kesia-siaan belaka. Memang realitas itu sudah dilakukan pada masa rezim Soekarno dan rezim Orde Baru, memparadigmakan kebudayaan masa lalu sebagai cerita kebudayaan luhur. Di satu sisi, kenyataan itu menjadi penghalang dan menghadap ke masa lalu. Kemudian hiduplah kembali neofeodalisme yang tidak lebih kentalnya daripada feodalisme di zaman Kerajaan Singosari, Kediri, Majapahit, Mataram, Sriwijaya,

dan Pagaruyung. Neofeodalisme itu mendapat sambutan yang cocok dengan kebudayaan kapitalisme modern. Pada akhirnya rakyat tetap tertindas, miskin, dan menderita, dan sesudah itu karena dalam ketertindasan, penderitaan, dan kesedihan rakyat tetap tidak diperdulikan oleh para pemimpin.

Dengan demikian, peran tokoh-tokoh pinggiran dalam novel *Putri* merupakan sindiran bagi kita, terutama yang terlibat konflik permasalahan kehidupan, tradisi, adat istiadat, budaya, kemanusiaan, kesewenang-wenangan pimpinan, dan kekuasaan politik. Yang paling menarik dari novel *Putri*, dikemas dalam gaya dan struktur narasi yang menakjubkan. Pengarang dengan leluasa mengekspresikan masalah jender dan seksualitas, representasi kelas, agama, etnisitas dan ras, identitas budaya dan posisi postkolonial, sejarah dan ideologi; kekuasaan negara, sampai kekerasan rumah tangga. Kritik tajam novel ini diarahkan pada komunisme, budaya, adat dan tradisi, serta agama yang mengajarkan kesetaraan manusia ternyata sama sekali tidak mengubah sistem perbedaan manusia yang sangat diskriminatif dan patriarkhis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. 1995. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2002. *Pendekatan Pasca-Struktural: Jacques Derrida: Analisis Wacana dari Linguistik Sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kanak.
- Arriyanti dan Andriana Yohan. 2007. *Citra Perempuan dalam Novel Karya Putu Wijaya Kritik Sastra Feminisme*. Padang: Balai Bahasa Padang.
- Atar, Semi. 1980. *Anatomi Sastra*. Padang: Angkasa Raya.
- _____. 1989. *Kritik Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Atmaja, Jiwa. 1993. *Novel Eksperimental Putu Wijaya*. Bandung: Angkasa.
- Awang, Hashim. *Teori Dekonstruksi; Metodologi dan Penerapan: Penelitian Sastra Metodologi dan Penerapan Teori*. (Terjemahan S. Jaafar Husin). Kuala Lumpur: Nohaz Enterprise.
- Baribin, Raminah. 1985. *Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Depdikbud.
- Derrida, Jacques. 2002. *Dekonstruksi Spiritual: Merayakan Ragam Wajah Spiritual* (Diindonesiakan oleh Firmansyah Argus). Yogyakarta: Jalasutra.
- Eagleton, Terry. 1983. *Teori Kesustraan Satu Pengenalan*. (Diindonesiakan oleh Muhammad Hj. Salleh). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Seni Pustaka.

- Esten, Mursal. 1984. *Kritik Sastra Indonesia*. Padang: Angkasa Raya.
- Fadlillah. 2007. "Dekonstruksi Narasi Studi Kasus *Novel Tambo (Sebuah Pertemuan)* Gus tf Sakai" (Tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Fokkema, D.W. & Elrud Kunne Itsch. 2002. *Teori Sastra Abad Kedua Puluh*. (Terjemahan J. Pra Ptadiharja & Kepler Silaban). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fananie, Zainiddin. 2000. *Telaah Sastra*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Faruk. 1994. *Dekonstruksi dalam Studi Sastra: Teori Penelitian Sastra*. Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah.
- Hasanuddin. 1996. *Drama Karya dalam Dua Dimensi Kajian Teori Sejarah dan Analisis*. Bandung: Angkasa.
- Luxemburg, Mieke Bal & Willem G. Wasttijn. 1984. *Pengantar Ilmu Sastra*. (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta: Gramedia.
- Mido, Frans. 1994. *Cerita Rekaan dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Muhadjir, N. 1995. *Teori Pascastrukturalisme: Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: BPEE.
- Norris, Christopher. 2003. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. (Terjemahan oleh Inyik Ridwan Muzir). Yogyakarta: Ar-ruzz.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1995. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Postmodernisme dan Dekonstruksi Realitas: Sebuah Dunia yang Dilipat Realitas Kebudayaan Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Postmodernisme*. Bandung: IKAPI.

- Prakoso, Teguh. 1998. "Dekonstruksi Tokoh-Tokoh Novel *Bekisar Merah* Karya Ahmad Tohari dan Kemungkinannya Digunakan Sebagai Bahan Ajar di SMU" (Skripsi). Semarang: IKIP Semarang.
- Saputro, Heru S. P. 2002. "Menyatukan Wacana-wacana Religius Pemaknaan Dekonstruksi Retoris Cerpen *Kecubung Pengasih*". Jurnal Semiotika.
- Satoto, Soediro. 1995. *Pengajaran Drama I: Buku Pengajaran Kuliah*. Surakarta: UNS Press.
- Sayuti, A.S. 1996. *Prosa dan Fiksi*. Jakarta: Depdikbud.
- Selden, Raman. 1989. *Panduan Membaca Teori Sastra Masa Kini*. (Diindonesiakan Rahmad Djoko Pradopo). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudjiman, P. 1991. *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka.
- Sugiarto, Bambang. 1996. *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumardjo, Jakob. 1981. *Memahami Kesusastraan*. Bandung: Alumni.
- Sumardjo, Jakob & Saini K. N. 1996. *Apresiasi Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.
- Sumitro, dkk. 2007. "Wacana Dekonstruksi dalam Novel *Supernova Episode Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh dan Supernova Episode Akar* Karya Dee". Surabaya: Universitas Airlangga.
- Supriyanto, Teguh. 1997. "Teori Dekonstruksi dalam Karya Sastra di Indonesia" dalam *Lembaran Ilmu Pengetahuan* No. 2, Tahun XXVI. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Tarigan, Henry Guntur. 1991. *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.

Wijaya, Putu. 2004a. *Putri: Buku Pertama*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

_____. 2004b. *Putri: Buku Kedua*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

_____. 2004c. "Bagaimana Saya Mengarang" dalam Novel *Putri: Buku Kedua*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

SOSIAL BUDAYA BALI DALAM CERITA *JAYAPRANA*

Made Pasek Parwatha

1. Pendahuluan

Cerita *Jayaprana* sering juga disebut dengan nama *Jayaprana dan Layonsari*. Dipandang dari sudut isi dan tema, cerita *Jayaprana* cukup mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan, ada pendapat yang menganggap karya sastra *Jayaprana* secara kualitatif dapat disejajarkan dengan karya sastra dunia, seperti *Romeo dan Yuliet* (Prijana, 1956:30).

Nilai yang tersirat dalam cerita *Jayaprana* itu luhur, masalah pendidikan, moral, dan etika menjadi tumpuan harapan penulisnya. Oleh karena itu, sebagai karya sastra cerita *Jayaprana* sering diangkat sebagai bahan lakon dalam *Drama Gong*. Demikian pula dalam cerita *Jayaprana* yakni tokoh utamanya *Jayaprana* dan *Layonsari* sering diangkat sebagai judul lagu daerah, direkam dalam kaset dan diperjualbelikan.

Pada tahun 1950-an cerita *Jayaprana* dijadikan judul film yang diproduksi PFN (Perusahaan Film Negara) Jakarta. Begitu pula pada tahun 1984 cerita *Jayaprana* kembali diangkat sebagai judul film. Menurut beberapa pengamat dinyatakan bahwa mutu produksi film *Jayaprana* tahun 1984 tidak sebagus tahun 1950-an. Turunnya mutu film itu disebabkan oleh adanya perubahan secara dramatis dan berlebihan sehingga timbul kesan dari masyarakat bahwa penyajian film itu kurang berhasil. Hal itu disebabkan oleh tidak ditampilkannya secara utuh tema dan amanat cerita itu sehingga dianggap tidak sesuai dengan latar belakang budaya penciptaan karya sastra itu (Ginarsa dkk, 1985:2). Pemahaman secara mendalam kultural Bali dalam cerita

Jayaprana ditonjolkan dalam tulisan ini. Itulah sebabnya tulisan ini menekankan dari aspek budaya.

Karya sastra *Jayaprana* yang diangkat sebagai bahan pembicaraan dalam tulisan ini, ditulis dalam bentuk prosa liris, jalan ceritanya bertumpu pada alurnya yang arahnya jelas. Karya sastra yang setaraf dengan *Jayaprana* dalam kesusastraan Bali ada beberapa jenis seperti geguritan *Pakang Raras*, *Megantaka*, *Cilinaya*, dan *Bagus Umbara*. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah disajikan dapat diketahui beberapa buah karya tulis yang membicarakan tentang *Jayaprana*. Hasil penelitian itu di antaranya disertai teks dan terjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

H.J. Franken, salah seorang sarjana asing turut memperhatikan cerita *Jayaprana*. Hasil pengamatannya pada umumnya menitikberatkan pada masalah "pengabenan" (pembakaran mayat) tokoh *Jayaprana* dan *Layonsari* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalianget. Artikel beliau berjudul '*The Festival of Jayaprana at Kalianget dalam: Bali Studies in Life, Thought and Ritual*' disusun oleh Editorial Committee W.F. Wertheim, Chairman (1960). Dalam artikel itu sedikit disinggung tentang riwayat hidup tokoh *Jayaprana* dan *Layonsari* dilanjutkan dengan uraian tentang "pengabenan" kedua tokoh itu.

Ilmuwan asing lain yang menaruh perhatian pada cerita *Jayaprana* ialah Dr. C. Hooykaas. Beliau memandangnya dari sudut kajian sejarah dan kebudayaan. Hasil penelitian beliau berjudul *The Lay of Jayaprana* (1958). Dalam buku itu disertakan juga teks cerita dan terjemahan dalam bahasa Inggris. Buku itu kini sudah tidak ada lagi di Kiritya. Naskah yang dijadikan sebagai sumber analisis dalam tulisan ini yakni naskah yang dikarang oleh I Ketut Ginarsa berjudul *Riwayat Jayaprana* (1981). Hal itu disebabkan naskah itu paling lengkap jika dibandingkan dengan naskah yang lain.

2. Latar Budaya Cerita *Jayaprana*

Latar atau *setting* ialah waktu dan tempat perbuatan atau pusat pengisahan cerita yang di dalamnya tercakup seluruh lingkungan cerita seperti budi bahasa, adat istiadat, kebiasaan, cara hidup, juga latar belakang alam atau daerah sekeliling yang digambarkan dalam cerita tersebut. (Koentjaningrat, 1982 – 12 dan 32–33, Abraus, 1981:98, Navis, 1985:43). Mengenai latar belakang sosial budaya cerita dalam geguritan *Jayaprana* itu sepenuhnya melukiskan suasana kehidupan alam Bali. Hal itu dapat dirasakan atau dilihat dari beberapa unsur atau faktor yang digambarkan dalam cerita *Jayaprana*.

Awal peristiwa terjadinya wabah penyakit yang menyerang suatu desa yang mengakibatkan kehancuran dan musnahnya keluarga. Kejadian itu merupakan latar awal kehidupan I *Jayaprana*, hidup sebatang kara, dia dan miliknya akan menjadi kekuasaan raja, dalam istilah Bali disebut *manjing*. Begitu latar kehidupan I *Jayaprana* berada di istana. Jelasnya dapat dilihat pada kutipan ini.

Kantun na paling nyomannan
'Kini tinggal yang ketiga
dadiannya raris manjing,
lalu ia mengabdikan,
mereng dalem pura réko,
konon di dalam istana,
ring ida anaké Agung,
kepada tuanku raja,
wayah wau roras temuang,
usia baru dua belas tahun,
kari alit,
masih kecil,
jemeté tan angoyang-ngonyang
rajinnya bukan kepalang'

(*Jayaprana*,6)

Di samping istilah *manjing* dipakai sebagai penanda unsur Bali, banyak unsur lain lagi yang dapat dikemukakan untuk menyatakan unsur sosial budaya Bali. Sistem urutan kelahiran dalam keluarga masyarakat Bali yang terdiri dari anak pertama disebut *putu*, *wayan* atau *gedé*, anak kedua disebut *madé* atau *nengah*, anak ketiga disebut *nyoman* atau *komang*, dan anak keempat disebut *ketut*. Anak kelima kembali ke putaran seperti tersebut di atas begitu pula seterusnya. Mengenai I Jayaprana urutan kelahirannya dinyatakan anak yang ketiga, maka ia dipanggil I Nyoman Jayaprana (Jayaprana, 6). Demikian juga tentang identitas I Jayaprana dalam tingkatan golongan masyarakat Bali yang terdiri dari *catur wangsa* yaitu *Brahma*, *Satria*, *Wesia*, dan *Sudra* atau *Jaba* yaitu orang kebanyakan atau rakyat. Jadi, sudah sewajarnya kalau I Jayaprana mengabdikan di istana. Pernyataan ini dapat dilihat pada bait nomor 4 geguritan Jayaprana sebagai berikut.

*Né kocap mungguh di lontar,
'Yang termuat dalam lontar,
wong sudra mungguh di gurit,
orang sudra yang diceritakan,
ban mara mapaumahan,
ia baru berkeluarga,
mangelah pianak tatelu,
mempunyai tiga orang anak,
muaninyana dadua,
dua orang laki-laki,
iluh adiri,
seorang wanita,
né paling wayahan pejah,
yang tertua meninggal,'*
(Jayaprana, 4)

Selain nama tokoh I Jayaprana, nama-nama tokoh lainnya seperti Ida Anak Agung (raja), I Saunggaling, Jero Bendesa, De Sengguhu, Ni Made Layonsari adalah nama-nama ciri khas orang Bali.

I Nyoman Jayaprana sejak kecil memang anak yang rajin bekerja dan patuh akan perintah. Dia tumbuh menjadi pemuda tampan dan berbudi luhur. Dia tetap merendah, tahu diri bahwa hidup sebatang kara dan dipelihara orang lain. Dia mempunyai kepandaian membaca dan menerangkan kekawin, yang merupakan sastra yang digemari oleh masyarakat Bali. Hal itu bisa dilihat pada kutipan ini.

*Anaké Agung Ngandika,
'Sri Baginda Raja bersabda,
Jayaprana makekawin,
Bernyanyilah kau Jayaprana,
Arjuna Wiwaha paca,
bacalah kakawin Arjuna Wiwaha
duk Arjunané kaigum,
pada waktu Arjuna digoda,
Matapa di Indrakila,
bertapa di Gunung Indrakila,
Lintang becik,
sangat baik,
Jalan dedariné ngoda.
Perbuatan bidadari itu menggoda.*

(Jayaprana,9)

*Makidung laut nyatuang,
'ia bernyanyi sambil membahas
Buka tuara ada ngajahin,
bagai tak ada orang mengajar,
Suaranyané manis alon
suaranya merdu nyaring,
Anaké Agung ngarungu,*

raja asyik mendengarkan,
I Jayaprana nerangang
I Jayaprana menerangkan,
Ririh manis,
pintar manis,
Tahu maniru karuna.
sungguh serasi dengan elok wajahnya.
(Jayaprana, 10)

Latar belakang pribadi I Jayaprana yang demikian itu bukan hanya raja saja yang bersimpati, namun semua masyarakat tertarik, lebih-lebih lagi para gadis. Dalam hati mereka masing-masing mengharapkan dapat tempat dalam hati I Jayaprana. Sampai-sampai ada gadis yang berkaul bila dapat merebut hati I Jayaprana, berkaul akan menghaturkan *babi guling* pada sanggah *Kemulan*. Kaul yang demikian itu merupakan kaul yang khas Bali, yaitu babi guling atau babi panggang yang dipersembahkan pada *Sanggah Kemulan* yaitu tempat suci untuk persembahyangan keluarga bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu. Jadi kebiasaan itu menggambarkan keadaan adat di Bali. Jelasnya dapat dilihat pada kutipan dibawah ini.

Ada lén maleh angucap,
Ada yang lain berkata,
ada nyuanggang sesangi,
ada yang berkaul,
Yan sih titiang kapaica
"Jika aku dicintai,
ngaturang guling pepitu,
kupersembahkan tujuh babi guling,
ngarepin Sanggah Kemulan
di hadapan *Sanggah Kemulan*
pesu mulih
ke luar masuk

majekjekan pitawala.
beralaskan kain cindai".
(Jayaprana, 12)

Selain babi guling yang dapat menunjukkan latar Bali, juga binatang yang dipersiapkan untuk dipotong pada pesta dan upacara perkawinan I Jayaprana dengan Ni Layonsari seperti itik, ayam, babi, dan yang lainnya. Kebiasaan memotong itik adalah kebiasaan di Bali. Dapat dilihat pada kutipan berikut.

Gustiné ngicen carikan,
‘Raja telah menjamu,
tekén kaulane sami,
kepada rakyat baginda semua,
ngejuk kebo ka pangulon.
menangkap kerbau ke pengulon,
kucité sampun mabugbug,
anak babi sudah berkumpul,
pacing gulingé puniki,
untuk babi guling,
sampun tragi,
sudah siap,
bébék siapé cumadang.
Itik dan ayam sudah tersedia’.
(Jayaprana, 54)

Demikian juga hal yang lainnya seperti *Banjar* dan *kulkul*, cara berhias dan berpakaian adat yang dikenakan oleh I Jayaprana dan Ni Nyoman Layonsari, menentukan hari baik untuk pernikahan I Jayaprana dengan Ni Layonsari serta tempat-tempat nama desa yang dilalui oleh I Jayaprana bersama dengan rombongannya ketika menuju Teluk Terima, semua hal itu menggambarkan latar cerita I Jayaprana adalah tempat-tempat dan suasana, adat istiadat,

kebiasaan, kehidupan alam Bali.

Banjar merupakan organisasi terkecil pada masyarakat Bali, dan juga *Banjar* adalah tempat untuk organisasi masyarakat itu berkumpul. Sedangkan *kulkul* yaitu kentongan alat yang sangat penting bagi *Banjar* tersebut. Suara kentongan untuk mengumpulkan anggota masyarakat *banjar* dan suara kentongan mempunyai nilai tertentu bagi masyarakat Bali. Kata *kulkul* dalam geguritan Jayaprana dapat dilihat pada bait 57, *makemplung kulkul majalan* artinya kentongan berbunyi berjalanlah, kalimat ini adalah perintah bagi raja kepada rakyatnya. Sedangkan kata *banjar* dapat dijumpai pada Jayaprana bait 20, *magenah di Banjar Sekar* artinya tinggal di banjar Sekar. Banjar Sekar adalah tempat tinggal seorang gadis cantik anak Jero Bendesa yang bernama Ni Layonsari. Jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut.

*Tan pendah déling kencana,
'Tak ubahnya patung emas,
Mawasta Ni Layonsari
bernama Ni Layonsari,
I Jayaprana kaleson,
I Jayaprana terpesona,
Kocap pinak Jero Bendesa,
putri Jero Bendesa,
Uli kangin,
dari timur,
Magenah di Banjar Sekar,
tinggal di Banjar Sekar'*

(Jayaprana, 20)

Ketika Ni Nyoman Layonsari pergi ke pasar, dia berhias dan mengenakan pakaian ciri khas Bali. Bersanggul yang disebut *pusung lunggah suahan* yaitu sanggul dengan rambut mengurai dan memakai *anteng* yaitu secarik kain

sejenis selendang yang dipakai untuk menutupi dada supaya payudara tidak kelihatan kembar. Cara berpakaian yang demikian itu adalah khusus cara berpakaian gadis Bali, yang sekarang masih dapat dilihat pakaian upacara adat. Lebih jelas dapat dilihat pada kutipan ini.

*Kagét teka uli kaja,
Tiba-tiba datang dari utara,
Makelap masenteng kuning
tampak gadis berkamben kuning,
Mapusung suahan
rambut bersanggul mengurai,
Malédpéd ka tundun
menjulur hingga ke punggung,
bangkiang lengkiang adeg lanjar,
pinggang ramping badan tinggi,
susu nyangkih,
payudara montok,
kadi nyuh gadingé kembar,
bagai putik kelapa gading kembar*

(Jayaprana, 18)

Ni nyoman Layonsari memang gadis cantik, berbudi, dan setia. Pada pandangan pertama ketika berjumpa di pasar. Saat I Jayaprana mengamati gadis-gadis cantik, maka pilihan hatinya jatuh pada Ni Layonsari. Hal itu dilaporkan kepada raja junjungannya yang memerintahkan dia untuk mencari jodoh. Mendengar kabar itu raja sangat gembira dan meminta kepada De Sungguhu untuk mencarikan hari yang baik, kapan sebaiknya untuk melangsungkan pernikahan I Jayaprana dengan Ni Layonsari. De Sungguhu mengajukan hari yang baik itu pada hari *Anggara Manis Kuningan, Sasih Kapitu*. Jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

*Anaké Agung ngandika,
Raja bersabda,*

Bin pidan melali mengambil
"Kapan hari baik kawin"?
De Sungguhu matur alon,
DeSungguhu menyembah,
Kocap malih ululikur,
"kira-kira lagi dua puluh delapan,
Anggara Manis Kuningan
hari Selasa Umanis Kuningan,
Lintang becik,
sangat baik,
Sasih kapitu irika
Bulan ketujuh saat itu,
(Jayaprana, 25).

Perhitungan hari baik yang berdasarkan perhitungan *pawukon*, *wewaran*, *sasih* dan *purnama tilem* atau *bulan terang* dan bulan gelap, perhitungan hari baik yang demikian itu sampai sekarang masih tetap berlaku bagi adat masyarakat Bali yang beragama Hindu. Setelah hari baik untuk perkawinan itu pasti, lalu raja menulis surat yang diberikan I Jayaprana untuk disampaikan kepada Jero Bendesa di Banjar Sekar dengan permintaan supaya rela memberikan Ni Layonsari untuk dikawinkan dengan I Jayaprana. Selanjutnya raja memerintahkan para *perbekel* atau kepala desa bersama rakyatnya untuk membangun rumah tempat tinggal I Jayaprana setelah kawin.

Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Anaké Agung ngandika,
'Raja bersabda,
Buin pidan melali mengambil
"Kapan hari baik kawin? ",
De Sengguhu matur alon,
De Sengguhu menyembah,
"Kocap malih ululikur,

kira-kira lagi dua puluh delapan,
Anggara Manis Kuningan,
hari Selasa Umanis Kuningan,
Lintang becik,
sangat baik,
Sasih Kapitu irika,
Bulan Ketujuh saat itu.'
(Jayaprana, 25)

Perhitungan hari baik yang berdasarkan perhitungan *pakuwon, wewaran, sasih, dan purnama tilem* atau bulan terang dan bulan gelap, perhatian hari baik yang demikian itu sampai sekarang masih tetap berlaku bagi adat masyarakat Bali yang beragama Hindu. Setelah hari baik untuk perkawinan itu pasti, lalu raja menulis surat yang diberikan I Jayaprana untuk disampaikan kepada Jero Bendesa di Banjar Sekar dengan permintaan supaya rela memberikan Ni Nyoman Layonsari untuk dikawinkan dengan I Jayaprana. Selanjutnya raja memerintahkan para *perbekel* atau kepala desa bersama rakyatnya untuk membangun rumah tempat tinggal I Jayaprana setelah kawin.

Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut

Anaké Agung ngandika,
'Raja bersabda,
tekén perbekel sami,
kepada kepala desa sekalian,
"Maman pada kena karya,
"Paman-paman harus bekerja,
ngawé umah apang lung,
membangun rumah yang bagus,
ngawanang I Jayaprana,
untuk I Jayaprana,
apang gati,
supaya giat,

*apang pragat dasa dina”’
agar selesai sepuluh hari”’*
(Jayaprana, 42)

*Balé Singosari dadua,
‘Balai Singosari dua buah,
Mancagina bandungsari,
balai Mancagina bandungsari,
Pacang pasaréna réko,
untuk tempat tidurnya,
Bala gajah makakipu,
balai gajah berkumbang,
Sios né né di jabaan,
lain lagi yang dimuka,
Ngapit kori,
mengapit pintu,
Caka uhi makembaran.’
Balai bertiang delapan kembar,’*
(Jayaprana, 43)

Bangunan rumah yang dihadiahkan raja kepada I Jayaprana adalah bangunan tradisonal Bali yang penuh dengan ukiran dan pahatan cerita dari hasil sastra terkenal, seperti cerita Malut dan Wargasari, dioles dengan perada halus dan dihias dengan patung garuda. Semua ini sebagai tanda arsitektur Bali.

Pada saat hari upacara perkawinan I Jayaprana memakai busana adat perkawinan Bali yang megah. Memakai kain dengan *lancing* atau ekor kain yang indah, berkampung, berdestar, bergelung, *garuda mangkur*, berbunga dan memakai keris yang berhulukan emas permata. Lebih jelas dapat dilihat pada kutipan berikut ini (Jayaprana, bait 65)

Di samping busana adat itu sebagai penanda budaya Bali, tontonan yang ikut memeriahkan upacara perkawinan I Jayaprana dan Ni Layonsari merupakan kesenian Bali seperti pertunjukkan *gambuh*, *wayang*, *wayang wong*, *baris tumbak*, *baris perasi*, dan *baris ketok jago* (Jayaprana, bait 61, 62, 63)

Latar cerita geguritan Jayaprana seperti yang telah diuraikan di atas adalah juga merupakan insiden yang turut memberi pengaruh terhadap tokoh utamanya yaitu I Jayaprana, Ni Layonsari dan raja. Latar kehidupan I Jayaprana yang hidup sebatang kara dengan wajah tampan dan pribadi luhur, santun serta tahu membawa diri, sehingga dia dengan mudah mendapat simpati, baik di hati raja maupun di hati rakyat. Dengan demikian I Jayaprana dapat mencapai puncak kebahagiaannya. Hal itu bisa terjadi karena latar pribadi raja yang mempunyai kekuasaan penuh. I Jayaprana dipelihara, dibesarkan, dibuatkan rumah lalu dikawinkan. Setelah raja melihat wajah Ni Layonsari istri I Jayaprana sangat cantik jelita lalu raja jatuh cinta, ingin merebut Ni Layonsari dari tangan I Jayaprana. Dengan tipu muslihat maka I Jayaprana disingkirkan, dibunuh di Teluk Terima (di Bali Bagian Barat). Sebenarnya I Jayaprana sudah mempunyai firasat bahwa dirinya akan dibunuh, hal itu dirasakan ketika dalam perjalanan menuju Teluk Terima kakinya tersandung batu lalu terjatuh, dikuatkan lagi dengan cerita mimpi istrinya bahwa rumahnya dihanyutkan banjir. Walaupun demikian I Jayaprana yang berhati besar, pasrah, tahu diri tetap melanjutkan perjalanannya melalui desa-desa, seperti Tegal Lenga, Celukan Bawang, Grokgak, Pulaki, Pemuteran, Tanjung Sendang, Pengametan menuju Teluk Terima. Di sana I Jayaprana dibunuh, ditikam oleh I Saunggaling. Sebagai tanda bahwa I Jayaprana orang baik-baik, berbudi, tahu diri, dan penuh pengabdian kepada junjungannya, maka ketika darahnya menetes mengeluarkan

bau harum, disertai dengan tanda-tanda di langit seperti pelangi melintang, pelangi tegak, hujan gerimis, sinar terang dan tanda bumi yaitu gempa keras. Menurut kepercayaan orang Bali pertanda itu memberikan isyarat bahwa orang yang mati itu adalah orang yang tidak bersalah (Jayaprana, bait 116).

Setelah I Jayaprana mati, Ni Layonsari yang setia menanti di rumah mendapat firasat buruk dengan adanya suara-suara burung gagak yang menyayat hati di atas rumahnya. Atas berita dari seseorang yang turut ke Teluk Terima yang baik hati kepada Ni Layonsari maka diketahuilah bahwa I Jayaprana sudah meninggal, juga maksud licik dari sang raja diketahuinya. Teringatlah Ni Layonsari akan janji setianya dengan I Jayaprana untuk berdua sehidup semati. Sebagai bukti bahwa Ni Layonsari adalah gadis cantik yang berbudi luhur, setia akan janji, setia dan berbakti kepada suami maka sebelum ia sempat dijamah oleh sang raja, dia telah lebih dahulu menikam dirinya sampai mati. Ketika raja mengetahui kejadian itu, beliau menjadi murka, gelap mata lalu mengamuk dan akhirnya bunuh diri. Berakhirlah kekuasaan raja yang berlatarkan pribadi berkuasa mutlak.

2.1 Desa Kalianget sebagai Pusat Kisah Cerita

Kalianget adalah sebuah desa kecil terdapat di bagian utara pulau Bali, tepatnya di daerah Kabupaten Buleleng kurang lebih 20 km sebelah barat kota Singaraja. Diperhatikan dari letak geografisnya desa Kalianget berada di sebelah barat desa Banjar yang juga menjadi ibukota kecamatan Banjar.

Dilihat dari lingkungan ekologi desa Kalianget terletak tepat di kaki pergunungan yang membujur dari barat ke timur. Ketut Ginarsa menyebut dalam tulisannya

bahwa desa Kalianget tergolong desa kecil dan miskin. Masyarakat desa itu memiliki lahan sawah sangat terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya ada yang berburuh di desa sekitarnya atau di kebun-kebun kopi di daerah pegunungan, bertani dan juga menjadi pegawai negeri.

Nama Desa Kalianget tidak tersebut dalam naskah lontar Jayaprana yang tersimpan di perpustakaan Kirtya dan perpustakaan lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar. Nama desa ini hanya disebutkan dalam naskah lontar geguritan Jayaprana yang tersimpan di museum Leiden Negeri Belanda.

Desa Kalianget sebagai bekas sebuah kerajaan sampai sekarang masih dijumpai bekasnya, antara lain berupa tempat persembahyangan yang disebut *Pura Prabu*. Di sekitar lokasi tempat berdirinya kerajaan yaitu di sekitar halaman rumah I Jayaprana dijumpai peninggalan berupa lumping (lesung) batu besar. Begitu pula bangunan suci untuk tempat persembahyangan I Jayaprana dan Layonsari masih ada sampai sekarang. Tempat persembahyangan I Jayaprana dan Layonsari itu disebut *pemrajan jaran Guyang*. Sebagai latar cerita masih disebut-sebut beberapa nama desa yang letaknya jauh ke arah barat. Misalnya, nama Desa Pengulon, Grokgak, Tegallenga, Tinga-Tinga, Banyu Poh, Pulaki, Sendang, Pengametan, Celukan Bawang, dan Teluk Terima. Nama desa atau tempat di atas tidak semata-mata diketengahkan oleh pengarang untuk memperkuat kedudukan latar, tetapi juga sebagai gambaran betapa jauhnya perjalanan I Jayaprana ketika ia dan rombongan meninggalkan Desa Kalianget menuju Teluk Terima. Bahkan bukan itu saja yang dimaksud oleh pengarang, mengingat dalam bait tertentu nama Pangulon dikatakan sebagai tempat menangkap kerbau oleh para perbekel untuk keperluan upacara perkawinan I Jayaprana dan Layonsari

(Jayaprana, bait 54).

Nama Banjar Jaran Guyang sebagai tempat asal pengarang hanya disebutkan dalam versi lontar Jayaprana yang tersimpan di museum Leiden pada bait 2 baris 1. Banjar itu sebenarnya masih dalam lingkungan Desa Kalianget. Selanjutnya diceritakan letak rumah pengarang di sebelah timur menghadap ke barat. Di depan pintu rumahnya tumbuh pohon bunga Sarikonta. Pengarang disebutkan berkulit putih berambut kejur, sebagaimana dilukiskan dalam bait dibawah ini.

*Di Banjar Jaran Guyang,
'Di Banjar Jaran Guyang,
umahnya dauh jlinjing,
rumahnya sebelah barat selokan,
dangin tlabah réko,
sebelah timur kali kecil,
dangin rurung mesa kauh,
sebelah timur menghadap ke barat,
padiwangan sarikonta
di depannya pohon sarikonta,
putih-putih,
orangnya putih-putih,
boknya numbak ngelebang"
rambutnya kejar kaku,'*

(Jayaprana,2)

Jadi secara implisit pengarang mengaku berasal dari Banjar Jaran Guyang di Kalianget. Kalau pengarang berasal dari luar Kalianget, sudah barang tentu lokasi peristiwa tidak dapat diceritakan secara lengkap.

2.2 Teluk Terima tempat Kuburan I Jayaprana

Tempat yang namanya Teluk Terima ada di wilayah Buleleng barat, yaitu di sebelah barat daerah Pulaki.

Daerahnya berhutan, agak ke pantai terdapat bakau lebat. Waktu dahulu di daerah ini ialah tempatnya berkeliaran binatang kerbau, kijang, babi hutan, dan ular. Dalam kaitan cerita Jayaprana nama Teluk Terima mempunyai makna tragis, mengingatkan kita akan nasib malang yang dialami oleh tokoh I Jayaprana. Di Teluk Terima itu ia direngut nyawanya oleh patih raja bernama I Gusti Saunggaling. Kematian akibat akal bulus rajanya, dengan dalih di tempat ini ada sejumlah wong bajo (anak buah perahu) yang sering mangkal di pantai Teluk Terima mencari air atau berburu kijang, dituduh membuat kekacauan. Betapa berat hati Jayaprana meninggalkan istrinya Layonsari. Kepergiannya itu untuk selama-lamanya. Sedangkan makna magis bagi Teluk Terima khususnya di sekitar pusara I Jayaprana, dapat memberi petunjuk kepada kita bahwa tempat itu dikeramatkan oleh golongan masyarakat tertentu. Keramat selain dikaitkan dengan tertanamnya jasad I Jayaprana, juga karena tempat itu sering diziarahi oleh orang-orang tertentu dengan maksud mohon keselamatan membayar kaul karena pernah mendapat berkah dan lain-lain.

Dewasa ini pemerintah daerah Kabupaten Buleleng tidak tinggal diam. Tempat seperti Teluk Terima dipugar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya di Bali utara. Nama Teluk Terima telah didokumentasikan sebagai lokasi mempunyai arti sejarah.

3. Simpulan

Cerita Jayaprana merupakan salah satu karya sastra Bali yang bermutu. Hal itu dilatar belakangi oleh adanya nilai estetika, nilai moral, dan nilai agama. Demikian pula, cerita Jayaprana mencerminkan adanya unsur kesejarahan seperti peninggalan kuburan dan nama tempat Teluk Terima, Desa Kalianget, merupakan kisah cerita. Akan tetapi, memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Cerita Jayaprana memiliki

unsur budaya Bali yang sangat mendukung perkembangan pariwisata budaya khususnya bagi masyarakat Bali utara (Singaraja).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M.H. 1981. *Aglossary at Literature Terms*. New York: Holt, Rivehart and Winston.
- C. Hooykaas, Phd. 1958. *The Lay Of Jayaprana*. London: I Waac and Company. Ltd
- Franken, H.J. 1960. "*The Festival of Jayaprana at Kalianget*" dalam *Bali Studies in Life Thonghat and Ritual*. Editorial Committee W.F. Wertheim. Chairman.
- Ginarsa, I Ketut. 1981. *Riwayat I Jayaprana*. Singaraja: Kepala Bagian Kesra/Pimpinan Proyek Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng.
- , 1985. *Struktur "Geguritan Jayaprana"*. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali Depdikbud.
- Koentjaraningrat. 1982. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Navis, A.A. 1985. "*Warna Lokal Minangkabau dalam Sastra Indonesia Mutakhir*". Dalam *Horizon*, No. 2. Jakarta.
- Priyana. 1956. "*Empat Duka Tjarita Pertjintaan*" dalam *Bahasa dan Budaya* IV/3, Februari.

**BEBERAPA CARA PENULISAN AKSARA BALI
(PASANG AKSARA BALI)**

I Made Sudiarga

1 Pendahuluan

Aksara merupakan salah satu jenis simbol visual dari suatu bahasa. Bahasa Bali dapat ditulis dengan dua jenis simbol yaitu dengan tulisan Bali dan tulisan Bali Latin. Tulisan Bali erat hubungannya dengan *pasang aksara* Bali karena kalau salah menulis bisa menimbulkan arti lain lebih-lebih kata-kata yang homonim. Oleh karena itu, pengetahuan *pasang aksara* Bali penting sekali dalam hubungan membahas isi rontal-rontal (Tinggen, 1993:1).

Aksara Bali ada dua macam yaitu aksara *swara* dan aksara *wyanjana*. Kedua macam aksara itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok, meliputi: (1) *wreastra*, aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Bali lumbrah, misalnya: pipil, surat, pengumuman, dan lain-lainnya; (2) *Swalalita*, aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Kawi, bahasa Kawi Tengahan, dan bahasa Sanskerta, misalnya kidung, kakawin, parwa, dan sloka; (3) aksara *modre*, aksara yang digunakan untuk menulis kadyatmikan, misalnya japa atau mantra (Simpun, 2004:1).

Cara penulisan aksara Bali dalam kepustakaan lontar masih berbeda-beda, ada yang memakai *pasang tumpuk*, ada yang memakai *pasang jajar*, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan perbedaan cara penulisan itu, Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bali telah berusaha menyeragamkan penulisan *pasang aksara* Bali dengan jalan mengadakan *pesamuhan-pesamuhan*, antara lain, Pesamuhan Agung Bahasa Bali tahun 1957 dan Pesamuhan Agung Kecil tahun 1963 di Denpasar. Dalam pesamuhan itu dibahas penulisan bahasa

Bali dengan huruf Latin dan huruf Bali. Pesamuhan itu menghasilkan buku *Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin dan Huruf Bali* oleh IG.K.Ranuh dan IK.Sukrata, kemudian buku itu disempurnakan lagi dalam Pesamuhan Agung Kecil tahun 1963, terbitlah buku *Pedoman Perubahan Ejaan Bahasa Bali dengan huruf Latin dan Huruf Bali* oleh I N. Tinggen tahun 1971. Dalam Pesamuhan Agung Kecil Bahasa Bali ditetapkan pemakaian pasang jajar karena: sesuai dengan tulisan Latin, gampang mengisi guru lagu, dan tidak menyalahi uger-uger yang berbunyi *seluruh aksara yang digantungi atau ditempleli mati* (Sudiarga dan I Gusti Ketut Ardhana, 2000:34 – 35).

Dewasa ini ejaan bahasa Bali masih berpegang pada ejaan Purwadresta dengan maksud agar dapat menyelami isi rontal- rontal. Sebagai pegangan pokok penulisan pasang aksara Bali diputuskan dalam pesamuhan itu memakai pasang aksara yang terdapat pada rontal Ramayana oleh Dr. Kern dan Baratayuda oleh Dr. Gunning, sedangkan penulisan Bali Latin mengacu kepada bahasa Indonesia, hanya jumlah abjadnya yang berbeda. Mengenai buku-buku yang resmi dapat dipakai saat ini, yaitu untuk menuliskan bahasa Bali dengan huruf Latin, ialah *Ejaan Bahasa Daerah Bali yang Disempurnakan (Huruf Latin)*, oleh Dinas Pengajaran Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan untuk pasang aksara Bali dipergunakan buku *Pasang Aksara Bali*, oleh I W. Simpen AB. yang telah diteliti kembali oleh Panitia Peneliti Naskah Ejaan Bahasa Bali Huruf Bali dan Huruf Latin tahun 1979 di Denpasar.

2 Penulisan Huruf (Nyurat Aksara)

Sebelum menulis kata-kata bahasa Bali (selanjutnya ditulis bB) dengan aksara Bali, patut diketahui *uger-uger* (hukum) di bawah ini.

- (1) Kata-kata bB ditulis dengan aksara Anacaraka yang berjumlah 18 aksara *wianjana* (berupa lagna)

dan 6 aksara suara (ditunjukkan dengan *wisarga*:
𑀅𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 (a, i, u, e, o, ē).

- (2) Kata-kata bB yang berasal dari bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta ditulis dengan aksara *Swalalita*, meliputi: 18 aksara Anacaraka, aksara *mahaprana*, aksara *murdania*, aksara suara *hresua/dirga*, dan aksara *usma* (𑀵𑀺𑀻).
- (3) Kata-kata bB yang berasal dari bahasa lain (bahasa daerah lain, bahasa Indonesia, bahasa asing) kecuali bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta ditulis sesuai dengan ucapan dalam bB-nya. Aksara *wianjana*-nya memakai Anacaraka (18). Aksara suaranya memakai 𑀅𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 (a,i,u, e, o) (Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2005:11).

2.1 Huruf Lagna

Huruf Lagna adalah aksara yang belum mendapat *pangangge* (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2005:12).

(1) Suara a/a/ yang melekat pada lagna itu akan hilang, bila:

(a) lagna mendapat *pangangge* suara, umpama:

𑀅𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 (ha/a, e/ , i, u, e/e, o) .

𑀅𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 (na, ne/n /, ni, nu, ne/ne, no)

𑀅𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 (ca, ce/c , ci, cu, ce/ce, co,) dan lain-lainnya.

(b) Lagna yang mendapat *gantungan* atau *gempelan*, umpama:

𑀅𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = na 𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = nta → 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = panta

𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = la 𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = lpa 𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = kalpa

𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = nga 𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = ngka → 𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = nangka, dan lain-lainnya.

(c) Lagna yang mendapat *adeg-adeg* (...), umpama:

𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = pa 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = p → 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = alap

𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = ma 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = m 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = sugem

𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = da 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = d 𑀵𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿 = ilid

- (2) Lagna yang terdapat pada akhir kata (*kecap menga* bersuara *a/a*) yang berasal dari bahasa Indonesia dan belum terasa seperti *bB*, ucapannya /*a*/, umpama:

ꦒꦶꦏꦶꦩꦏꦏꦸꦁꦲꦤ꧀ ucapannya / *Indonesia* /

ꦥꦫꦩꦸꦏꦏꦸꦁꦲꦤ꧀ ucapannya / *pramuka* /

ꦏꦺꦠꦸꦁꦲꦤ꧀ ucapannya / *ketua* /

ꦲꦶꦥꦏꦸꦁꦲꦤ꧀ (ꦲꦶꦥꦺꦴꦲꦏꦸꦁꦲꦤ꧀) ucapannya / *ipa* / (*l i p e a l*)

ꦲꦱꦺꦩꦲꦁꦲꦤ꧀ ucapannya / *es em a* / dan lain-lainnya.

2.2 Gabungan Konsonan (*Rangkepan Wianjana*)

2.2.1 Gabungan Huruf Konsonan sesuai dengan Warga Aksara

Gugus konsonan atau rangkapan *wianjana* tulisan Bali pada suatu kata harus sewarga. Kalau tidak sewarga maka berlakulah hukum (*uger-uger*) Asimilasi gugus konsonan yaitu penyesuaian rangkapan *wianjana* tersebut. Pengelompokan-pengelompokan atau rangkapan *wianjana* itu disesuaikan dengan daerah artikulasinya atau warga aksaranya (Tinggen, 1996:15).

- (1) *Rangkepan* aksara *wianjana nc* dan *nj*.

Gabungan konsonan yang mengikuti warga aksara hanya diberlakukan pada sebuah kata dasar. Setiap kata dasar bila ada aksara *n* mendapat gantungan *c* dan *j*, wajib *n* itu diganti dengan *ny* (\tilde{n}). Dalam gabungan konsonan *nc* dan *nj*, lambang *n* termasuk warga *dantia*, *c*, *j* termasuk warga *talawia*. Jadi, tidak sewarga atau tidak sederhana artikulasi. Dalam hal ini berlakulah hukum *regresif* pada penulisan Bali, maksudnya lambang bunyi yang terdapat di belakang *c* dan *j* mempengaruhi bunyi yang terletak di muka *n*. Dengan demikian, *n* menyesuaikan diri dengan warga *c* dan *j* menjadi *ny* (\tilde{n}) (Tinggen, 1996:15). Contoh:

Rangkepan ᮊᮦ = *nyca* → *nca*

panca = ᮊᮦᮊᮦ

pancing = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦ

buncing = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ

Rangkepan ᮊᮦ = *nyja* → *nja*,

panji = ᮊᮦᮊᮦ

panjang = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦ

lanjang = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ

Dalam gabungan kata atau frase gabungan konsonan itu wajib ditulis sebagai berikut.

bucun capil = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ (ᮊᮦ)

talin jaran = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ (ᮊᮦ)

(2) Rangkepan aksara wianjana ᮊᮦ = *sca*

Gugus konsonan *sc*, lambang *s* adalah termasuk warga dantya dan lambang *c* termasuk warga *talawia*, jadi tidak sewarga. Dalam hal ini, berlaku juga hukum regresif, yaitu *s* harus menyesuaikan diri menjadi *ś* (*sa saga*). Contoh:

pascad = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ

pascima = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ

Di dalam gabungan kata atau frase patut ditulis seperti berikut, umpama:

batis cagak = ᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦᮊᮦ (ᮊᮦ)

(3) Rangkepan aksara wianjana ᮊᮦ = *jnya*

Gugus konsonan *dny*, lambang *d* termasuk warga dantia dan *ny* termasuk warga *talawia*. Jadi, juga tidak sewarga. Dengan demikian berlaku hukum yang berbunyi: setiap kata dasar bila ada huruf *d* mendapat gantungan *ny*, wajib *d* itu diganti dengan *j*. Contoh:

pradnyan-prajnyan = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪
adnyana - ajnyana = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪
yadnya - yajnya = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

(4) Rangkaian aksara *wianjana* ᮘᮞ᮪ = ssa, umpama:

Dussasana = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪

(5) Rangkaian ᮘᮞ᮪ sta ; ᮘᮞ᮪ sna; ᮘᮞ᮪ nta.

Contoh:

dusta = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

wasta = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

kanta = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

kanti = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

tresna = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

Kresna = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪

(6) Rangkaian aksara *wianjana* ᮘᮞ᮪ = rn.

Lambang *r* adalah termasuk warga *murdania*, sedangkan *n* termasuk warga *dantia*. Dalam hal ini hukumnya kelihatan terbalik bukan lagi regresif melainkan progresif, artinya aksara yang terletak di muka mempengaruhi aksara yang terdapat di belakangnya. Hukumnya berbunyi setiap kata dasar bila aksara yang terletak di depan aksara *r* atau *masurang* (*r*) di belakang terdapat aksara *n*, wajib *n* itu diganti dengan ᮘᮞ᮪ rambat (*ᮘᮞ᮪ murdania*). Contoh:

karna - karᮒa (*ᮘᮞ᮪ murdania*) = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪

rana - raᮒa (*ᮘᮞ᮪ murdania*) = ᮘᮞ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪

Berkenaan dengan penulisan kata *karᮒa* pada tulisan Bali tidak memakai duita, karena menyalahi fonologi di samping tidak praktis kalau ditulis dengan huruf Bali Latin. Jadi, tulisan *karᮒa* menurut hasil Pasamuhan Agung Kecil tahun 1963 tidak memakai duita lagi. Cukup ditulis: ᮘᮞ᮪ᮒ᮪ᮒ᮪

(7) Rangkaian aksara *wianjana* ᮘᮞ᮪ = rs

Gugus konsonan *rs*, lambang *r* adalah termasuk warga *murdania* dan lambang *s* adalah *dantia*. Dalam hal ini berlaku hukum progresif yang berbunyi setiap kata

dasar bila aksara yang terletak di depan aksara *ra* atau masurang (*r*) diikuti oleh aksara *s*, maka *s* itu wajib diganti dengan aksara ξ *sapa* (*s murdania*). Contoh:

warsa - *warṣa* (ξ *sapa*) = ꦮꦫꦱ
rasa - *rāṣa* (ξ *sapa*) = ꦫꦱ

- (7) Lepas dari asal-usul bahasa, maka penulisan Bali dari bunyi rangkap yang sewarga tidak mengalami perubahan, misalnya:

Warga *danti*:

ꦱꦺꦤ꧀ꦢ dalam kata ꦱꦺꦤ꧀ꦢꦶ = *sandi ngucap*
 ꦒꦤ꧀ dalam kata ꦒꦤ꧀ = *ganda*
 ꦲꦱ꧀ dalam kata ꦲꦱ꧀ = *astu*
 ꦲꦱ dalam kata ꦲꦱ = *asta*
 ꦲꦤ꧀ dalam kata ꦲꦤ꧀ = *antyang*.

Warga *murdania*:

ꦏꦤ꧀ dalam kata ꦏꦤ꧀ = *kanta*
 ꦥꦤ꧀ dalam kata ꦥꦤ꧀ = *pandu*
 ꦮꦱ꧀ dalam kata ꦮꦱ꧀ = *wasta*
 ꦠꦫ꧀ dalam kata ꦠꦫ꧀ = *tresna*.

Warga *talawia*:

ꦏꦚ꧀ dalam kata ꦏꦚ꧀ = *kancil*
 ꦱꦤ꧀ dalam kata ꦱꦤ꧀ = *sanja*
 ꦲꦗ꧀ dalam kata ꦲꦗ꧀ = *ajnyana*
 ꦥꦱ꧀ dalam kata ꦥꦱ꧀ = *pascad*.

2.2.2 Pluta

Rangkepan aksara *wianjana* yang berbeda di dalam kata dasar disebut *pluta*. Berdasarkan ucapannya dalam bB, *pluta* itu banyak yang hilang atau berubah bentuknya, misalnya:

smreti = ꦱꦩꦫ꧀ *semerti* = ꦱꦩꦫ꧀
stuti = ꦱꦠ꧀ *astuti* = ꦲꦱꦠ꧀

ksama = കുസമാ *aksama* = ഏകസമാ
ksatria = കുസത്രിയാ *satria* = സത്രിയാ
stri = സ്ത്രീ *istri* = പത്നീ dan lain-lainnya.

2.2.3 Dwita

Dwita adalah aksara *wianjana* yang digantungi oleh aksara *wianjana* yang sama aksaranya. Kata yang memakai *dwita* berasal dari akar kata bahasa Sanskerta. Pemakaian bentuk *dwita* sebelum Pasamuhan Agung Kecil tahun 1963 berbeda dengan sekarang, yaitu:

- (1) Dahulu ada *uger-uger* yang berbunyi: setiap kata dasar bila aksara yang terletak di muka memakai *surang* maka aksara yang terletak di belakangnya patut *madwita*.

Contoh:

arja – *arjja* = അര്ജ്ജ
sarwa – *sarwwa* = സര്വ്വ
tarjja – *tarjja* = തര്ജ്ജ
karna – *karnna* = കര്ണ

- (2) Sekarang *dwita* karena *surang* dihapuskan dalam Pasamuhan Agung Kecil Bahasa Bali tahun 1963 di Denpasar, karena kurang praktis kalau ditulis dengan huruf Bali Latin dan menyalahi fonologi. Lihat tulisan Bali, kata *karṇa*, yaitu ṇ warga murdania dan gantungan n dantia. Hal ini tidak mungkin artikulator (lidah) menyentuh dua titik artikulasi sekaligus. Jadi tulisan:

arja, tetap *arja* = അര്ജ
sarwa, tetap *sarwa* = സര്വ
tarja, tetap *tarja* = തര്ജ
karna – *karṇa* = കര്ണ

Kini yang masih utuh adalah *dwita* karena perubahan bentuk dari akar kata menjadi kata. Contoh:

cit + ta = citta = མིཐོལ་

budh + ta = buddha = འཇམ་མཉམས་

yudh + ta = yuddha = ཡུའུ་ཐུ་

sidh + ta = siddha = མཐོག་མཐུན་

(Perubahan + *ta* menjadi *da*, adalah hukum bahasa Sanskerta)(Tinggen, 2004:11).

2.2.4 Huruf Semi Vokal (Aksara Ardaswara)

Aksara *Ardasuara* y, r, l, w, (ཡ་ར་ལ་འ་ཡ་), dapat berfungsi sebagai aksara *wianjana* dan aksara swara. Bila berfungsi sebagai *wianjana* atau konsonan bentuknya ditulis berjajar seperti semula yaitu: ཡ་ར་ལ་འ་ཡ་. Bila berkedudukan sebagai suara atau vokal bentuknya berubah menjadi *gantungan*, yaitu གྲི གྲུ གྲཱ གྲོ

(1) Setiap kata dasar yang terdiri atas dua suku kata, bila salah satu suku katanya memakai aksara *ardasuara*, *ardasuara* itu berkedudukan menjadi konsonan. Contoh:

biu = བྱིལ་

sera = སེར་

sela = སེལ་

tua = ཏུའ་

wetu = འཇུའ་

lemah = ལེམ་མེད་ dan lain-lainnya.

(2) Kata-kata di bawah ini, aksara *ardasuara* berfungsi sebagai suara atau vokal, misalnya:

tabia = ཏའི་བྱིལ་

putra = ཕུ་ཏུའ་

tlaga = ཏུལ་ལ་

satua = སའུའ་ dan lain-lainnya.

rendang = ၵၵၵ

barang = ၵၵၵ

- (b) Setiap kata dasar yang terdiri atas dua suku kata yang aksara *wianjana*-nya sama dan keduanya mendapat *tengenan* ၵၵၵ keduanya ditulis dengan *cecek* (´) meskipun sudah di-*anusuara*-kan atau mendapat seselan *-er-* dan *-el-*, Contoh:

cangcang = ၵၵၵ

nyangcang = ၵၵၵ

bengbeng = ၵၵၵ

brengbeng = ၵၵၵ

kungkung = ၵၵၵ

Klungkung = ၵၵၵ

- (c) *Tengenan* ၵၵၵ yang terletak pada awal kata dasar yang aksara *wianjana*-nya berbeda, masih disebut *tengenan* ၵၵၵ umpama:

bungsil = ၵၵၵ

panggung = ၵၵၵ

blungking = ၵၵၵ

jangkrik = ၵၵၵ

- (d) *Tengenan* ၵၵၵ yang terletak di depan kata-kata di bawah ini berubah menjadi *cecek* (´) dipakai untuk menghilangkan pasang tumpuk tiga, umpama:

angklung = ၵၵၵ

sungklit = ၵၵၵ

jungkling = ၵၵၵ

nyungkling = ၵၵၵ

- (e) Nama tempat di bawah ini berasal dari dua kata, umpama:

Pangkungtibah = ၵၵၵ Pangkungkarung = ၵၵၵ

(2) *Tengenan* ၵၵၵ (r)

Seluruh *tengenan* ၵၵၵ (r) berubah menjadi *surang* (´), umpama:

sekar = ၵၵၵ

gelar = ၵၵၵ

karma = ၵၵၵ

pidarta = ၵၵၵ

(3) *Tengenan* ၵၢ (h):

(a) *Tengenan* ၵၢ (a) yang terletak pada akhir kata berubah menjadi *bisah* (၅) (h), umpama:

puseh = ပုဆိပ် ၵၢ *kaliakah* = ကလိယာကၢ ၵၢ
lebih = လိပ် ၵၢ *seseh* = ခုဆိပ် ၵၢ

(b) Setiap kata dasar yang terdiri atas dua kata yang aksara wianjananya sama dan keduanya mendapat *tengenan* ၵၢ (a) maka keduanya berubah menjadi *bisah* (၅) (h), meskipun sudah disesuaikan, umpama:

cahcah = ချာချာ ၵၢ *nyahcah* = ဂျာချာ ၵၢ
kohkoh = ကော့ကော့ ၵၢ *ngohkoh* = ဂော့ဂော့ ၵၢ

(c) *Tengenan* ၵၢ (a) yang terletak pada awal kata dasar yang berupa aksara wianjananya yang berbeda, masih ditulis dengan *tengenan* ၵၢ (a) umpama:

cihna = ခိဗွၢ ၵၢ *brahmana* = ဗြာဟ္မဏၢ ၵၢ
lahru = လာဟူ ၵၢ *bahni* = ခာဗ် ၵၢ

(d) Nama tempat di bawah ini berasal dari dua kata, umpama:

Asahduren = အဆၢသုၵ်း ၵၢ *Asahgobleg* = အဆၢဂၢဝဲၵ်း ၵၢ

(4) *Adeg-adeg* ၵၢ

Adeg-adeg wajib ditulis sebagai berikut.

(a) pada bagian akhir kata, umpama:

adan = အၵၢ ၵၢ *budal* = ဗုၵ်း ၵၢ
malaib = မၵၢလိပ် ၵၢ *kajengklok* = ကၢၵ်းၵ်း ၵၢ

(b) pada akhir bagian kalimat atau akhir kalimat, umpama:

Dugase nulis lamaran, I Nyoman mecik pelengan.

သုၵ်းၵ်းလိပ်မၵၢလိပ် ၵၢ ၵၢၵ်းၵ်းပုၵ်းၵ်း ၵၢ

Sang inucap angaran Bhīma =

_ ဝ ဝ _ ဝ ဝ _ _ ဝ

မိတုကျမပူဇာကဋီဗ။

Sang inucapangaran Bhīma =

ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ _ _ ဝ

မဂိကျမပူဇာကဋီဗ။

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Bahasa. 2005. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin*. Denpasar: Departemen Pendidikan Nasional.
- Ranuh, I G. K. dan I Ketut Sukrata. 1957. *Ejaan Bahasa Daerah Bali dengan Huruf Latin*. Singaraja: Widyalyaya.
- Simpen, A.B. I Wayan. 1973. *Pasang Aksara Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Sudiarga, I Made dan I Gusti Ketut Ardhana (Editor). 2000. *Pasamuhan Agung Kecil Aksara Bali*. Denpasar: Balai Bahasa Denpasar.
- Tim Penyusun. 2005. *Pedoman Pasang Aksara Bali*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Tinggen, I Nengah. 1984. *Tata Bahasa Bali Ringkes*. Singaraja: Rhika Dewata.
- _____. 1994. *Pedoman Perubahan Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf Latin dan Huruf Bali*. Singaraja: Rhika Dewata.
- _____. 1996. *Pelik-Pelik Pasang Aksara Bali dan Penulisan Bali pada Papan Nama*. Singaraja: Rhika.
- _____. 2004. *Sejarah Perkembangan Pasang Aksara Bali*. Singaraja: Rhika.

69-0311